

2023



**STASIUN PSDKP  
PONTIANAK**

# **LAPORAN KINERJA TAHUN 2023**



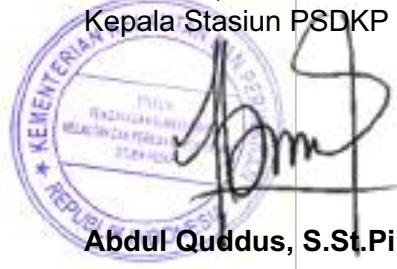
## KATA PENGANTAR

Pelaksanaan kegiatan pada Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak Tahun 2023 telah diwarnai oleh sejumlah keberhasilan yang dicerminkan dengan pencapaian indikator kinerja sasaran sesuai target, di samping beberapa capaian indikator yang belum maksimal dalam memenuhi target. Informasi kinerja tersebut disajikan dalam sebuah Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2023 Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak.

LKj Stasiun PSDKP Pontianak Tahun 2023 disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi, misi yang dibebankan kepada Stasiun PSDKP Pontianak dalam kurun waktu tahun 2021. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan kedepan.

Kami berharap, Laporan kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja sekaligus tolak ukur peningkatan kinerja bagi seluruh staf Stasiun PSDKP Pontianak dan semua pihak yang terkait. Semoga motivasi dan kerjasama yang telah dibangun dalam membangun kinerja Stasiun Pengawasan PSDKP Pontianak dapat terus ditingkatkan.

Pontianak, 16 Januari 2024  
Kepala Stasiun PSDKP Pontianak,

  
Abdul Quddus, S.St.Pi, M.Pi.

## RINGKASAN EKSEKUTIF

---

Laporan Kinerja (LKj) Stasiun PSDKP Pontianak Tahun 2023 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Ditjen PSDKP Tahun 2020-2024 dan Rencana Kinerja Tahunan 2023 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja serta telah diintegrasikan dengan Balanced Scorecard (BSC). Penyusunan LKj merupakan bentuk pertanggungjawaban Kepala Stasiun PSDKP Pontianak kepada Direktur Jenderal PSDKP, atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Disamping itu, juga sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja pengawasan SDKP selama satu tahun anggaran kepada masyarakat dan stakeholders lainnya.

Sejalan dengan semangat reformasi birokrasi, Stasiun PSDKP Pontianak telah menyusun perjanjian kinerja tahun 2023 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya serta menyempurnakannya melalui penerapan sistem pengelolaan kinerja berbasis BSC. Dalam perspektif BSC Stasiun PSDKP Pontianak telah menetapkan 10 Sasaran Strategis (SK), yaitu: <sup>(1)</sup> Terselenggaranya Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat yang Partisipat; <sup>(2)</sup> Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang Efektif; <sup>(3)</sup> Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan; <sup>(4)</sup> Terselenggaranya Pengawasan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan; <sup>(5)</sup> Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Kelautan; <sup>(6)</sup> Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan; <sup>(7)</sup> Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Perikanan; <sup>(8)</sup> Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan yang Tuntas; <sup>(9)</sup> Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Berkualitas; <sup>(10)</sup> Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Ditjen PSDKP. Pada tahun 2023 berdasarkan implementasi BSC dalam pengelolaan kinerja, Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Stasiun PSDKP Pontianak yang terdiri dari IKU dan IK sebesar 106,22%. Upaya perbaikan kedepannya yang akan dilakukan adalah dengan meningkatkan nilai komponen IKPA yang belum optimal (halaman III DIPA dan dispensasi SPM), mengupayakan anggota Tim SAKIP mengikuti workshop/bimtek SAKIP dan bagi yang berkewajiban agar tepat waktu dalam mengunggah kegiatan di collaboration office.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR .....	x
DAFTAR LAMPIRAN .....	xi
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Maksud dan Tujuan .....	2
1.3 Isu Aktual Pengawasan Stasiun PSDKP Pontianak .....	2
1.4 Tugas dan Fungsi Stasiun PSDKP Pontianak .....	3
1.5 Sistematika Penyajian.....	8
BAB 2 PERENCANAAN KINERJA .....	11
2.1 Rencana Strategis Ditjen PSDKP 2020-2024.....	11
2.2 Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2023 .....	12
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	13
2.4 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023.....	18
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA .....	19
3.1 Capaian Kinerja Pembangunan Kelautan dan Perikanan Bidang Pengawasan SDKP Tahun 2023 .....	19
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja .....	22
1. IKU 1 Indek Kualitas Pembinaan Pokmaswas.....	22
2. IKU 2 Indek Kinerja Operasi Kapal Pengawas .....	22
3. IKU 3 Indek Kinerja Speedboat Pengawas .....	22
4. IKU 4 Persentase Pemenuhan Logistik Armada PEngawasan SDKP.....	31
5. IKU 5 Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak.....	33
6. IKU 6 Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan.....	31
7. IKU 7 Persentase Penyelesaian PEngumpulan Data dan Informasi Intelijen Kelautan.....	49
8. IKU 8 Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan.....	55
9. IKU 9 Persentase Penyelesaian Pengumpulan Data dan Informasi Intelijen Perikanan.....	55

10. IKU 10 Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan .....	55
11. IKU 11 Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.....	61
12. IKU 12 Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Pengenaan Saksi .....	63
13. IKU 13 Indek Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan .....	68
14. IKU 14 Indek Kepuasan Masyarakat Pengunaan Layanan SLO Kapal Perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak .....	70
15. IKU 15 Indek Kepuasan Masyarakat Pengunaan Layanan LVHPI Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak .....	70
16. IKU 16 Nilai WBK Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak .....	73
17. IKU 17 Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatas. Berbasis Manajemen Risiko Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak .....	77
18. IK 18 Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Pontianak...	77
19. IK 19 Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak .....	79
20. IK 20 Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Stasiun PSDKP Pontianak yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan .....	80
21. IK 21 Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (Nilai).....	82
22. IK 22 Inovasi Gugus Kerja Transformasi yang dihasilkan Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (Inovasi) .....	83
23. IK 23 Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%) .....	84
24. IK 24 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%). ....	86
25. IK 25 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%) .....	88
26. IK 26 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (nilai) .....	89
27. IK 27 Nilai Kerja Anggaran (NKA) lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (nilai) .....	91
3.3. Perbandingan Capaian kinerja dengan UPT sejenis .....	92
3.4. Akuntabilitas Keuangan .....	99

BAB 4 PENUTUP .....	103
4.1 Kesimpulan .....	103
4.2 Rekomendasi .....	103

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Komposisi Sumber Daya Manusia .....	4
Tabel 2. Matrik Perubahan Indikator Kinerja dan Target Stasiun PSDKP Pontianak tahun 2023 .....	14
Tabel 3. Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Pontianak Tahun 2023 .....	15
Tabel 4. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja .....	19
Tabel 5. Perbandingan Jumlah Pelaku Usaha Kelautan Yang Diperiksa Kepatuhananya Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak Tahun 2021 dan 2023 .....	20
Tabel 6. Perbandingan Target Capaian Indeks Operasi Kapal Pengawas .....	27
Tabel 7. Perhitungan Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas Lingkup Stsiun PSDKP Pontianak .....	29
Tabel 8. Perbandingan Target dan Capaian Indek Operasi Speedboat Pengawas Lingkup Stsiun PSDKP Pontianak.....	30
Tabel 9. Perbandingan Target dan Capaian Indeks Pemenuhan Logistik Armada Pengawasan SDKP Lingkup Stasiun SDKP Pontianak.....	32
Tabel 10. Perbandingan Target dan Capaian Persentase Penyelesaian Perawatan Sarana Pengawasan SDKP Lingkup Stasiun SDKP Pontianak.....	34
Tabel 11. Nilai Kualitas Penyelesaian PEmeriksaan Pelaku Udaha dan/atau Pemanfaatan Suber Daya Kelautan.....	35
Tabel 12. Perbandingan jumlah Pelaku Usaha Kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Pontianak .....	35
Tabel 13. Pelaku Usaha Pemanfaatan Jenis Ikan dilindungi .....	37
Tabel 14. Pengawasan Unit Usaha Perikanan dan Non Perikanan yang Diperiksa Kepatuhananya dalam Pengelolaan Libah yang Berdampak pada Sumber Daya Ikan dan Lingkungannya (Pencemaran) .....	40
Tabel 15. Pelaku usaha yang diawasi kegiatan destructive fishing .....	41
Tabel 16. Rekapitulasi Pengawasan Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Ruang Laut yang Diperiksa Kepatuhanya.....	42
Tabel 17. Perbandingan Target dan Capaian Persentase penyelesaian pemeriksaaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak .....	47

Tabel 18. Rekapitulasi Kegiatan Intelijen Sumber Daya Kelautan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak .....	49
Tabel 19. Perbandingan Target dan Capaian Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak .....	50
Tabel 20. Nilai Kualitas Pemeriksaan Pelaku Usaha dan/atau pemanfaatan sumber daya perikanan.....	51
Tabel 21. Perbandingan Target dan Capaian Nilai Kualitas Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak .....	53
Tabel 22. Rekapitulasi Kegiatan Intelijen Sumber Daya Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak .....	55
Tabel 23. Perbandingan Target dan Capaian Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak .....	57
Tabel 24. Rekapitulasi Penyelesaian Pengenaan sanksi administratif Stasiun PSDKP Pontianak .....	59
Tabel 25. Perbandingan Target dan Capaian Indeks Pengenaan sanksi administratif Bidang Kelautan dan Perikanan Stasiun PSDKP Pontianak .....	60
Tabel 26. Pemeriksaan Hasil Analisis Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak .....	61
Tabel 27. Perbandingan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan .....	62
Tabel 28. Nilai Tahapan Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan Sanksi Administratif.....	63
Tabel 29. Perbandingan Target dan Capaian Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Pengenaan Sanksi Administratif .....	64
Tabel 30. Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana TPKP lingkup Stasiun PSDKP Pontianak .....	65
Tabel 31. Perbandingan Target dan Capaian Persentase Penyelesaian Penyidikan TPKP lingkup Stasiun PSDKP Pontianak.....	66
Tabel 32. Perbandingan Target dan Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak .....	68
Tabel 33. Perbandingan Target dan Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) lingkup Stasiun PSDKP Pontianak .....	70

Tabel 34. Capaian Nilai WBK Staisun PSDKP Pontianak .....	72
Tabel. 35. Perbandigan Target dan Capaian Nilai WBK Staisun PSDKP Pontianak .....	73
Tabel. 36. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis MR Staisun PSDKP Pontianak .....	74
Tabel. 37. Perbandingan Target dan Capaian Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis MR Staisun PSDKP Pontianak .....	75
Tabel 38. Perbandingan Target dan Capaian Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Pontianak .....	76
Tabel. 39. Perhitunhan Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak .....	77
Tabel. 40. Perbandingan Target dan Capaian Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak .....	77
Tabel 41. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi Dan Disampaikan.....	78
Tabel 42. Perbandingan Target dan Capaian Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi Dan Disampaikan.....	79
Tabel 43. Perbandingan Target dan Capaian Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak .....	80
Tabel. 44. Perbandingan Target dan Capaian Inovasi Gugus Kerja Transformasi yang dihasilkan Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak.....	81
Tabel 45. Perbandingan Target dan Capaian Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Pontianak .....	83
Tabel. 46. Perbandingan Target dan Capaian Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Stasiun PSDKP Pontianak.....	84
tabel 47. Perbandingan Target dan Capaian Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Barang dan Jasa lingkup Stasiun PSDKP Pontianak.....	85
Tabel.48. Perbandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PSDKP Pontianak.....	87
Tabel 49. Perbandingan Target dan Capaian Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Stasiun PSDKP Pontianak .....	88
Tabel 50. Rincian Realisasi Anggaran .....	96
Tabel 54. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Tahun 2023 .....	99



## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
Gambar 1. Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Pontianak .....	3
Gambar 2. Wilayah Kerja .....	7
Gambar 3. Peta Strategi.....	14
Gambar 4. Dashboard Kinerja Stasiun PSDKP Pontianak Tahun 2023 .....	19
Gambar 5. Capaian SKM SLO .....	70
Gambar 6. Capaian SKM LVHPI.....	70
Gambar 7. Perhitungan IP ASN lingkup Stasiun PSDKP Pontianak.....	76
Gambar 8. Capaian IK unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Pontianak.....	86
Gambar 8. Nilai Indikator Pelaksana Pelaksanaan Anggaran .....	86
Gambar 10. Nilai Kinerja Anggaran (NKA).....	88

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran</b>	<b>Halaman</b>
1. Perjanjian Kinerja tahun 2023 .....	101

## BAB 1

### PENDAHULUAN

---

#### 1.1 Latar Belakang

Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor : Permen KP Nomor 69 Tahun 2020 Tentang OTK UPT PSDKP di Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas Melaksanakan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan fungsi sebagai berikut: <sup>(1)</sup> Penyusunan rencana, program, dan evaluasi di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; <sup>(2)</sup> Pelaksanaan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan; <sup>(3)</sup> Pelaksanaan dan evaluasi penanganan pelanggaran sumberdaya kelautan dan perikanan; <sup>(4)</sup> Pelaksanaan operasional dan penyiapan logistik kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan; <sup>(5)</sup> Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana pengawasan; <sup>(6)</sup> Pelaksanaan perencanaan dan pengembangan pengawakan kapal pengawas; serta <sup>(7)</sup> Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Peningkatan peran pengawasan terus dilakukan, salah satunya diwujudkan dengan meningkatkan akuntabilitas kinerja pengawasan PSDKP dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja (LKj) Stasiun PSDKP Pontianak yang merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah desiminasi informasi capaian kinerja dalam satu tahun anggaran berdasarkan komitmen yang telah ditetapkan sebelumnya. LKj ini menginformasikan kegiatan-kegiatan yang menjadi fokus kegiatan Stasiun PSDKP Pontianak untuk mencapai tingkat kinerja yang tertuang dalam tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan.

## 1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Stasiun PSDKP Pontianak Tahun 2023 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (sebagai eselon 1 yang menaungi) dan juga Menteri Kelautan dan Perikanan atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja pengawasan PSDKP selama satu tahun anggaran kepada masyarakat dan *stakeholders* lainnya.

Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi yang dilakukan pada setiap triwulan, akan dirumuskan beberapa rekomendasi sebagai masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi pencapaian target yang lebih baik di tahun berikutnya.

## 1.3 Isu Aktual Pengawasan Stasiun PSDKP Pontianak

- Mendukung Program Ekonomi Biru Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan rincian program:
  - Perluasan kawasan konservasi laut
  - Penangkapan ikan terukur berbasis kuota
  - Pembangunan perikanan budidaya ramah lingkungan
  - Pengelolaan dan pengawasan pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan
  - Penanganan sampah plastik di laut.
- Maraknya pencurian ikan oleh Kapal Ikan Asing (KIA) dengan berbagai modus operandi yang digunakan
- Penanganan awak kapal (tersangka) dan barang bukti kapal yang dititipkan oleh pihak kejaksaan khususnya perkara dalam proses banding/kasasi
- Penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan oleh Kapal Ikan Indonesia (KII)
- Pemanfaatan Jenis ikan yang dilindungi dan/ atau apendiks CITES yang tidak patuh dengan peraturan yang berlaku
- Perusakan terumbu karang akibat penambangan dan akibat penggunaan alat tangkap yang dilarang

#### - **1.4 Tugas dan Fungsi Stasiun PSDKP Pontianak**

Kedudukan UPT. Stasiun PSDKP Pontianak dipimpin oleh Seorang Kepala setingkat Eselon IVa yang berada dibawah dan bertanggung Jawab Kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan.



Gambar 1. Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Pontianak

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Stasiun Pengawasan PSDKP Pontianak menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana, program dan evaluasi dibidang pengawasan PSDKP;
2. Pelaksanaan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan ;
3. Pelaksanaan dan evaluasi penanganan pelanggaran sumberdaya kelautan dan perikanan;
4. Pelaksanaan operasional dan penyiapan logistik kegiatan pengawasan PSDKP;
5. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana pengawasan;
6. Pelaksanaan perencanaan dan pengembangan pengawasan kapal pengawas;
7. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

#### **SDM Pengawasan**

Sumber Daya Manusia yang dimiliki Stasiun PSDKP Pontianak pada Tahun 2023 total adalah 81 orang yang tersebar di UPT Satwas/Wilker dan Kapal Pengawas. Dari total 81 orang Aparatur Sipil Negara (Pegawai Negeri Sipil) tersebut, 32 orang adalah Pengawas Perikanan sebagaimana telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 42/KEP-DJPSDKP/2017 tentang Penetapan Pengawas Perikanan Lingkup Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Tabel 1. Komposisi Sumber Daya Manusia

No	Unit Kerja	Jumlah SDM											
		S T	ST+ PP	F U	FU+ PP	FU+ PO	F P P	FPP +P O	FPP +PP	FPP +P O+ PP	J F T	P D	Jum lah
1	UPT Stasiun PSDKP Pontianak		1	8	1		4	1	3	2	2		24
2	Satwas PSDKP Sambas			1			1	2	1				5
3	Satwas PSDKP Kayong Utara			4						1			5
4	Satwas PSDKP Kota Waringin Barat			2						1			3
5	Wilker PSDKP Sungai Rengas			2		1	1						4
6	Wilker PSDKP Sungai Kakap												0
7	Wilker PSDKP Mempawah			1									1
8	Wilker PSDKP Entikong					1							1
9	Wilker PSDKP Badau			1						1			2
10	Wilker PSDKP Singkawang							1	1				2
11	Wilker PSDKP Sajingan			1									1
12	Wilker PSDKP Jagoi Babang			2									2
13	Wilker PSDKP Ketapang			3			1						4
14	Wilker PSDKP Seruyan			2									2
15	KP. Hiu Macan 01			14	1								15
16	KP. Hiu 11			9	1								10
	Jumlah Total												82

Keterangan :

ST = Struktural

PP = PPNS

FU = Fungsional Umum

PO = Polsus PWP3K

FPP = Fungsional Pengawas Perikanan

PD = Pegawai Dinas

## **Bangunan Pengawasan**

Sarana dan prasarana yang terdapat di Wilayah kerja Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak antara lain:

a. Gedung Kantor Pengawasan

Gedung kantor pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak yang sudah menjadi aset sendiri (terdaftar dalam BMN) antara lain:

1. Kantor Stasiun PSDKP Pontianak (600 M<sup>2</sup>)
2. Kantor Satwas PSDKP Sambas
3. Kantor Satwas PSDKP Kayong Utara
4. Kantor Satwas PSDKP Kotawaringin Barat
5. Kantor Wilker PSDKP Entikong
6. Kantor Wilker PSDKP Ketapang

Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak sampai Tahun 2023 terdapat beberapa Satwas/Wilker yang masih belum dibangun sehingga pihak Stasiun PSDKP Pontianak berkoordinasi dengan Dinas Provinsi/Kabupaten setempat yang terkait dengan Perikanan dan Kelautan untuk pinjam pakai kantor gedung atau ruangan yang digunakan sebagai kantor pengawasan, Satwas/Wilker PSDKP yang dimaksud adalah Wilker PSDKP Sungai Kakap, Wilker PSDKP Sungai Rengas, Wilker PSDKP Mempawah, Wilker PSDKP Singkawang, Wilker PSDKP Jagoi Babang, dan Wilker PSDKP Seruyan. Sedangkan kantor Wilker PSDKP Sajingan dan Wilker PSDKP Badau, statusnya sampai dengan saat ini adalah menyewa rumah milik masyarakat setempat yang difungsikan sebagai kantor pengawasan.

b. *Detention Centre (DTC)*

Detention Center terdapat di Stasiun PSDKP Pontianak digunakan sebagai tempat penampungan sementara awak kapal penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan dengan kapasitas maksimal 160 orang.

c. Dermaga

Dermaga berada di Stasiun PSDKP Pontianak dengan panjang ±100M dan lebar 4M yang digunakan untuk sandar Kapal Pengawas dan digunakan untuk pemeriksaan kapal yang baru diadhock.

d. Gedung Penyimpanan Barang Bukti

Gedung Penyimpanan Barang Bukti terdapat di Pontianak yang digunakan untuk penyimpanan barang bukti Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan berukuran 40 M<sup>2</sup>

e. Mess Operator

Difungsikan untuk tempat tinggal para Pegawai Negeri Sipil yang standby dan selalu siap siaga di Stasiun PSDKP Pontianak dengan jumlah 8 unit

f. Mess AKP

Difungsikan untuk tempat istirahat bagi Awak Kapal Pengawas dengan jumlah 15 kamar dimana setiap kamar maksimal dihuni oleh 4 orang

g. Kolam Labuh

Difungsikan sebagai tempat labuh kapal kapal hasil panganan TPP dengan luasan 4.800 M<sup>2</sup>

### **Kapal Pengawas**

Stasiun PSDKP Pontianak sampai saat ini mengelola 2 unit Kapal Pengawas yaitu KP. Hiu Macan 01 dan KP. Hiu 11 dan 5 unit Speed Boat Pengawasan yang penempatannya dialokasikan pada Stasiun PSDKP Pontianak (2 unit), Satwas PSDKP Kayong Utara (1 unit), Wilker PSDKP Kapuas Hulu (1 unit), dan Satwas PSDKP Sambas (1 unit).

### **Satwas dan Wilker Pengawasan**

Wilayah Kerja Stasiun PSDKP Pontianak tersebar di 2 provinsi yaitu Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah, adapun peta wilayah kerja Stasiun Pengawasan PSDKP Pontianak dapat dilihat pada Gambar 2. berikut ini:



Gambar 2. Wilayah Kerja

Wilayah kerja yang menjadi kewenangan Stasiun PSDKP Pontianak adalah WPP 711 dan 712, merupakan daerah *fishng ground* yang memiliki potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang melimpah dengan berbagai keragaman hayati dan non hayati. Seiring dengan terjadinya pengembangan kelembagaan Unit Pelaksana Teknis pada Direktorat Jenderal PSDKP berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 69/PERMEN-KP/2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan per Tanggal 28 Desember 2020 maka wilayah kerja Stasiun PSDKP Pontianak berubah menjadi 3 Satwas dan 10 Wilker Pengawasan, yaitu:

- Satwas PSDKP Sambas;
- Satwas PSDKP Kayong Utara;
- Satwas PSDKP Kotawaringin Barat;
- Wilker PSDKP Sungai Rengas;
- Wilker PSDKP Sungai Kakap;
- Wilker PSDKP Mempawah;
- Wilker PSDKP Entikong;
- Wilker PSDKP Kapuas Hulu;
- Wilker PSDKP Singkawang;
- Wilker PSDKP Sajingan;
- Wilker PSDKP Jagoi Babang;
- Wilker PSDKP Ketapang
- Wilker PSDKP Seruan.

## 1.5 Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja (LKj) Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak pada dasarnya mengkomunikasikan pencapaian kinerja pada Tahun 2023. Capaian kinerja (*Performance Results*) Tahun 2023 tersebut diperbandingkan dengan rencana kinerja (*Performance Plan*) Tahun 2023 sebagai tolok ukur keberhasilan capaian. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasiannya sejumlah celah kinerja (*Performance Gap*) bagi perbaikan kinerja dimasa datang.

Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak (sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun

2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah:

### **Bab I Pendahuluan**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

### **Bab II Perencanaan Kinerja**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun berjalan.

### **Bab III Akuntabilitas Kinerja**

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

#### **B. Evaluasi dan Analisis**

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

#### **C. Akuntabilitas Keuangan**

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

#### **Bab IV Penutup**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran:

1. Perjanjian Kinerja
2. Lain-lain yang dianggap perlu

## BAB 2

### PERENCANAAN KINERJA

---

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdiri dari : Renstra Ditjen PSDKP Tahun 2023, Rencana Kerja Tahunan (RKT) Stasiun PSDKP Pontianak tahun 2023, dan Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Pontianak Tahun 2023.

#### 2.1 Rencana Strategis Ditjen PSDKP 2020-2024

Rencana Strategis (Renstra) Ditjen. PSDKP 2020-2024 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan. Renstra tersebut disusun selaras dengan arah kebijakan strategis nasional bidang kelautan dan perikanan 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam arah kebijakan KKP 2020-2024.

Sampai saat ini, rencana strategis Ditjen. PSDKP masih dalam proses sinkronisasi dengan kebijakan KKP. Adapun proses penyusunan Renstra Ditjen. PSDKP sudah dilakukan dimulai akhir periode renstra 2020-2024. Renstra disusun dengan menggunakan evaluasi renstra periode sebelumnya, asumsi yang dipertanggungjawabkan serta kombinasi pendekatan *bottom up* dan *top down* dengan keterlibatan Eselon I, Eselon II, Eselon III dan Eselon IV lingkup Ditjen PSDKP. Pendekatan *top down* mengandung makna bahwa perencanaan ini memperhatikan pula ketersediaan anggaran sesuai dengan estimasi APBN. Sedangkan pendekatan *bottom up* dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan pendanaan guna mewujudkan kondisi ideal.

Berdasarkan tujuan tersebut, maka ditetapkan sasaran strategis Direktorat Jenderal PSDKP tahun 2020-2024 melalui 2 (dua) pendekatan yaitu logical model yang utamanya gunakan untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) sesuai dengan format Bappenas dan Kementerian Keuangan serta menggunakan pendekatan Balanced Scorecard (BSC) yang utamanya digunakan untuk penyusunan Perjanjian Kinerja dan pengukuran kinerja. Pada pendekatan logical model, sasaran disusun secara logis dan terstruktur menjadi: sasaran strategis (K/L) yang menghasilkan dampak (impact), sasaran program (unit eselon I) yang menghasilkan (Outcome), dan sasaran kegiatan (unit eselon II) yang menghasilkan keluaran (output). Dengan demikian, jika menggunakan pendekatan tersebut, maka sasaran Ditjen. PSDKP

Tahun 2020-2024 merupakan sasaran program dari program pengawasan SDKP, yaitu :

- a. Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan SDKP, dan
- b. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan SDKP yang professional dan partisipatif

## **2.2 Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2023**

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Stasiun PSDKP Pontianak disusun berdasarkan turunan tahunan dari Rencana Strategis Tahun 2020–2024. Penetapan Kinerja (Tapja) Tahun 2023 adalah manifestasi dari Rencana Kerja Tahunan untuk mengukur target dan capaian kinerja. RKT Stasiun Pengawasan PSDKP Pontianak berisikan program kegiatan:

A. Pemantauan dan Operasional Armada;

1. Operasional Kapal Pengawas
2. Kapal Perikanan yang Diperiksa Kapal Pengawas
3. Cakupan WPPNRI yang Dipantau Menggunakan Kapal Pengawas
4. Awak Kapal yang Memperoleh Kesehatan Rutin Tahunan
5. Armada Pengawasan dan Sistem Pemantauan Yang Siap Operasi
6. Kesiapan Sistem Pemantauan SDKP
7. Operasional Speed Boat/ Rigid Inflatable boat/ Rubber Boat
8. Kapal Perikanan yang Diperiksa Speed Boat/ Rigid Inflatable boat/ Rubber Boat
9. Cakupan WPPNRI yang Dipantau Menggunakan Speed Boat/ Rigid Inflatable boat/ Rubber Boat
10. Tindak Lanjut Informasi POKMASWAS
11. Bangunan/ Pos Pengawasan yang dibangun
12. Speed Boat Pengawasan yang dibangun

B. Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan;

1. Penyelesaian administrasi penyidikan, pemanggilan dan pemeriksaan tersangka serta saksi TPKP
2. Penyelesaian Penanganan Barbuk
3. Penyelesaian Penanganan Awak Kapal

C. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan;

1. Jenis Ikan Yang Dilindungi Yang Diawasi Sesuai Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku

2. Pelaku Usaha Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil Yang Patuh terhadap Peraturan perundang - undangan yang berlaku
  3. Pelaku Usaha Pemanfaat Ruang Laut Nasional Yang Patuh terhadap Peraturan perundang - undangan yang berlaku
  4. Pelaku Usaha Perikanan Yang Bebas dari Destructive Fishing
- D. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan;
1. Kapal Perikanan Yang Laik Operasional
  2. Unit Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Yang Patuh Terhadap Peraturan Perundang – undangan
  3. Unit Usaha Budidaya Ikan Yang Patuh Terhadap Peraturan Perundang - undangan
  4. Usaha Distribusi Hasil Perikanan Yang Patuh Terhadap Peraturan Perundang - undangan
- E. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya,
1. Layanan Sarana Dan Prasarana Internal
  2. Layanan Dukungan Manajemen Satker
  3. Layanan Perkantoran

### **2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023**

Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja adalah untuk: <sup>(1)</sup> Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; <sup>(2)</sup> Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; dan <sup>(3)</sup> Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. Stasiun PSDKP Pontianak yang optimal.

Stasiun PSDKP Pontianak telah menerima Perjanjian Kinerja tahun 2023 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya serta menyempurnakannya melalui penerapan sistem pengelolaan kinerja berbasis BSC. Implementasi BSC dalam pengelolaan kinerja di lingkungan Ditjen. PSDKP, selain merupakan pemenuhan amanat kebijakan pengelolaan kinerja yang telah ditetapkan oleh KKP, juga ditujukan untuk:

1. Menterjemahkan strategi organisasi kedalam rencana operasional dengan baik, sehingga manajemen kinerja organisasi akan selaras dengan strategi organisasi;
2. Membangun organisasi yang terus menerus melakukan perbaikan (*continuous improvement*)
3. Membangun keselarasan antar unit kerja dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi.

BSC Stasiun PSDKP Pontianak menggunakan 3 perspektif dalam BSC, yaitu: *Customer Perspective, Internal Process Perspective, dan Learn and Growth Perspective*. Digunakannya seluruh *perspective* dalam BSC menunjukkan bahwa Direktorat Jenderal PSDKP merupakan unit kerja utama dalam BSC (*Core Unit of Balance Scorecard*), bukan sebagai unit kerja pendukung dalam BSC (*supporting unit of Balance Scorecard*). *Stakeholders Perspective* dan *Customer Perspective* dijadikan satu perspektif dengan pertimbangan untuk lebih menonjolkan peran Stasiun PSDKP Pontianak dalam mendukung tercapainya kemakmuran masyarakat kelautan dan perikanan.



Gambar 3. Peta Strategi

Peta strategi Stasiun PSDKP Pontianak menerapkan 3 perspektif, yaitu: *customers perspective, internal process perspective, dan learning and growth perspective*. *Customers perspective* berisi ekspektasi dari *customer* dan apa yang menjadi ukuran keberhasilan atas pelayanan yang dilaksanakan. *Internal process perspective* berisi proses bisnis seperti apa yang harus dikelola untuk memberikan layanan dan nilai-nilai kepada *stakeholder* dan *customer*. Sedangkan *Learning and*

*growth perspective* berisi sumber daya internal yang dimiliki untuk melakukan perbaikan dan perubahan.

Pada tahun 2023 Stasiun PSDKP Pontianak telah mengalami perubahan perjalanan kinerja yang terkait dengan target indikator kinerja utama yang ditentukan. Perubahan target indikator kinerja Stasiun PSDKP Pontianak tahun 2023 dapat dijelaskan pada tabel berikut;

Tabel 2. Matrik Perubahan Target Indikator Kinerja Stasiun PSDKP Pontianak Tahun 2023

Sebelum		Menjadi	
Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target
1. Persentase Penyelesaian Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP	100	Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP (%)	100
1. Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha Kelautan (%)	100	Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan (Nilai)	100
2. Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha Perikanan (%)	100	Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan (Nilai)	100
3. Persentase Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan (%)	93	Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (indeks)	93
4. Nilai WBK Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (nilai)	75	Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (nilai)	75
5. Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (Nilai)	90	Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (Nilai)	80,5
6. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (Nilai)	89	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (Nilai)	93,75

Pengukuran tingkat capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam Manual Indikator Kinerja Utama *Balanced Score Card* (IKU BSC). Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian yang telah diraih dengan target yang telah ditetapkan.

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Pontianak Tahun 2023

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
<b>KEGIATAN 1. PEMANTAUAN, OPERASI ARMADA DAN INFRASTRUKTUR PENGAWASAN</b>				
1.1	Terselenggaranya Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat yang Partisipatif	1	Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas (Indeks)	80
1.2	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang Efektif	2	Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas (Indeks)	87,6
		3	Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas (Indeks)	87,6
		4	Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas (%)	100
1.3	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	5	Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP (%)	100
<b>KEGIATAN 2. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN</b>				
2.1	Terselenggaranya Pengawasan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan	6	Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan (Nilai)	100
2.2	Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Kelautan	7	Persentase Penyelesaian Pengumpulan Data dan Informasi Intelijen Kelautan (%)	100
<b>KEGIATAN 3. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN</b>				
3.1	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan	8	Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan (Nilai)	100
3.2	Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Perikanan	9	Persentase Penyelesaian Pengumpulan Data dan Informasi Intelijen Perikanan (%)	100
<b>KEGIATAN 4. PENANGANAN PELANGGARAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>				
4.1	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan yang Tuntas	10	Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (indeks)	80
		11	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (Indeks)	80
		12	Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Pengenaan Sanksi Administratif (Indeks)	80
4.2	Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Berkualitas	13	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (Indeks)	93

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
<b>KEGIATAN 5. DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL LINGKUP DITJEN. PSDKP</b>				
5.1	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Ditjen PSDKP	14	Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (Indeks)	80
		15	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (Indeks)	80
		16	Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (nilai)	75
		17	Percentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%)	100
		18	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (Indeks)	78
		19	Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (Nilai)	80,5
		20	Percentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	75
		21	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Stasiun PSDKP Pontianak (Nilai)	21
		22	Jumlah Inovasi yang Dihasilkan Stasiun PSDKP Pontianak (Inovasi)	1
		23	Percentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%)	92
		24	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%)	77,5
		25	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%)	77,5
		26	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (Nilai)	93,75

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
		27	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (Nilai)	82

#### 2.4 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023

Pengukuran tingkat capaian Indikator Kinerja Utama dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam Manual IKU. Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 yang didukung dengan implementasi aplikasi BSC “Kinerjaku” yang merupakan aplikasi khusus BSC berbasis informasi teknologi.

## BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1 Capaian Kinerja Pembangunan Kelautan dan Perikanan Bidang Pengawasan SDKP Tahun 2023

Berdasarkan implementasi BSC dalam pengelolaan kinerja, Stasiun PSDKP Pontianak telah menyempurnakan dan menetapkan 10 (Sepuluh) Sasaran Strategis (SS) dengan 27 Indikator Kinerja. Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Stasiun PSDKP Pontianak yang terdiri dari IKU dan IK sebesar 106,22%.



Sumber: SAPK ([kinerjaku.kkp.go.id](http://kinerjaku.kkp.go.id))

Gambar 4. Dashboard Kinerja Stasiun PSDKP Pontianak Tahun 2023

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh hasil pengukuran IKU pada setiap Sasaran Strategis sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET 2023/TW IV	REALISASI 2023	%
1	Terselenggaranya Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat yang artisipatif	1	Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas (Indeks)	80	100	120
2	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang Efektif	2	Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas (Indeks)	87,6	95,94	109,52
		3	Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas (Indeks)	87,6	93,67	106,93
		4	Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas (%)	100	100	100
		5	Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP (%)	100	100	100
4	Terselenggaranya Pengawasan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan	6	Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan (Nilai)	100	100	100
5	Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Kelautan	7	Persentase Penyelesaian Pengumpulan Data dan Informasi Intelijen Kelautan (%)	100	100	100
6	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan	8	Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan (Nilai)	100	100	100
7	Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Perikanan	9	Persentase Penyelesaian Pengumpulan Data dan Informasi Intelijen Perikanan (%)	100	100	100
8	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan yang Tuntas	10	Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (indeks)	80	100	120
		11	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (Indeks)	80	100	120
		12	Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Pengenaan Sanksi Administratif (Indeks)	80	100	120
9	Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Berkualitas	13	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (Indeks)	93	100	107,53

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET 2023/TW IV	REALISASI 2023	%
10	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Ditjen PSDKP	14	Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (Indeks)	80	91,03	113,79
		15	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (Indeks)	80	86,45	108,06
		16	Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (nilai)	75	82,67	110,23
		17	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%)	100	100	100
		18	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (Indeks)	78	90,59	116,14
		19	Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (Nilai)	80,5	79,55	98,82
		20	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	75	75	100
		21	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Stasiun PSDKP Pontianak (Nilai)	21	24,85	118,33
		22	Jumlah Inovasi yang Dihasilkan Stasiun PSDKP Pontianak (Inovasi)	1	1	100
		23	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%)	92	85	92,39
		24	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup	77,5	100	120

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023/TW IV	REALISASI 2023	%
		Stasiun PSDKP Pontianak (%)			
		25 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%)	77,5	100	120
		26 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (Nilai)	93,75	92,45	98,61
		27 Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (Nilai)	82	85,92	104,78

Penjelasan warna:

NO	WARNA	KETERANGAN
1		Istimewa (nilai 110-120)
2		Baik ( nilai 90-<110)
3		Cukup ( nilai 70 - <90)
4		Kurang (nilai 50 - <70)
5		Sangat Kurang (nilai < 50)
6		Belum Ada Penilaian

Penjelasan tentang capaian IKU pada masing-masing Sasaran Strategis tersebut akan dijelaskan pada bagian evaluasi dan analisis capaian kinerja.

### 3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Selama periode Tahun 2023 Stasiun PSDKP Pontianak telah melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya. Evaluasi dan analisis terhadap capaian sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

#### 1. Indek Kualitas Pembinaan POKMASWAS

Indeks Kualitas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu suatu organisasi menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran organisasi. Indeks kualitas pembinaan POKMASWAS adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kualitas terhadap kegiatan pembinaan dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) PSDKP dan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam kegiatan pembinaan POKMASWAS untuk terciptanya Sistem

Pengawasan berbasis Masyarakat (SIMSWASMAS) secara baik dan efektif. Dalam hal ini, di wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) PSDKP dan Dinas Kelautan dan Perikanan melaksanakan kegiatan pembinaan Pokmaswas dan dituangkan dalam sebuah laporan (80%). Pembinaan POKMASWAS adalah kegiatan pemberian pedoman, standar pelaksanaan, bimbingan, konsultasi, dan evaluasi pelaksanaan pengawasan, yang dilakukan melalui pembekalan, sosialisasi dan/atau bimbingan teknis kepada anggota POKMASWAS guna meningkatkan pengetahuan dan partisipasi aktif POKMASWAS dalam membantu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Indek kualitas pembinaan POKMASWAS dinilai terhadap kualitas kegiatan pembinaan POKMASWAS yang dilaksanakan oleh UPT dan Dinas Kelautan dan Perikanan. Komponen penilaian kegiatan pembinaan POKMASWAS antara lain:

- a. Rencana kerja kegiatan pembinaan;
- b. Pendataan keaktifan POKMASWAS;
- c. Pelaksanaan kegiatan pembinaan.

Adapun formula perhitungannya adalah

$$x = \frac{a + b + c}{100}$$

Keterangan:

- x : Indeks Kualitas Supervisi Pembinaan POKMASWAS (%)  
a : Rencana kerja kegiatan pembinaan (: 20)  
b : Pendataan keaktifan POKMASWAS (bobot: 30)  
c : Pelaksanaan kegiatan pembinaan (bobot: 50)

Capaia IKU Indeks Kualitas Pembinaan POKMASWAS lingkup Stasiun PSDKP Pontianak sebesar 100 atau dengan persentase sebesar 120%. Capaian ini didapat dari pemenuhan komponen penilaian dari rencana kerja kegiatan pembinaan dengan nilai sebesar 20, Pendataan keaktifan POKMASWAS dengan nilai sebesar 30 dan Pelaksanaan kegiatan pembinaan dengan nilai sebesar 50. Pelaksanaan kegiatan pembinaan POKMASWAS dalam penguatan peran masyarakat dalam Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan melalui sistem berbasis masyarakat Stasiun PSDKP Pontianak tahun 2023 telah dilakukan di 4 lokasi dengan melibatkan Anggota Komisi IV DPR RI dengan masing-masing

wilayah pemilihannya. Sebanyak 9 POKMASWAS telah dibina sepanjang triwulan tahun 2023. Untuk perencanaan telah dilakukan pada awal tahun 2013, untuk pendataan telah dilakukan Bersama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Kemudian pelaksanaan pembinaan telah dilakukan di wilayah Kalimantan Barat pada 3 lokasi dan Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 1 lokasi, adapun rincian kegiatan dapat dijelaskan pada tabel berikut;

No	Waktu Pelaksanaan	Lokasi	Jumlah Kelompok Hadir	Narasumber	Keterangan
1	20 Mei 2023	Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.	2	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kal-Bar Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Kubu Raya Anggota DPR-RI Komisi IV ibu Maria Lestari, S.Pd	Jumlah Peserta Hadir 130 orang
2	1 Juni 2023	Pulau Lemukutan, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat.	2	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kal-Bar Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bengkayang Anggota DPR-RI Komisi IV Bapak Daniel Johan, S.E, M.M	Jumlah Peserta Hadir 130 orang
3	30 Okt 2023	Desa Jongkong Pasar, Kec. Jongkong, Kab. Kapuas Hulu, Kal-Bar	3	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kal-Bar Anggota DPR-RI Komisi IV Ibu Yessy Melania, S.E (diwakilkan oleh Tenaga ahli Yesaya Pamungkas, S.Kel)	Jumlah Peserta Hadir 110 orang
4	27 Nov 2023	Pangkalanbun, Kab. Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah	2	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kal-Bar Dinas Perikanan Kab. Kotawaringin Barat Anggota DPR-RI Komisi IV Bambang Purwanto, S.St., MH	Jumlah Peserta Hadir 110 orang

Dari 4 lokasi yang dilakukan pembinaaan Pokmaswas yang aktif mendukung pengawasan SDKP terdapat 9 Pokmaswas yang hadir dan dibina. Capaian IKU ini berdasarkan tahapan kegiatan yang dilakukan yaitu sebesar 100 dimana dari pencapaian tahapan perencanaan sebesar 20, tahapan pendataan 30 dan pelaksanaan sebesar 50. Capaian Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak pada tahun 2023 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2022 karena pada tahun 2022 merupakan IKU Persentase Pokmaswas yang aktif mendukung pengawasan SDKP. IKU ini juga tidak dapat dibandingkan dengan capaian 5 tahun terakhir karena merupakan IKU baru.

Adapun dukungan anggaran untuk pencapaian Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas yang aktif mendukung pengawasan SDKP Lingkup Stasiun PSDKP

Pontianak Sebesar Rp. 400.000.000 sampai dengan tanggal 31 Desember Tahun 2023 realisasi anggaran 399,659,549 atau 99,91 %. Capaian ini dapat mencapai hasil yang baik dikarenakan semua komponen tahapan dalam perhitungan dapat dilaksanakan dimana kegiatan perencanaan telah dilakukan pada awal tahun dengan koordinasi dengan unit kerja diatasnya dan Kerjasama dan koordinasi dengan anggota Komisi IV DPRRI yang mana secara konsisten juga melakukan koordinasi dengan tenaga ahli sehingga Teknik kegiatan dapat terencana dengan baik. Pendataan Pokmaswas juga telah dilakukan dimana dalam proses ini telah dilaksanakan kerjasama yang baik dengan dinas Keluatan dan perikanan provinsi Kalimantan barat. Pada saat pelaksanaan juga telah dilakukan kegiatan koordinasi yang baik antar instansi sehingga kegiatan dapat dilaksanakan dengan tepat waktu sesuai yang telah direncanakan. Selain itu jumlah SDM pengawas perikanan dan Polsus PWP3K yang berada di Stasiun PSDKP Pontianak dan tersebar di Satwas/Wilker Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak yang telah membantu dalam pencapaian indikator kinerja ini dimana kehadiran SDM memberikan dampak yang positif dan mempermudah pencapaian kinerja ini. Dalam hal ini koordinasi yang baik diantaranya adalah dengan instansi pemerintah, masyarakat nelayan, Pomaswas, Pokdarwis dan hubungan yang baik dengan anggota komisi IV DPR RI sebagai mitra dalam kegiatan ini.

Tabel 5. Perbandingan Target dan Capaian Indeks Kualitas Pembinaan POKMASWAS

INDIKATOR KINERJA	2020		2021		2022		2023		2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Indeks Kualitas Pembinaan POKMASWAS	-	-	-	-	-	-	80	100	-	-
% Capaian	-	-	-	-	-	-	120	-	-	-

## 2. IKU Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas

Indeks Kinerja adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu suatu organisasi menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran organisasi. Indeks Kinerja Operasional Kapal Pengawas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional kapal pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan PSDKP yang profesional dan partisipatif. Indeks Kinerja Kinerja Operasional Kapal Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni: a.

Pemeriksaan yang terdiri dari pemeriksaan Kapal Perikanan dan pemeriksaan Kelautan; b. Cakupan wilayah pengawasan; c. Tindak Lanjut Target Operasi yang terdiri dari Intercept indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan dan Dukungan Kegiatan SAR; d. Hasil Dukungan kegiatan operasi lainnya yang terdiri dari Penyitaan Alat Tangkap Terlarang, Pemutusan Rumpon Illegal, dan Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi.

Untuk mengukur Indeks Kinerja Operasional Kapal Pengawas menggunakan formulasi sebagai berikut:

$$I_{kp} = \sum_{i=1}^4 Bobot (\%) \times \left( \frac{Capaian}{Target} \right) \times 100$$

Keterangan:

- Ikp = Indeks kinerja Kapal Pengawas  
Bobot (%) = Persentase pembagian Indikator yang mempengaruhi  
Capaian = Realisasi capaian kinerja Kapal Pengawas  
Target = Sasaran kinerja Kapal Pengawas

Variabel Pembentuk:

1. Pemeriksaan : Bobot 40%

- Pemeriksaan Kapal Perikanan (unit kapal): Bobot 70%
- Pemeriksaan Kelautan (kali)]: Bobot 30%

Pemeriksaan Kelautan antara lain: [Pemeriksaan Kawasan Konservasi, Pemanfaatan Ruang Laut, Pengawasan PPKT, Pencemaran SDI dan lingkungan, Sedimentasi dan lain lain.

- Setiap Kapal Pengawas diberikan target pemeriksaan sebanyak 2 (dua) unit kapal ikan per hari.

2. Cakupan wilayah pengawasan (Bobot 40%)

- Cakupan Wilayah Pengawasan merupakan cakupan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara;

- Republik Indonesia (WPPNRI) dengan luas 1.928.506 NM2 (Sumber: BIG, 2015).

- Masing-masing kapal pengawas diberikan target cakupan per tahun. Dasar penentuan tersebut dilakukan berdasarkan kemampuan teknis kapal dan alokasi kapal setiap WPPNRI.

3. Tindak Lanjut Target Operasi (Bobot 15%)

- Intercept indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan : Bobot 60%
- Dukungan kegiatan SAR : Bobot 40%
- Dukungan kegiatan SAR bersifat situasional, bagi Kapal Pengawas yang tidak mendapat tugas melakukan SAR dianggap memenuhi bobot/mencapai target.

#### 4. Hasil dukungan operasi lainnya (Bobot 5%)

- Penyitaan Alat Tangkap terlarang : Bobot 30%
- Pemutusan Rumpon Illegal : Bobot 30%
- Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi: Bobot 40%
- Komponen ini juga bersifat situasional, apabila salah satu tidak terpenuhi dikarenakan memang tidak ada penugasan, maka dianggap memenuhi bobot/target tercapai. Hasil pengukuran indeks kinerja operasi kapal pengawas Triwulan IV tahun 2023 dapat dijelaskan pada tabel berikut;

Tabel 7. Perhitungan Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak Periode Triwulan IV Tahun 2023

No	Satker	Kapal Pengawas	Pemeriksaan Kapal Perikanan (70%)			Pemeriksaan Kelautan (30%)			Jumlah Pemeriksaan Kelautan dan Perikanan (40%)			Percentase Cakupan Wilayah Pengawasan (40%)			Intercept Indikasi Pelanggaran (60%)			Dukungan Kegiatan SAR (40%)			Tindak Lanjut Target Operasi (15%)			Penyitaan Alat Tangkap Terlarang (30%)			Pemutusan Rumpon legal (30%)			Dukungan Operasi Bersama (40%)			Dukungan Operasi Lainnya (5%)			Total Nilai Indeks	Nilai per Satker
			TW IV			TW IV			TW IV			TW IV			TW IV			TW IV			TW IV			TW IV			TW IV			TW IV							
			Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai							
1	Stasiun PSDKP Pontianak	KP. HIU MACAN 01	252	179	49.722	0	0	30	31.89	0.76	1.67	40	0	0	60	0	0	40	15	0	0	30	0	0	30	0	0	40	5	91.89	95.94						
		KP. HIU 11	244	271	70	0	0	30	40	0.60	1.15	40	0	0	60	0	0	40	15	0	0	30	0	0	30	0	0	40	5	100.00							

Capaian pada IKU indek kinerja operasi kapal pengawas lingkup Stasiun PSDKP Pontianak dengan capaian pada Triwulan IV tahun 2023 sebesar 95,94 atau dengan persentase capaian sebesar 109,52%. Capaian IKU ini telah melampaui dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 87,6. Capaian IKU ini lebih tinggi apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2022 pada periode triwulan IV yaitu sebesar 92,99. IKU ini juga tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2021 dimana IKU pada tahun 2021 merupakan Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan kapal pengawas lingkup Stasiun PSDKP Pontianak dan 5 tahun terakhir karena merupakan IKU baru pada tahun 2022. IKU ini juga tidak bisa dibandingkan dengan dokumen Renstra karena baru ada pada tahun 2022. Tercapainya IKU ini dikarenakan realisasi hari operasi yang mencapai dari target hari operasi dan jumlah kapal yang diperiksa walau pada kapal pengawas Hiu Macan 01 masih terdapat

kekurangan dan unsur lain yang menjadi komponen perhitungan indeks operasi kapal pengawas. Untuk mendukung IKU ini telah telah dialokasikan dana sebesar Rp. 24.349.228.000 dengan realisasi sampai bulan Desember 2023 sebesar Rp. 24.313.720.049 atau dengan persentase sebesar 99,85%. Keberhasilan capaian IKU ini dikarenakan kondisi kapal pengawas (Hiu Macan 01 dan Hiu 11) pada tahun 2023 dengan kondisi yang siap untuk beroperasi sedangkan faktor cuaca buruk hanya terjadi pada awal tahun yaitu bulan Januari dan Februari sedangkan antara bulan Maret sampai Desember dapat dimaksimalkan gelar operasi. Hal ini sejalan dengan kegiatan perawatan yang dilakukan oleh Stasiun PSDKP Pontianak khususnya untuk kedua kapal pengawas. Jumlah dan kondisi kesiapan AKP (awak kapal pengawas) juga menjadi penentu keberhasilan capaian IKU ini, AKP yang ditempatkan sudah memiliki kecakapan pengawakan kapal yang cukup mumpuni yang telah mengikuti kegiatan pelatihan sepanjang tahun 2023 baik daring maupun luring. Pada tahun 2022 lalu AKP Stasiun PSDKP Pontianak Juga melakukan *Medical Check-Up* untuk pemantapan kondisi kesehatan AKP selama bertugas ditahun 2023.

Tabel 6. Perbandingan Target dan Capaian Indeks Operasi Kapal Pengawas

INDIKATOR KINERJA	2020		2021		2022		2023		2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Indeks Operasi Kapal Pengawas	-	-	-	-	85	92,99	87,6	95,94		
% Capaian	-		-		109		109,52			

### 3. IKU Indek kinerja Speed Boat Pengawas

Indeks Kinerja adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu suatu organisasi menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran organisasi. Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional Speed Boat Pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif. Indeks Kinerja Kinerja Operasi Speedboat Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan yakni; 1). Pemeriksaan yang terdiri dari Pemeriksaan Kapal Perikanan dan Pemeriksaan Kelautan; 2). Cakupan wilayah pengawasan; 3). Tindak Lanjut Target Operasi yang terdiri dari Intercept indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan dan Dukungan Kegiatan SAR; 4). Hasil Dukungan kegiatan operasi lainnya yang terdiri dari Penyitaan Alat Tangkap Terlarang, Pemutusan Rumpon

Illegal, dan Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi. Formula perhitungan:

$$I_{sp} = \sum_{i=1}^4 Bobot (\%) \times \left( \frac{Capaian}{Target} \right) \times 100$$

Keterangan:

- $I_{sp}$  = Indeks kinerja Speedboat Pengawas  
Bobot (%) = Persentase pembagian Indikator yang mempengaruhi  
Capaian = Realisasi capaian kinerja Speedboat Pengawas  
Target = Sasaran kinerja Speedboat Pengawas

#### VARIABEL PEMBENTUK

Daftar Faktor Penghitung Indeks Kinerja Speedboat Pengawas:

1. Jumlah Pemeriksaan [Bobot 40%] yang terdiri dari:

- Pemeriksaan Kapal (unit kapal): Bobot 50%
- Pemeriksaan Kelautan (kali): Bobot 50%
- Setiap Speedboat Pengawas diberikan target pemeriksaan sebanyak 1 unit kapal ikan per hari.

2. Persentase Cakupan Wilayah Pengawasan [Bobot 40%];

• Cakupan Wilayah Pengawasan merupakan cakupan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) dengan luas 1.928.506 NM<sup>2</sup> (Sumber: BIG, 2015).

- Masing-masing speedboat pengawas diberikan target cakupan per tahun, dasar penentuan tersebut dilakukan berdasarkan kemampuan teknis speedboat pengawas.

3. Jumlah Tindak Lanjut Target Operasi [Bobot 15%] yang terdiri dari:

- Intercept indikasi pelanggaran kelautan dan perikanan: Bobot 60%
- Dukungan kegiatan SAR: Bobot 40%
- Dukungan kegiatan SAR bersifat situasional, bagi Kapal Pengawas yang tidak mendapat tugas melakukan SAR dianggap memenuhi bobot/mencapai target.

4. Jumlah dukungan operasi lainnya [Bobot 5%] yang terdiri dari:

- Penyitaan Alat Tangkap Terlarang Bobot: Bobot 40%
- Pemutusan Rumpon Illegal: 40%

- Dukungan Operasi Bersama: Bobot 20%
- Komponen bersifat situasional, apabila salah satu tidak terpenuhi dikarenakan memang tidak ada penugasan, maka dianggap memenuhi bobot/target tercapai.

Hasil pengukuran indeks kinerja operasi Speedboat pengawas Triwulan IV tahun 2023 dapat dijelaskan pada tabel berikut;

Tabel 9. Perhitungan Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak Periode Triwulan IV Tahun 2023

Lokasi UPT	Nama Speedboat	Pemeriksaan Kapal Perikanan (50%)		Pemeriksaan Kelautan (50%)		Jumlah Pemeriksaan Kelautan dan Perikanan (40%)	Persentase Cakupan Wilayah Pengawasan (40%)			Intercept Indikasi Pelanggaran (60%)			Dukungan Kegiatan SAR (40%)			Tindak Lanjut Target Operasi (15%)	Penyitaan Alat Tangkap Terlarang (40%)			Pemutusan Rumpon Ilegal (40%)			Dukungan Operasi Bersama (20%)			Dukungan Operasi Lainnya (5%)	Total Nilai Indeks	Nilai per Satker		
		TW IV		TW IV			TW IV			TW IV			TW IV				TW IV			TW IV			TW IV							
		Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Nilai		
Stasiun PSDKP Pontianak	Napoleon 03	43	60	50	0	0	50	40	0.00026	0.00032	40.00	0	0	60	0	0	40	15	0	0	40	0	0	40	0	0	20	5	100	93,6731
	Napoleon 37	49	20	20.41	0	0	50	28.16	0.00028	0.00065	40.00	0	0	60	0	0	40	15	0	0	40	0	0	40	0	0	20	5	88.1633	
	Napoleon 38	10	21	50	0	0	50	40	0.00018	0.00009	20.20	0	0	60	0	0	40	15	0	0	40	0	0	40	0	0	20	5	80.2022	
	RIB/Sea Rider 05	31	34	50	0	0	50	40	0.00026	0.00050	40.00	0	0	60	0	0	40	15	0	0	40	0	0	40	0	0	20	5	100	
	Speed Boat TB.01	38	39	50	0	0	50	40	0.00028	0.00033	40.00	0	0	60	0	0	40	15	0	0	40	0	0	40	0	0	20	5	100	

Capaian pada IKU indek kinerja operasi Speedboat pengawas lingkup Stasiun PSDKP Pontianak dengan capaian pada Triwulan IV tahun 2023 sebesar 93,67 atau dengan capaian 106,93% dengan rincian pada tabel diatas. Capaian IKU ini telah melampaui dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 87,6. Capaian IKU ini lebih tinggi apabila dibandingkan dengan tahun 2022 pada periode triwulan IV yaitu sebesar 88,5. IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian 5 tahun terakhir karena merupakan IKU baru pada tahun 2022 perhitungan pada Triwulan II (semesteran). IKU ini juga tidak bisa dibandingkan dengan dokumen Renstra karena baru ada pada tahun 2022. Pada IKU tahun sebelumnya merupakan IKU cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan speedboat pengawas. Tercapainya IKU ini dikarenakan realisasi hari operasi yang telah mencapai dan bahkan melebihi dari target hari operasi. Keberhasilan dikarenakan kegiatan gelar operasi dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi cuaca dengan pemilihan rute operasi yang tepat. Selain itu juga kapal yang diperiksa dapat mencapai target

bahkan melebihi dan juga karena kapal yang diperiksa masih dapat dijangkau oleh armada Speedboat pengawas. Kondisi Speedboat juga siap untuk melakukan gelar operasi dengan kondisi yang baik. Kegiatan perawatan Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat lingkup Stasiun PSDKP Pontianak yang telah dilakukan sepanjang tahun sehingga menjamin kesiapan dalam kesiapan operasi Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat pada awal dan pertengahan tahun 2023. Penyebaran operator Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat yang merata ditiap Satwas/Wilker menjadikan kegiatan gelar operasi menjadi lebih siap dan menggunakan tenaga operator Speed Boat yang berkompeten dibidangnya. Untuk mendukung IKU ini telah dialokasikan dana sebesar Rp. 1.030.775.000 dengan realisasi sampai bulan Desember tahun 2023 sebesar Rp. 1.025.848.725 atau dengan persentase sebesar 99,52%.

Tabel 7. Perbandingan Target dan Capaian Indek operasi Speed Boat Pengawas lingkup Stasiun PSDKP Pontianak.

INDIKATOR KINERJA	2020		2021		2022		2023		2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Indeks kinerja Speed Boat Pengawas	-	-	-	-	85	88,5	87,6	93,67	-	-
% Capaian	-		-		104		106,93		-	

#### 4. Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas

Indeks pemenuhan logistik armada pengawasan PSDKP adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk mengukur pemenuhan kebutuhan logistik kapal pengawas untuk mendukung operasi pengawasan PSDKP. Logistik yang dimaksud meliputi pemenuhan Logistik Kapal dan pemenuhan Logistik Personel. Logistik kapal terdiri dari : a. Bahan Bakar Minyak (BBM) , dan b. Pelumas, Logistik Personel terdiri dari : a. Bahan Makanan b. Air Tawar, dan c. Alat-alat Pelayanan (ATK, Bahan Komputer, Komaliwan, Peta dan atau Buku Jurnal Deck & Mesin) d. Pemenuhan Kebutuhan Senjata Api. Dalam hal terjadi kerusakan kapal yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan operasi pengawasan maka, target dianggap tercapai (100%). Formula perhitungannya adalah sebagai berikut :

$$i_{dat} = \sum_{i=1}^n f_i$$

Keterangan:

$i_{dat}$  = Indeks pemenuhan logistik armada pengawasan SDKP

$n$  = Jumlah indeks kinerja

$i$  = indeks Pemenuhan

$f_i$  = faktor penghitung

Daftar Faktor Penghitung Indeks Pemenuhan Logistik Armada Pengawasan SDKP 1). Bahan Bakar Minyak (BBM) (30%); 2). Pelumas (20%); 3). Bahan Makanan (25%); 4). Air Bersih (15%); 5). Alat-alat Pelayanan (5%); 6). Pemenuhan Kebutuhan Senjata Api (5%).

Hasil pengukuran indeks kinerja operasi Speedboat pengawas Triwulan IV tahun 2023 dapat dijelaskan pada tabel berikut;

Tabel 8. Perhitungan Indeks Pemenuhan Logistik Armada Pengawasan SDKP Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak Periode Triwulan IV Tahun 2023

No	Satker	Kapal Pengawas	Bahan Bakar Minyak (BBM) (30%)			Pelumas (20%)			Bahan Makanan (25%)			Air Bersih (15%)			Alat-alat Pelayanan (5%)			Pemenuhan Kebutuhan Senjata Api (5%)			Total Nilai Indeks	
			TW IV			TW IV			TW IV			TW IV			TW IV			TW IV				
			Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai		
1	Stasiun PSDKP Pontianak	KP. HIU MACAN 01	12	12	30	2	2	20	12	12	25	12	12	15	1	1	5	12	12	5	100.00	
		KP. HIU 11	12	12	30	2	2	20	12	12	25	12	12	15	1	1	5	12	12	5	100.00	

Capaian pada IKU pemenuhan logistik armada pengawasan SDKP lingkup Stasiun PSDKP Pontianak dengan capaian pada Triwulan IV tahun 2023 sebesar 100% atau dengan persentase capaian sebesar 100%. Rincian hasil komponen perhitungan dapat dilihat pada tabel diatas. Capaian IKU ini telah mencapai dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 100. IKU ini tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 100. IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan 5 tahun terakhir karena merupakan IKU baru pada tahun 2022. IKU ini juga tidak bisa dibandingkan dengan dokumen Renstra karena baru ada pada tahun 2022.

Tercapainya IKU ini dikarenakan kebutuhan BBM setiap bulannya telah terpenuhi Dimana dalam hal ini Stasiun PSDKP Pontianak telah melakukan Kerjasama dengan pihak Pertamina Patra Niaga sehingga dalam pemenuhan

kebutuhan BBM selalu terpenuhi. Pemenuhan kebutuhan pelumas juga menjadi perhatian Dimana pelumas untuk mesin induk dan mesin bantu dapat dipenuhi secara tepat waktu. Kebutuhan bahan makanan juga selalu terpenuhi baik Ketika hendak melakukan gelar operasi maupun Kapala pengawas berlabuh di dermaga, langkah yang diambil berupa berbelanja kebutuhan makanan pada lokasi yang terjangkau dan pada penyedia bahan makanan yang lebih lengkap. Untuk kebutuhan Air Tawar tidak mengalami kendala dikarenakan wilayah Pontianak dan Kepulauan Riau dalam pemenuhan air bersih cukup mudah. pemenuhan alat-alat pelayanan telah terpenuhi saat armada Kapal Pengawas mengajukan kebutuhan logistik peratan ATK dan peralatan dukungan komputer suplai. Sepanjang tahun 2023 telah dilakukan pengadaan kebutuhan perlengkapan Kapal Pengawas secara tuntas dari beban kerja anggaran. Pemenuhan kebutuhan yang diperlukan juga telah ditangani secepat mungkin oleh perangkat yang menangani sarana prasarana lingkup Stasiun PSDKP Pontianak. Untuk mendukung IKU ini telah telah dialokasikan dana sebesar Rp. 21.738.192.000 dengan realisasi sampai bulan Desember tahun 2023 sebesar Rp 21.728.480.500 atau dengan persentase sebesar 99,96%. Adanya buka tutup blokir (*automatic adjustment*) dan ABT (Anggaran Biaya Tambahan) menjadikan postur anggaran berubah dalam pemenuhan logistik Armada Pengawasan SDKP Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak sehingga menjadikan IKU ini berhasil dicapai. yang semula Rp. 16.088.928.000 menjadi Rp. 21.738.192.000.

Tabel 9. Perbandingan Target dan Capaian Indeks Pemenuhan Logistik Armada Pengawasan SDKP lingkup Stasiun PSDKP Pontianak

INDIKATOR KINERJA	2020		2021		2022		2023		2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Indeks Pemenuhan Logistik Armada Pengawasan SDKP	-	-	-	-	90	100	100	100	-	-
% Capaian	-		-		111		100		-	

##### 5. Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP (%)

Persentase Penyelesaian Perawatan Sarana Pengawasan SDKP adalah jumlah Sarana Pengawasan SDKP yang selesai dirawat dibandingkan dengan target kegiatan perawatan Sarana Pengawasan SDKP yang dilaksanakan oleh UPT Stasiun PSDKP Pontianak. Sarana Pengawasan SDKP meliputi : 2 (dua) unit Kapal

Pengawas Perikanan (Kapal Pengawas Hiu Macan 01 dan Hiu 11) dan 5 (lima) unit (Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat, Napoleon 038,037 dan 003, TB 01 dan Searider 05). Perawatan Sarana Pengawasan SDKP terdiri dari; perawatan pencegahan (*preventive maintenance*), perawatan prediktif (*predictive maintenance*), dan perawatan darurat (*breakdown maintenance*). Pelaksanaan kegiatan perawatan Sarana Pengawasan SDKP dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran dengan target persentase penyelesaian perawatan sebesar 100%. Metode pengukuran yaitu  $X_{KP} = \{(\sum a)/(\sum b)\} \times 100\%$ , Keterangan:  $X_{KP}$  = Persentase Penyelesaian Perawatan Sarana Pengawasan SDKP a = Jumlah Sarana Pengawasan yang selesai dirawat b = Target Sarana Pengawasan yang selesai dirawat. IKU ini merupakan instrument dalam mengukur sejauh mana kesiapan sarana Pengawasan SDKP yang laik operasi dalam mendukung kegiatan operasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Sampai dengan 31 Desember 2023 penyelesaian perawatan sarana pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak telah dilaksanakan berupa Perawatan Pencegahan (*preventive*), Perawatan Prediktif (*predictive*) dan Perawatan Darurat (*breakdown maintenance*) untuk Kapal Pengawas Hiu 11 dan Hiu Macan 01. Selain itu dilakukan juga Perawatan Pencegahan (*preventive*) Perawatan Prediktif (*predictive*) dan Perawatan Darurat (*breakdown maintenance*), Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/ Rubber yaitu Napoleon 037,038 dan 003, TB 01 dan Searider 05) dengan realisasi capaian sebesar 100%. IKU ini telah mencapai terget yang telah ditentukan pada tahun 2023 yaitu sebesar 100%. IKU ini apabila dibandingkan dengan tahun 2022 mengalami capaian yang sama yaitu 100%. IKU ini tidak bisa dibandingkan dengan 5 tahun terakhir karena merupakan IKU baru yang dimulai pada tahun 2021. IKU ini juga tidak bisa dibandingkan dengan dokumen Renstra karena baru ada pada tahun 2021. Indikator kinerja tersebut merupakan indikator kinerja yang ditetapkan berdasarkan Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024. Adapun realisasi anggaran untuk penyelesaian perawatan sarana pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak Pontianak yaitu Rp 2.321.682.756 dengan pagu sebesar 2.323.652.000 atau capaian anggaran 99,92%.

Indikator kinerja ini dapat dikatakan berhasil dikarenakan telah melampaui target yang telah ditentukan. Keberhasil pencapaian IKU ini dikarenakan kegiatan perawatan armada secara rutin yang telah dilakukan di lingkup Stasiun PSDKP Pontianak, Dimana saat kapal bersandar di dermaga Stasiun PSDKP Pontianak maupun di Batam dan Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau dimana pada lokasi

tersebut diatas merupakan lokasi yang telah memenuhi persyaratan dalam kegiatan perawatan preventif. Untuk kegiatan perawatan prediktif seperti kegiatan general overhaul, pengadaan suku cadang dan perlengkapan kapal telah dilakukan di Pontianak dan Batam-Tanjung Pinang yang merupakan di tempat pihak penyelanggara kegiatan tersebut, untuk tempat atau bengkel, tenaga teknis dan suku cadang yang telah tersedia di lokasi yang disebutkan diatas.

Tabel 10. Perbandingan Target dan Capaian Persentase penyelesaian perawatan sarana pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak

INDIKATOR KINERJA	2020		2021		2022		2023		2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak	-	-	100	100	100	100	100	100	-	-
% Capaian	-		100		100		100		-	

## 6. Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan (Nilai)

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha kelautan yang sesuai ketentuan” diidentifikasi kedalam IKU yaitu: (1). Penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha bidang kelautan adalah upaya pengawasan usaha kelautan oleh Polisus PWP3K dengan melakukan pemeriksaan kesesuaian kegiatan pelaku usaha kelautan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaporan hasil pengawasan. (2). Pemeriksaan pelaku usaha kelautan meliputi pelaku usaha kapal kelautan (penangkapan dan/atau pengangkutan), pelaku usaha pembudidayaan ikan, pelaku usaha pengolahan ikan, pelaku usaha pemasaran dan distribusi hasil kelautan. (3). Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya kelautan merupakan penjumlahan dari nilai penyelesaian tahapan pemeriksaan untuk setiap pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya kelautan. Formula perhitungannya adalah sebagai berikut;

$$x_{sdk} = \sum_{i=1}^n \frac{(X_i + \dots + X_n)}{n}$$

Keterangan:

- Xsdk* : Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya kelautan
- Xi* : Nilai penyelesaian pemeriksaan terhadap komponen objek pengawasan sumber daya kelautan ke-i
- n* : Jumlah komponen objek pengawasan sumber daya kelautan yang diperiksa

Penentuan nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya kelautan mengacu pada tabel berikut ini:

Tabel 11. Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya kelautan

No.	Kegiatan	Nilai	Output
1.	Persiapan, meliputi :		
	a. Membuat jadwal pemeriksaan; b. Berkoordinasi dengan pelaku usaha yang akan diperiksa; c. Menyusun administrasi pemeriksaan; dan/atau d. Rapat persiapan pemeriksaan.	10	Surat Tugas, Surat Pemberitahuan Kepada Pelaku Usaha, Daftar Pertanyaan
2.	Pelaksanaan pemeriksaan pelaku usaha	70	Hasil pengawasan, Form pengawasan dan/atau data dukung
3.	Penyusunan laporan hasil pengawasan ditembuskan kepada Direktur PPSDK	20	Laporan Pemeriksaan Pelaku Usaha
Jumlah Nilai		100	

Satasiun PSDKP Pontianak dalam mencapai IKU ini telah melakukan kegiatan seperti (1) Unit usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Apendiks Cites yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Pontianak; (2) Unit usaha pengelolaan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan ruang laut yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Pontianak; (3) Unit usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya; (4) Unit Usaha Perikanan yang diawasi dari Kegiatan Penangkapan Ikan yang Merusak/ Destructive Fishing Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak.

Tabel 12. Perbandingan Jumlah Pelaku Usaha Kelautan Yang Diperiksa Kepatuhan Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak Tahun 2022 dan 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	2022		2023	
		Target	Realisasi	Target	Target
1	Unit usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Apendiks Cites yang diperiksa kepatuhannya	3	7	5	17
2	Unit usaha pengelolaan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan ruang laut yang diperiksa kepatuhannya	2	9	6	16
3	Unit usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya	6	8	8	8
4	Unit Usaha Perikanan yang diawasi dari Kegiatan Penangkapan Ikan yang Merusak/ Destructive Fishing	20	28	20	33
<b>Total Jumlah Pelaku Usaha Perikanan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Pontianak</b>		<b>31</b>	<b>52</b>	<b>39</b>	<b>74</b>

Perhitungan penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan diperoleh dari perhitungan 4 komponen pembentuk sebagai berikut:

$$xk = (Xjid + Xcemar + Xprl + xdf) / n$$

$xk$  : Pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan

$Xjid$  : Unit usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Apendiks Cites yang diperiksa kepatuhannya

$Xprl$  : Unit usaha pengelolaan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan ruang laut yang diperiksa kepatuhannya

$Xcemar$  : Penyelesaian pemeriksaan kepatuhan usaha perikanan dan non perikanan dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya

$xdf$  : penyelesaian pemeriksaan kepatuhan usaha perikanan terhadap ketentuan pelarangan destructive fishing

$n$  : Jumlah komponen objek pengawasan sumber daya kelautan yang diperiksa di UPT Stasiun PSDKP pontianak

Pada triwulan IV tahun 2023 capaian nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan stasiun PSDKP Pontianak sebesar 100 yang didapat dari pemenuhan Persiapan, meliputi : 1). Membuat jadwal pemeriksaan, berkoordinasi dengan pelaku usaha yang akan diperiksa, menyusun administrasi pemeriksaan dan/atau rapat persiapan pemeriksaan dengan bobot 10 .2). Pelaksanaan pemeriksaan pelaku usaha berupa Hasil pengawasan, Form

pengawasan dan/atau data dukung dengan bobot 70 dan 3). Penyusunan laporan hasil pengawasan ditembuskan kepada Direktur PPSDK dengan bobot 20. IKU ini telah mencapai target yang telah ditentukan yaitu sebesar 100. IKU ini apabila dibandingkan dengan tahun 2022 mengalami capaian yang sama yaitu 100 yang merujuk pada IKU Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak. IKU ini tidak bisa dibandingkan dengan 5 tahun terakhir karena merupakan IKU yang dimulai pada tahun 2022 revisi perjanjian Kinerja bulan September Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024. IKU ini juga tidak bisa dibandingkan dengan dokumen Renstra karena baru ada pada tahun 2022.

Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan sampai tahun 2023 adalah 100 yang terbentuk dari:

**a. Pemeriksaan kepatuhan pemanfaatan jenis ikan dilindungi**

Rekapitulasi pelaku usaha yang diawasi dari pemanfaatan jenis ikan dilindungi pada tahun 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 13. Pelaku Usaha Pemanfaatan Jenis Ikan dilindungi

No	Waktu dan Pelaksana Pengawasan	UPT PSDKP	Nama pelaku usaha	Jenis Ikan	Ketaatan	Keterangan
1	Atma Surya, S.St.Pi / 31 Januari 2023	Wilker PSDKP Ketapang / Stasiun PSDKP Pontianak	ROBI SEPTIADI	Hiu dan Pari Look a like species	Taat	Robi Septiadi / NIK. 32121609010001 / NIB. 1270000101308 telah malakukan pengiriman / distribusi produk olahan berupa kulit hiu dan pari look a like tanpa disertai surat rekomendasi dari BPSPL Pontianak dan kepadanya telah diberikan surat teguran tertulis.
2	Koko Hardito, S.St.Pi 15 Februari 2023	Stasiun PSDKP Pontianak	RUDI HARTONO / PT. Global Asia redwana	Arwana Super Red	Tidak taat	Rudi Hartono / NIK. 6171032601740002 selaku Direktur tidak dapat melakukan kegiatan usahanya dari PT. Global Asia Redwana / NIB. 2012210034087 karena mengalami kendala pengurusan dokumen perizinan di pemerintah pusat dan aliran dana asing pun telah dihentikan, sehingga kegiatan usaha dilakukan menggunakan PT. Global Alam Redwana yang berstatus PMDN dengan NIB. 0220104140775
3	Heru Trikarya dan Titik Sabekti / 10-12 Maret 2023	Wilker PSDKP Seruyan / Stasiun PSDKP Pontianak	ALBERT ARGIANTO EFENDY	Hiu dan Pari Appendiks Cites	Taat	ALBERT ARGIANTO EFENDY / NIB. 2803230041808 telah malakukan pengiriman / distribusi produk olahan berupa kulit hiu dan pari Appendiks Cites II tanpa disertai SIPJI dan SAJI dari BPSPL Pontianak dan kepadanya telah diberikan sanksi berupa paksaan pemerintah berupa penghentian kegiatan berusaha dengan BA Paksaan Pemerintah nomor B.584/PSDKPSta.4/KP.440/III/2023 tanggal 21 Maret 2023.
4	Sarjiyo, S.H, Imam Budiyono, S.St.Pi dan Maulidwan Sabri, A.Md /	Stasiun PSDKP Pontianak	PD. Fathi Nusantara, Bpk. Stephanus dan Bpk. Agus Vedi	Hiu dan Pari Appendiks Cites	Tidak taat	PD. Fathi Nusantara / NIB. 0220107832283/SIPJI.19/1/KKP/2020, Pelaku usaha malakukan pengiriman / distribusi produk olahan berupa kulit hiu dan pari Appendiks Cites II dengan disertai SIPJI dan SAJI dari BPSPL Pontianak

5	10-May-23		Bpk. Stephanus		Tidak taa	Bpk.STEPHANUS/NIB.8120003951502/SIPJI.66/1/KKP/2021, Pelaku usaha malakukan pengiriman / distribusi produk olahan berupa kulit hiu dan pari Appendiks Cites II dengan disertai SIPJI dan SAJI dari BPSPPL Pontianak
6			Bpk. Agus Vedi		Tidak taa	Bpk.AGUS VEDI/NIB.0214000961213/SIPJI.32/1/KKP/2021, Pelaku usaha malakukan pengiriman / distribusi produk olahan berupa kulit hiu dan pari Appendiks Cites II dengan disertai SIPJI dan SAJI dari BPSPPL Pontianak
7	Wisnu Jaya Rantaka, S.St.Pi dan Paulina Boru Sitohang / 16 Mei 2023 26-May-23	Stasiun PSDKP Pontianak /Wilker PSDKP Kapuas Hulu	PT. Nusantara Arwana Indonesia	Arwana	Tidak taa	Di PT. Nusantara Arwana Indonesia, NIB : 0220005272366, Dusun. Tj. Kuda, Desa. Padua Mendalam, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Bara, koordinat N 0° 53' 30.8148" - E 113° 00'41.5476 , dokumen lengkap dan sesuai dengan kondisi di lapangan.
8			CV. Lucky Indo Aquatic		Tidak taa	CV. Lucky Indo Aquatic, NIB : 81200048725160007, Jl. Putussibau Bika HM 231, Desa Jaras Kec. Putussibau Selatan, Kab. Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Koordinat N 0° 50' 45.5388" - E 112° 52'35.6952, dokumen lengkap dan sesuai dengan kondisi di lapangan.
9	Bonis Andrei.T.S, S.St.Pi,M.Tr.Pi dan Imam Budiyono, S.St.Pi / 1-Nov-23	Stasiun PSDKP Pontianak	PD.SETIA RED	Red Arwana	Tidak taa	PD. SETIA RED , NIB : 8120018151803, Jl. Purnama Agung 7 Blok B.21 RT 001 RW 007 Parit Tokaya, Kec. PontianakSelatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Koordinat : 0° 03' 34" LS - 109° 19' 52,5" BT, PT. SETIA RED sudah memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan dan NIB tetapi belum memiliki SIPJI DAN SAJI. Dan sementara ini PD. SETIA RED dalam melaksanakan kegiatan usahanya bekerja sama dengan PT. ACI (Arwana Citra Nusantara) yang telah memiliki dokumen lengkap. Tapi antara PD.SETIA RED dan PT.ACI belum mempunyai surat Perjanjian Kerja Sama, sehingga dari petugas Pengawas Perikanan PSDKP Pontianak di sarankan untuk segera membuat Perjanjian Kerja sama secara tertulis
10	Imam Budiyono, S.St.Pi dan Sy.M.Iqbal Maulana/ 20-22 Nov 2023	Stasiun PSDKP Pontianak	CV.ARWANA TUJUH TUJUH	Red Arwana	Tidak taa	CV. ARWANA TUJUH TUJUH , NIB : 2203220027851, LOKASI kolamnya di Desa Kuala Mandor A, Kuala Mandor B RT/RW 004/022 Kecamatan Sebangki, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat. Provinsi Kalimantan Barat, Koordinat : 0° 02' 47" LS - 109° 50' 678" BT. CV. ARWANA TUJUH TUJUH sudah memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan dan NIB serta memiliki SIPJI DAN SAJI. Dan CV. ARWANA TUJUH TUJUH dalam melaksanakan kegiatan usahanya sudah dengan ketentuan dan Perundang Undangan Yang berlaku.
11	Imam Budiyono, S.St.Pi, Lukman Hakim, S.Pi, Ahmad Rohmaddin, S.Pi, M.Akbar dan Abang Aditia/ 6-9 Desember 2023	Stasiun PSDKP Pontianak	PT.INFINITAS MERAH PUTIH	Red Arwana	Tidak taa	PT.INFINITAS MERAH PUTIH , NIB : 1244000700588, LOKASI di Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat, Koordinat: 0° 19'57,812" LS - 111° 43' 58,273" BT. PT. Infinitas Merah Putih saat ini hanya melaksanakan kegiatan Pengembangbiakan Ikan Bersirip (Pisces) yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITE, sudah memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan dan NIB serta memiliki SIPJI tetapi blm mempunyai SAJI karena selama ini belum pernah melakukan pengiriman ikan.
12	Imam Budiyono, S.St.Pi,Indah Nurmasari, A.Md, Kurniawan Arida,	Stasiun PSDKP Pontianak	CV.ARWANA 777	Red Arwana	Tidak taa	1. CV. ARWANA TUJUH TUJUH dengan koordinat 0° 2'55.7232" LS - 109° 20'59.7444" BT. dan alamat gudangnya yaitu pada Jalan Tanjung Sari No 77, Kelurahan Bansir Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota

13	S.Kel, dan M.Affani/ 14 Desember 2023	Stasiun PSDKP Pontianak	BAMBANG SANDARI/PD. ARWANA PULAU BELUMBA	Red Arwana	Tidak taa	Pontianak, Kalimantan Barat, Dengan NIB 2203220027851, CV. ARWANA TUJUH TUJUH telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan usahanya. 2. BAMBANG SANDARI/PD. ARWANA PULAU BELUMBA dengan koordinat 0° 3'4.2948" LS - 109° 19'16.7016" BT. dan alamat lengkapnya yaitu pada Jl. Purnama 2 Komp. Purnama Elok No. F.2, Desa/Kelurahan Paritkarya, Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. NIB 1226000212178 dan telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan usahanya.
14	Imam Budiyono, S.St.Pi dan Sy.M.Iqbal Maulana/ 15 Des 2023	Stasiun PSDKP Pontianak	CV.AGRO MEGA ARWANA	Red Arwana	Tidak taa	CV. AGRO MEGA ARWANA , NIB :0220001561023, LOKASI di Jl. Adi Sucipto Gg. HM.Tahir, Desa Bangka Belitung Laut, Kec.Pontianak Tenggara, Provinsi Kalimantan Barat, Koordinat : 0° 03' 24" LS - 109° 21'47" BT. CV. AGRO MEGA ARWANA sudah memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan dan NIB serta memiliki SIPJI DAN SAJI. Dan CV.AGRO MEGA ARWANA dalam melaksanakan kegiatan usahanya sudah dengan ketentuan dan Perundang Undangan Yang berlaku.
15	Koko Hardito, S.St.Pi,M.Tr.Pi, Kurniawan Arida,S.Kel dan Tri Kurniawati, S.Pi/ 15 Desember 2023	Stasiun PSDKP Pontianak	CV. DUA SAUDARA BERKARYA	Red Arwana	Tidak taa	CV. DUA SAUDARA BERKARYA , NIB : 0220004391784, LOKASI di Jl. Tanjung raya II Gg. Suka Aman, Kel. Paritmayor, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Koordinat : 0° 3' 21.924" S - 109° 22' 42.24" E. CV.DUA SAUDARA BERKARYA sudah memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan dan NIB serta memiliki SIPJI DAN SAJI. Dan CV.DUA SAUDARA BERKARYA dalam melaksanakan kegiatan usahanya sudah dengan ketentuan dan Perundang Undangan Yang berlaku
16	Bonis Andrei T.S, S.St.Pi,M.Tr.Pi, Uray Mus Hayadin,S.Pi,Kurniawan Arida,S.Kel dan Deni Yuliandy, S.Pi/ 29 Desember 2023	Stasiun PSDKP Pontianak	CV. ANUGERAH MASSA AROWANA	Red Arwana	-	1. CV. Anugerah Massa Arowana dengan koordinat 0° 1' 13.793" S - 109° 29' 31.156" E dan NIB 2805220016824, alamat farm sitenya di Dusun Pelita Jaya, Kel. Kuala Mandor B, Kec. Kuala Mandor B, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalimantan Barat, CV. Anugerah Massa Arowana telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan usahanya.
17			PT.DINAMIKA KAPUAS	Red Arwana	-	2. PT. Dinamika Kapuas dengan koordinat 0° 5' 47.483" S - 109° 23' 59.325" E dan NIB 8120008821154, alamat Gudangnya di Jl. Adi Sucipto KM. 10.7, Sungai raya, Kec. Sungai raya, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalimantan Barat dan telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan usahanya.

Sampai dengan Triwulan IV tahun 2023 pemeriksaan kepatuhan pemanfaatan jenis ikan dilindungi berjumlah sebanyak 17 pelaku usaha. Telah dilakukan oleh pengawas Polisus WP3K yang tersebar di wilayah kerja ketapang, seruyan, Stasiun PSDKP Pontianak dan Wilker Kapuas Hulu. Pelaku yang telah terperiksa ada yang telah taat dan ada juga pelaku usaha yang belum taat dikarenakan dokumen perizinan yang masih belum di proses seperti SIPJI ataupun SAJI. Terdapatnya pembinaan oleh Direktorat PPSDK dalam pengawasan SDK.

**b. Pemeriksaan kepatuhan usaha perikanan dan non perikanan dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya.**

Perairan darat dan laut adalah ekosistem akuatik yang memiliki peran penting dalam siklus hidrologi. Selain dipengaruhi oleh aktivitas organisme atau

lingkungan, kualitas suatu perairan juga ditentukan oleh aktivitas manusia. Perubahan pola pemanfaatan lahan menjadi area pemukiman, pertanian, serta meningkatnya aktivitas industri akan memberikan dampak terhadap kualitas perairan. Perairan menjadi ekosistem yang rentan tercemar akibat limbah yang dihasilkan dari beragam pola pemanfaatan lahan dan aktivitas industri. Mengingat peran penting perairan bagi keberlangsungan hidup organisme, termasuk berbagai jenis ikan, maka pemantauan perairan yang terindikasi tercemar sangat perlu dilakukan secara berkelanjutan, komprehensif, dan menggunakan metode yang tepat agar dapat segera ditangani. Stasiun PSDKP Pontianak pada pengawasan sektor kelautan untuk mendukung program prioritas KKP tahun 2023 “Penanganan Sampah Plastik di Laut” telah melaksanakan kegiatan bersih pantai dalam rangkaian kegiatan Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan yang melibatkan seluruh pegawai PSDKP Pontianak dan stakeholder terkait, pelaksanaan kegiatan tersebut adalah untuk mendukung program prioritas ekonomi biru Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Sampai Pada Triwulan IV Pemeriksaan kepatuhan usaha perikanan dan non perikanan dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya sebanyak 8 pelaku usaha yang telah dilakukan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak sebagaimana rinciannya dapat dijelaskan pada tabel berikut;

Tabel 14. Pengawasan Unit usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya (Pencemaran) sampai bulan November 2023

No	Pelaku Usaha	Alamat	Waktu Pengawasan	Hasil Pengawasan
1	PT. Energi Unggul Persada	Jalan Raya Sungai Limau, Ds. Sungai Limau, Kec. Sungai Kunyit, Kab. Mempawah, KALBAR	13-01-2023	Dari hasil pengamatan pada Outlet WWTP, Outlet SWRO, Outfall gabungan, tidak ditemukan biota/ikan yang terdampak / tidak ada indikasi terjadinya pencemaran dari kegiatan Industri Pengolahan Kelapa Sawit
2	PT. Agri Sentral Lestari	Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat	3-05-2023	Pengawas Perikanan masih menunggu hasil uji Lab. Dari LHK Prov. Kalimantan Barat, untuk menyimpulkan poin-poin dalam pengawasan

3	Kampung Budidaya 'Maju Bersama'	Gg. Bandaria No. 11C. kelurahan tengah Kec. Mempawah Hilir,Kab. Mempawah, Prov. Kal-Bar	14 -06-2023	Telah memiliki izin usaha Untuk dokumen kepedulian lingkungan telah disosialisasikan dan kepada pelaku usaha untuk segera diurus
4	PT. Multi Artha Samudra	Jl. A Rani Kuala Sepapah, Kec. Mempawah Hilir Kab. Mempawah Provinsi Kal-bar	15-06- 2023	Telah memiliki izin usaha Untuk dokumen kepedulian lingkungan telah dalam proses pengajuan ke dinas lingkungan hidup
5	PT. Agri Inti Prima	Jl. A. Yani, Kel. Pasir Wan Salim Kec. Mempawah Hilir, Kab . Mempawah	15-06- 2023	Telah memiliki izin usaha Untuk dokumen kepedulian lingkungan telah dalam proses pengajuan ke dinas lingkungan hidup dikarenakan lahan tambak yang mereka Kelola tidak beroperasi selama 1 tahun
6	Bong Fai Tjong	Jl. Raya Sui . Bakau, Desa Sui. Pinyuh, Kec. Sui. Pinyuh, Kab. Mempawah	15 -06-2023	Telah memiliki izin usaha Untuk dokumen kepedulian lingkungan telah dimiliki dalam bentuk Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)
7	PT. Pulaumas Khatulistiwa	Jl.Khatulistiwa KM. 6 No. 602, Kelurahan Batulayang, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak - Kalimantan Barat	12 -06-2023	Limbah yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan pengolahan ikan yang dilakukan oleh PT. Pulaumas Khatulistiwa Dan CV. Dolphin telah diolah dengan baik menggunakan IPAL yang telah terstandarisasi oleh KLHK.
8	CV. Dolphin		12 -06-2023	

**c. Pemeriksaan kepatuhan usaha perikanan terhadap ketentuan pelarangan destructive fishing**

Rekapitulasi pelaku usaha yang diawasi dari kegiatan destructive fishing sampai dengan Triwulan IV adalah sebagai berikut:

Tabel 15. Pelaku usaha yang diawasi kegiatan destructive fishing

NO	Pelaku Usaha	Lokasi	Hasil Pemeriksaan
1	Ridwansyah	PPI. Kumai	Tidak ditemukan bahan peledak atau bius
2	Abdul Hakim	PPI. Kumai	Tidak ditemukan bahan peledak atau bius
3	Supiansyah	PPI. Kumai	Tidak ditemukan bahan peledak atau bius
4	Agus Rahman	PPI. Kumai	Tidak ditemukan bahan peledak atau bius
5	Aly Usman	PPI. Kumai	Tidak ditemukan bahan peledak atau bius

6	Junaidi	PPI. Kumai	Tidak ditemukan bahan peledak atau bius
7	Abdul Syukur	PPI. Kumai	Tidak ditemukan bahan peledak atau bius
8	Nurkholis	PPI. Kumai	Tidak ditemukan bahan peledak atau bius
9	Maskur	PPI. Kumai	Tidak ditemukan bahan peledak atau bius
10	Mastuan	PPI. Kumai	Tidak ditemukan bahan peledak atau bius
11	Nordin	PPI. Kumai	Tidak ditemukan bahan peledak atau bius
12	Said M. Yusuf	PPI. Kumai	Tidak ditemukan bahan peledak atau bius
13	Abdul Rahman	PPI. Kumai	Tidak ditemukan bahan peledak atau bius
14	M. Yusuf Mastur	PPI. Kumai	Tidak ditemukan bahan peledak atau bius
15	Musyadi Yusuf	PPI. Kumai	Tidak ditemukan bahan peledak atau bius
16	Muhli	PPI. Kumai	Tidak ditemukan bahan peledak atau bius
17	Cecep Wishnu. K	PPI. Kumai	Tidak ditemukan bahan peledak atau bius
18	Muslimin	PPP.Teluk Batang	Tidak ditemukan bahan peledak atau bius
19	Hendra	PPP.Teluk Batang	Tidak ditemukan bahan peledak atau bius
20	Saharudin	PPP.Teluk Batang	Tidak ditemukan bahan peledak atau bius
21	sukardi	PPP.Teluk Batang	Tidak ditemukan bahan peledak atau bius
22	Yunus	PPP.Teluk Batang	Tidak ditemukan bahan peledak atau bius
23	Rahmanto	PPP.Teluk Batang	Tidak ditemukan bahan peledak atau bius
24	Suparto	PPP.Teluk Batang	Tidak ditemukan bahan peledak atau bius
25	Pendi	PPP.Teluk Batang	Tidak ditemukan bahan peledak atau bius
26	Jap	PPP.Teluk Batang	Tidak ditemukan bahan peledak atau bius
27	Mat Iahir	PPP.Teluk Batang	Tidak ditemukan bahan peledak atau bius
28	Hermanto	PPP.Teluk Batang	Tidak ditemukan bahan peledak atau bius
29	Long Ti	PPP.Teluk Batang	Tidak ditemukan bahan peledak atau bius
30	Murat	PPP.Teluk Batang	Tidak ditemukan bahan peledak atau bius
31	Mis	PPP.Teluk Batang	Tidak ditemukan bahan peledak atau bius
32	Muslimin	PPP.Teluk Batang	Tidak ditemukan bahan peledak atau bius
33	Wadi	PPP.Teluk Batang	Tidak ditemukan bahan peledak atau bius

Sampai dengan triwulan IV pengawasan destructive fishing telah dilakukan sebanyak 33 pelaku usaha terhadap nelayan dengan kapal <10 GT. Dari 33 kapal tersebut 17 kapal dilakukan di PPI Kumai oleh Satwas PSDKP Kota Waringin Barat dan 16 kapal di PPP Teluk Batang oleh Satwas Kayong Utara. Dari hasil pemeriksaan 33 kapal yang diperiksa tidak ditemukan indikasi melakukan kegiatan destructive fishing dan tidak adanya dugaan pelanggaran.

**d. Pemeriksaan kepatuhan usaha wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan ruang laut**

Pada Triwulan IV tahun 2023 Pemeriksaan kepatuhan usaha wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan ruang laut sebanyak 9 pelaku usaha. Dimana pelaku usaha tersebut dapat digambarkan pada tabel berikut;

Tabel 16. Rekapitulasi Pengawasan Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Ruang Laut yang Diperiksa Kepatuhannya Triwulan IV tahun 2023

No	Pelaku Usaha	Alamat	Waktu Pengawasan	Hasil Pengawasan
1	PT. Energi Unggul Persada	Jalan Raya Sungai Limau, Ds. Sungai Limau, Kec. Sungai Kunyit, Kab. Mempawah, KALBAR	13-14 Januari 2023	Berdasarkan hasil pengambilan foto udara dan analisis tumpang susun dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Barat kawasan pipa penyalur minyak sawit pada PT. EUP tidak masuk kedalam zona konservasi Pulau Temaju dan akan diurus PKKPRL
2	PT. Randayan Hartadika Abadi	Pulau Randayan, Kalimantan Barat pada titik koordinat 0° 42' 50" N; 108° 43' 44" E	13 - 17 Maret 2023	<p>Randayan island resort memiliki bangunan yang memanfaatkan ruang laut berupa 2 buah dermaga yang difungsikan sebagai tempat sandar kapal yang digunakan untuk mengantarkan tamu/wisatawan, selain itu juga terdapat breakwater yang masuk kedalam lokasi pemanfaatan ruang laut. • Potensi pemanfaatan ruang laut yang digunakan oleh Randayan Island Resort tersebut sebesar 0.92 Ha yang memuat bangunan laut berupa 2 buah dermaga dan breakwater. Luasan tersebut terbentuk dari titik-titik yang saling menghubungkan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1.Dermaga 1. 0,12 Ha</li> <li>Dermaga 2 .0,54 Ha</li> <li>2.Breakwater 0,26 Ha</li> <li>Jumlah 0.92 Ha</li> </ul>
3	PT. Sinar Sakti Sahabat Sejati Jaya	Pulau Penata besar, Desa Sungai Raya, Kecamatahn Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat pada titik koordinat 0° 45' 29" N; 108° 46' 16" E	13 - 17 Maret 2023	<p>Segera mengajukan permohonan izin PKKPRL dan POLSUS PWP3K Bersama BPSPL telah melakukan pengukuran luasan serta letak koordinat yang dimanfaatkan untuk diajukan di dalam permohonan dengan menggunakan drown sesuai kondisi di lapangan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemanfaatan yang dilakukan oleh PT. Sinar Sakti Sahabat Sejati Jaya di Pulau Penata Besar meliputi bangunan laut berupa Rumah Jaga yang difungsikan sebagai sarana tambat labuh kapal untuk operasional kegiatan budidaya, serta long line sebagai media budidaya Kerang Mutiara dan rakit apung sebagai sarana penujang. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan identifikasi menggunakan pengambilan foto udara dan tagging lokasi pemanfaatan melalui tracking longline dengan nilai buffer antara titik terluar longline sebesar 10 Meter.</li> <li>• Luasan Pemanfaatan Ruang Laut berdasarkan hasil identifikasi adalah sebagai berikut:</li> </ul>

				1 Rumah Jaga 0,01 Ha 2 Longline 22,89 Ha Jumlah 22,90 Ha
4	CV. Borneo Mutiara	Perairan Laut Natuna, Pulau Lemukutan, Kalimantan Barat pada titik koordinat 0° 46' 21" N; 108° 42' 50" E	13 - 17 Maret 2023	<p>"CV. Borneo Mutiara memiliki indikasi kepatuhan dengan langkah yang sesuai dengan sosialisasi yang telah diterimanya dari BPSPL Pontianak yaitu segera mengajukan permohonan izin PKKPRL pada tanggal 6 Mei 2023 dan POLSUS PWP3K telah mengecek kesesuaian luasan serta letak koordinat yang diajukan di dalam permohonan dengan kondisi di lapangan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>CV. Borneo Mutiara beralamat kantor di Sukomanunggal Indah 2-A, Kel.Sukomanunggal, Kec. Sukomanunggal, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, yang dipimpin oleh Wanto Sukendy. CV. Borneo Mutiara melakukan kegiatan budidaya Kerang Mutiara menggunakan metode longline sebanyak 22 unit dengan fasilitas penunjang berupa Dermaga dengan ukuran 25 x 1,2 m sebanyak 1 buah, Rakit Kerja sebanyak 2 unit dengan ukuran 4m x 8m, keramba jaring apung sebanyak 2 unit, serta bangunan kerja sebanyak 1 unit.</li> <li>Luasan Pemanfaatan Ruang Laut berdasarkan hasil identifikasi adalah sebagai berikut:</li> </ul> <p>No Jenis Pemanfaatan Luasan (Ha)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Longline 23,10</li> <li>2. Keramba Jaring Apung 0,04</li> <li>3. Rumah Kerja 0,11</li> <li>4. Jetty 0,001</li> </ol> <p>Jumlah 23.25"</p>
5	PT. Bima Budidaya Mutiara	Perairan Laut Natuna, Pulau Lemukutan, Kalimantan Barat pada titik koordinat 0° 44' 1" N; 108° 43' 47.2" E	17 Maret 2023	<p>PT. Bima Budidaya Mutiara di Lemukutan hingga saat ini hanya melakukan kegiatan usaha pembesaran tiram mutiara dengan penyuntikan nucleus sebagai bahan terbentuknya mutiara di dalam tubuh tiram dengan Persetujuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) No. 10022310516100002 dan telah dilakukan pengecekan kesesuaian antara izin tertulis dan kondisi lapangan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Luas = 5,31 Ha</li> <li>2. Koordinat pemanfaatan ruang Laut telah sesuai dengan yang tertuang di dalam peta PKKPRL;</li> </ol>

6	KKPRL Rumah Makan Pantai Indah Kakap.	Dusun Nirwana RT/RW 04/001 Desa Sungai Kakap, Kec. Sungai Kakap Kab. Kubu Raya, Prov. Kalimantan Barat	30 Mei 2023	Perizinan dimiliki oleh berupa izin usaha, izin lingkungan, Izin Lokasi (darat) dan sertifikat laik fungsi dengan Nomor Induk Berusaha yaitu 9120003940174  Pelaku usaha belum menginput permohonan perizinan KKPRL pada OSS
7	Rumah Makan Teratai Indah	Jl. Raya Sungai Kakap, RT/RW 03/01, Kel Sungai Kakap, Kec. Sungai kakap, Kab. Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat.	30 Mei 2023	Berdasarkan koordinat yang dimohonkan didapatkan luasan kawasan sebesar 0.046425 Ha dengan potensi PNBP yang didapatkan sebesar Rp. 867.223, -  Pelaku usaha belum menginput permohonan perizinan KKPRL ke dalam OSS
8	Tangkahan Susanti/Ameng	di Jalan Benteng Laut RT/RW 001/001 Desa Sungai Kakap, Kec. Sungai Kakap Kab. Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat	30 Mei 2023	Luasan kawasan sebesar 0.017082 Ha dengan potensi PNBP yang didapatkan sebesar Rp. 319.088, -  Pelaku usaha menempati lokasi tersebut dengan status sewa dan dalam waktu dekat akan berpindah lokasi dengan status sewa kembali.
9	Tangkahan Stephanus	Jalan Benteng Laut RT/RW 001/001 Desa Sungai Kakap, Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat.	30 Mei 2023	Perizinan berupa izin operasional berusaha dan izin lingkungan dari Tangkahan  Stephanus pada proses wawancara didapatkan telah memiliki izin operasional berusaha dengan Nomor Izin Berusaha 8120003951502 dan izin lingkungan berupa Surat Pernyataan Persetujuan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kubu Raya Nomor 660.1/11/303/2020 tanggal 5 November 2020.  Pelaku usaha telah menginput permohonan KKPRL nya namun belum berhasil mendapatkan dokumen persetujuan.
10	Tangkahan Kinanto	Jl. Karya Jaya Dusun Nirwana, Kel. Sungai Kakap, Kec. Sungai Kakap, Kab. Kubu Raya, Provinsi	30 Mei 2023	Telah memiliki izin dengan Nomor Izin Berusaha 8120016240258 dan izin lingkungan berupa Surat Pernyataan Persetujuan Lingkungan Camat Sungai Kakap Nomor 640/04/Ekbang tanggal 30 April 2015.  Pelaku usaha telah menginput permohonan KKPRL nya namun belum

		Kalimantan Barat.		berhasil mendapatkan dokumen persetujuan.
11	PT. Borneo Alumindo Prima	Desa Pagar Mentimun , Kec. Matan  Hilir Selatan Kabupaten Ketapang,  Provinsi Kalimantan Barat	20/9/2023	PT. Borneo Alumindo Prima melakukan kegiatan reklamasi dalam pembangunan Tersus. PT. Borneo Alumindo Prima sedang melakukan pengurusan Surat Izin Kegiatan Reklamasi dan Surat Izin Kegiatan Keruk
12	CV. Arifqi Pasha	Jl. Hasanudin Gg. Seroja, Kel. Mendawai, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah.	22-24 Nov 2023	Pelaku usaha tidak melakukan kegiatan reklamasi dalam kegiatan usahanya dan ternyata hanya salah pengurusan Surat Izin Kegiatan Reklamasi yang telah keliru memasukan kode KBLI tentang Penyiapan lahan dengan Reklamasi tersebut, dan mereka juga telah mengkonfirmasi bahwa tidak ada rencana operasional perusahaan ke arah kegiatan Reklamasi.
13	CV. Anugrah kayya	Jalan Pak Benceng, Kota Villa B.16, Kel. Sungai Bangkong, Kota Pontianak	28-Dec-23	CV. Anugerah tidak melakukan kegiatan Aktifitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya YTDL (BMKT) dengan alasan sudah tutup
14	PT. BAHIRAH PERSADA INDONESIA	Jl. Tabrani Ahmad Komplek Borobudur No. A9, Kel. Sungai Jawi dalam, Kec. Pontianak Barat, Kota Pontianak	28-Dec-23	PT. Bahirah Persada Indonesia tidak melakukan kegiatan Aktifitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya YTDL (BMKT) sesuai dengan KBLI 74909, maupun kegiatan KBLI lainnya.
15	PT. SUNGAI KUNYIT JAYA/TEMAJO BAY RESORT	Jl. Gusti Sulung Lelanang, Kel.Pasir Kec.Mempawah Hilir Kab.Mempawah	8-10 Desember 2023	PT. Sungai Kunyit Jaya/Temajo Bay Resort dengan NIB 8120312231922 tidak ada mendirikan bangunan di atas air
16	PT. BAKTI KARYA MANDIRI	Jalan Dewi Sartika, No.168, Kecamatan Pontianak Selatan, KotaPontianak, Provinsi Kalimantan Barat	27-Dec-23	PT. Bhakti Karya Mandiri adalah perusahaan kontraktor yang fokus pada kegiatan konstruksi bangunan, jalan, terowongan, jaringan irigasi, jaringan elektrikal dan telekomunikasi lainnya dan kegiatan konstruksi lainnya

Pelaku usaha yang telah diperiksa berjumlah 16 pelaku usaha sampai bulan Desember 2023. Pelaku usaha yang berjumlah 16 ini telah memiliki dokumen perizinan peruntukan kegiatan usaha. Dari beberapa pelaku usaha atau badan usaha yang telah dilakukan oleh tim PSDKP Pontianak didapat beberapa yang belum mempunyai dokumen KKPRL dikarenakan KKPRL merupakan bentuk implementasi langsung dari Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diturunkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut. Lebih lanjut KKPRL merupakan persyaratan dasar perizinan berusaha berbasis risiko sesuai PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko “sehingga untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, para pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dasar perizinan berusaha dan/atau perizinan berusaha berbasis risiko. Pemanfaatan yang dilakukan oleh pelaku usaha dan atau badan usaha yang dikunjungi sudah sesuai dengan peruntukan ruang yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2038. Pendampingan ini dilakukan untuk mendorong para pelaku usaha atau badan usaha untuk segera melengkapi dokumen perizinan KKPRL.

Tabel 17. Perbandingan Target dan Capaian Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak

INDIKATOR KINERJA	2020		2021		2022		2023		2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	-	-
% Capaian	-		-		100		100		-	

Untuk mencapai indikator kinerja ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 286.152.000 dan sampai dengan 31 Desember 2023 telah terealisasi sebesar Rp 285.374.514 atau sebesar 99,73%. Adanya anggaran terdampak AA (Automatic Adjustment) yang semula anggaran sebesar Rp. 510.06400 menjadi Rp. 286.152.000 walaupun terdampak AA tidak menjadikan sesuatu yang menghambat dalam pencapaian indikator kinerja ini. Selain dukungan anggaran keberhasil dalam pencapaian IKU ini dikarenakan pemeriksaan jumlah pelaku

usaha dapat dilakukan dalam waktu yang bersamaan karena lokasi pengawasan yang berdekatan. Tercapainya target yang ditentukan tidak terlepas dari SDM pengawas perikanan dan Polsus PWP3K yang berada di Stasiun PSDKP Pontianak dan tersebar di tiap Satwas/Wilker lingkup Stasiun PSDKP Pontianak. Keberhasilan pencapaian target baik dikarenakan pada awal tahun 2023 dilakukan pertemuan koordinasi Satwat/Wilker lingkup Stasiun PSDKP Pontianak sebagai sinkronisasi dalam percepatan pelaksanaan kegiatan pengawasan. Kemudian setalah 3 bulan dilakukan monitoring dan evaluasi capaian kegiatan pengawasan dengan media daring lingkup Stasiun PSDKP Pontianak yang dikoordinir oleh pelaksana koordinasi OPPP Stasiun PSDKP Pontianak. Adanya komunikasi lewat whatapps yang tergabung dalam group pengawasan SDKP menjadikan kegiatan lebih efektif dan efesien. Jadi Sasaran Strategis dan Indikator kinerja ini dapat dikatakan berhasil dikarenakan telah mencapai target yang telah ditentukan. Telah dilaksanakan pengawasan pemanfaatan ruang laut dan pulau-pulau kecil ini merupakan suatu bentuk dukungan program ekonomi biru Kementerian Kelautan dan Perikanan.

## 7. Persentase Penyelesaian Pengumpulan Data dan Informasi Intelijen Kelautan (%)

Intelijen ialah kegiatan segala usaha, tindakan dan kegiatan yang diwujudkan dalam bentuk penyelidikan, pengamanan dan penggalangan Data dan informasi intelijen kelautan yaitu data dan informasi yang dikumpulkan oleh Polsus PWP3K atau pihak yang diberikan tugas oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas intelijen terhadap dugaan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan atau terkait isu yang memerlukan klarifikasi Penyelesaian pengumpulan data dan informasi intelijen kelautan yaitu data intelijen yang sudah dalam bentuk produk atau bahan keterangan yang sudah dikumpulkan atau diolah yang selanjutnya disampaikan kepada pimpinan sebagai bahan penyusunan rencana, kebijakan, dan pengambilan keputusan/ penindakan yang akan ditempuh dengan formula perhitungan sebagai berikut;

$$X_{\text{intl}} = \frac{a}{b} \times 100\%$$

Keterangan :

***X<sub>intl</sub>*** : Persentase Penyelesaian Pengumpulan Data dan Informasi Intelijen Kelautan

***a*** : jumlah data dan informasi intelijen kelautan yang selesai dikumpulkan

b : jumlah data dan informasi intelijen kelautan yang ditargetkan dikumpulkan

IKU Persentase Penyelesaian Pengumpulan Data dan Informasi Intelijen Kelautan Tahun 2023 ditargetkan sebesar 100%. Stasiun PSDKP Pontianak Sampai dengan bulan Desember tahun 2023 mencapai nilai 100% atau persentase capaian sebesar 100%. Capaian ini didapat dari jumlah data dan informasi intelijen kelautan yang selesai dikumpulkan sebanyak 2 kegiatan pulbaket dibagi dari jumlah data dan informasi intelijen kelautan yang ditargetkan dikumpulkan sebanyak 2 kegiatan. IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2022 karena merupakan IKU baru yang ada pada tahun 2023 dan juga tidak dapat dibandingkan dengan 5 tahun terakhir. IKU ini juga tidak bisa dibandingkan dengan dokumen Renstra karena baru ada pada tahun 2023. Rekapitulasi kegiatan pengumpulan data dan informasi intelijen kelautan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak dapat dijelaskan pada tabel berikut;

Tabel 18. Rekapitulasi kegiatan Intelijen Sumberdaya Kelautan Stasiun PSDKP Pontianak Tahun 2023

No	Waktu pelaksanaan	Lokasi	Pelaksana	Jenis kegiatan	Hasil kegiatan
1	24 dan 25 Juli 2023	Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat.	Melky Andrie, S.H Bonis Andrei Tri Saputra, S.St.Pi Lukman Hakim, S.Pi Dominikus	Pengawasan jenis ikan dilindungi	Kegiatan PULBAKET telah dilaksanakan dan berhasil menggagalkan penyelundupan telur penyu melalui Pelabuhan Penyeberangan Sintete, Kabupaten Sambas dengan bukti telur penyu berjumlah 6.266 butir dalam 8 kardus serta mengamankan tiga pelaku
2	9-14 Januari 2023	Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat.	Melky Andrie, S.H Bonis Andrei Tri Saputra, S.St.Pi Dominikus Maniamas Agung Satria Lukman Hakim, S.Pi Obbet	Penangkapan ikan yang merusak	Kegiatan PULBAKET telah dilaksanakan dengan bukti adanya kegiatan penangkapan ikan yang diduga menggunakan bahan peledak oleh nelayan di Ketapang khususnya Desa Sampit dan teridentifikasi diduga pelaku bernama Sdr. Itod serta kapal yang digunakan.

Indikator kinerja ini dapat tercapai didukung oleh anggaran yang melekat pada Pengawasan Sumberdaya Kelautan sebesar 286.152.000 dan sampai dengan 31 Desember 2023 telah terealisasi sebesar Rp 285.374.514 atau sebesar 99,73%. Selain itu secara teknis kegiatan ini telah mencapai target yang ditentukan

dikarenakan Tercapainya target yang ditentukan tidak terlepas dari SDM Polsus PWP3K yang berada di Stasiun PSDKP Pontianak dan tersebar di tiap Satwas/Wilker lingkup Stasiun PSDKP Pontianak sehingga dengan sebaran tersebut dapat menjangkau wilayah yang menjadi target dari pencarian data dan informasi intelijen kelautan. Salah satu yang menjadi indikator keberhasilan IKU ini adalah adanya laporan masyarakat kelautan dan perikanan yang kemudian secara cepat dan tanggap untuk dilakukan tindak lanjut baik itu berkoordinasi dengan pihak terkait maupun melakukan pengumpulan bahan dan keterangan langsung pada tempat yang diduga dari sumber adanya dugaan pelanggaran dibidang pengelolaan sumberdaya kelautan oleh Pokmaswas/Pokdarwis/Masyarakat Nelayan serta supervisi dan monitoring dari Direktorat PPSDK ke Stasiun Pontianak.

Tabel 19. Perbandingan Target dan Capaian Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak

INDIKATOR KINERJA	2020		2021		2022		2023		2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan	-	-	-	-			100%	100%	100%	100%
% Capaian							100	100		

#### 8. Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan (Nilai)

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha perikanan yang sesuai ketentuan” 1). Pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha bidang perikanan adalah upaya pengawasan usaha perikanan oleh Pengawas Perikanan dengan melakukan pemeriksaan kesesuaian kegiatan pelaku usaha perikanan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaporan hasil pengawasan 2). Pemeriksaan pelaku usaha perikanan meliputi pelaku usaha kapal perikanan (penangkapan dan/atau pengangkutan), pelaku usaha pembudidayaan ikan, pelaku usaha pengolahan ikan, pelaku usaha pemasaran dan distribusi hasil perikanan. 3). Nilai kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan merupakan penjumlahan dari nilai tahapan pemeriksaan untuk setiap pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan. Untuk formula perhitungan capaian adalah;

$$X_{sdp} = \sum_{i=1}^n \frac{(X_i + \dots + X_n)}{n}$$

Keterangan:

**X<sub>sdp</sub>** : Nilai kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan

**X<sub>i</sub>** : Nilai pemeriksaan terhadap komponen objek pengawasan sumber daya perikanan ke-i

**n** : Jumlah komponen objek pengawasan sumber daya perikanan yang diperiksa

Untuk penentuan nilai kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan mengacu pada tabel berikut ini:

Tabel 20. Nilai kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan

No.	Kegiatan	Nilai	Output
1.	Persiapan, meliputi :	10	Surat Tugas, Surat Pemberitahuan Kepada Pelaku Usaha, Daftar Pertanyaan
2.	Pelaksanaan pemeriksaan pelaku usaha	70	Hasil pengawasan, Form pengawasan dan/atau data dukung
3.	Penyusunan laporan hasil pengawasan ditembuskan kepada Direktur PPSDP	20	Laporan Pemeriksaan Pelaku Usaha
Jumlah Nilai		100	

Pada triwulan IV tahun 2023 capaian nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya Perikanan Stasiun PSDKP Pontianak sebesar 100 yang didapat dari pemenuhan Persiapan, meliputi : 1). Membuat jadwal pemeriksaan, berkoordinasi dengan pelaku usaha yang akan diperiksa, menyusun administrasi pemeriksaan dan/atau rapat persiapan pemeriksaan dengan bobot 10 .2). Pelaksanaan pemeriksaan pelaku usaha berupa Hasil pengawasan, Form pengawasan dan/atau data dukung dengan bobot 70 dan 3). Penyusunan laporan hasil pengawasan ditembuskan kepada Direktur PPSDP dengan bobot 20. IKU ini

telah mencapai target yang telah ditentukan yaitu sebesar 100. IKU ini apabila dibandingkan dengan tahun 2022 mengalami capaian yang sama yaitu 100 yang merujuk pada IKU Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak. IKU ini tidak bisa dibandingkan dengan 5 tahun terakhir karena merupakan IKU yang dimulai pada tahun 2022 revisi perjanjian Kinerja bulan September Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024. IKU ini juga tidak bisa dibandingkan dengan dokumen Renstra karena baru ada pada tahun 2022

Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan sampai tahun 2023 adalah 100 yang terbentuk dari hasil pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan subsektor pengolahan dan pemasaran ikan, Subsektor Pembudidayaan ikan dan Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan ikan dimana sampai dengan 31 desember 2023 telah dilakukan pengawasan sebanyak 117 lembaga. Rekapitulasi kegiatan pengawasan Sektor Sumber daya Perikanan dapat dijelaskan pada garfik berikut;



Grafik ... kegiatan pengawasan Sektor Sumber daya Perikanan tahun 2023

Melihat grafik diatas dapat dijelaskan bahwa pengawasan terbanyak pada subsektor Penangkapan dan Pengangkutan ikan dalam hal ini data diperoleh dari pemeriksaan kapal PIT/Pasca. Pengawasan subsektor pembudidayaan ikan terkesan besar padahal pada praktiknya pada satu kampung perikanan budidaya

dapat diperoleh data pengawasan yang banyak dikarenakan basis data Pemilik perorangan bukan kelompok dan untuk mendukung program prioritas KKP tahun 2023 pada program “Pembangunan Perikanan Budidaya Ramah Lingkungan”, pengawas perikanan Stasiun PSDKP Pontianak dalam melaksanakan pengawasan budidaya juga melaksanakan sosialisasi secara langsung kepada nelayan terkait budidaya ramah lingkungan dengan penggunaan obat ikan yang sesuai aturan dan cara mitigasi pencemaran budidaya dan Stasiun PSDKP Pontianak mendukung program “Penangkapan Ikan Terukur” telah melakukan sosialisasi secara langsung kepada nelayan di wilayah kerja PSDKP Pontianak dengan potensi perikanan tangkap yang besar yaitu di Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas dan Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, pelaksanaan kegiatan tersebut adalah untuk mendukung program ekonomi biru tahun 2023. Pengawasan subsektor pengolahan dan pemasaran tahun 2023 telah dilakukan pemeriksaan sebanyak 17 lembaga.

Untuk mencapai sasaran kegiatan ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 657.000.000 sebagai pagu awal kemudian adanya AA sehingga menjadi Rp. 339.930.000 dan sampai dengan 31 Desember 2023 telah terealisasi sebesar Rp. 339.805.515 atau dengan realisasi 99,96% dengan tingkat jumlah realisasi yang melebihi target yang sudah ditentukan. Capaian yang terlampaui dikarenakan pemeriksaan jumlah pelaku usaha dapat dilakukan dalam waktu yang bersamaan karena lokasi pengawasan yang berdekatan seperti pengawasan usaha budidaya ikan, distribusi perikanan, unit pengolahan ikan. Pengawasan kapal perikanan karena pengawasan terpusat pada pelabuhan perikanan juga tingginya kesadaran pelaku usaha untuk mengurus dokumen dalam usaha penangkapan ikan. Tercapainya target dan efisiensi tidak terlepas dari SDM pengawas perikanan yang berada di Stasiun PSDKP Pontianak dan tersebar di tiap Satwas/Wilker lingkup Stasiun PSDKP Pontianak. Selain hari kerja pengawas perikanan setiap hari Sabtu dan Minggu dilakukan piket pelayanan pada lingkup Stasiun PSDKP Pontianak. Selain itu keberhasilan pencapaian target dan efisiensi yang baik dikarenakan pada awal tahun 2023 dilakukan pertemuan koordinasi Satwat/Wilker lingkup Stasiun PSDKP Pontianak dalam percepatan pelaksanaan kegiatan pengawasan dan membahas perihal kegiatan teknis khususnya kegiatan pengawasan sumberdaya perikanan. Kemudian setalah 3 bulan dilakukan monitoring dan evaluasi capaian kegiatan pengawasan dengan media daring lingkup Stasiun PSDKP Pontianak yang dikoordinir oleh ketua Tim Kerja intelijen dan Pengawasan Sumberdaya Perikanan

Stasiun PSDKP Pontianak. Selain itu juga dibuat group kegiatan dan pelaporan pengawasan sektor perikanan via whatapps untuk memudahkan komunikasi antar Stasiun, Satwas dan Wilker terkait pencapaian pengawasan sumber daya perikanan. Dengan ini dapat dikatakan indikator kinerja ini telah berhasil pada Tahun 2023 dikarenakan telah mencapai target yang telah ditetapkan.

Tabel 21. Perbandingan Target dan Capaian Nilai Kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak

INDIKATOR KINERJA	2020		2021		2022		2023		2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Nilai Kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (nilai)	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	-	-
% Capaian	-		-		100		100		-	

#### 9. Persentase Penyelesaian Pengumpulan Data dan Informasi Intelijen Perikanan (%)

Intelijen ialah kegiatan segala usaha, tindakan dan kegiatan yang diwujudkan dalam bentuk penyelidikan, pengamanan dan penggalangan data dan informasi intelijen kelautan yaitu data dan informasi yang dikumpulkan oleh Pengawas perikanan atau pihak yang diberikan tugas oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas intelijen terhadap dugaan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan atau terkait isu yang memerlukan klarifikasi penyelesaian pengumpulan data dan informasi intelijen perikanan yaitu data intelijen yang sudah dalam bentuk produk atau bahan keterangan yang sudah dikumpulkan atau diolah yang selanjutnya disampaikan kepada pimpinan sebagai bahan penyusunan rencana, kebijakan, dan pengambilan keputusan/ penindakan yang akan ditempuh dengan formula perhitungan sebagai berikut;

$$X_{intl} = \frac{a}{b} \times 100\%$$

Keterangan :

- X<sub>intl</sub>*** : Persentase Penyelesaian Pengumpulan Data dan Informasi Intelijen Perikanan
- a*** : jumlah data dan informasi intelijen Perikanan yang selesai dikumpulkan
- b*** : jumlah data dan informasi intelijen Perikanan yang ditargetkan dikumpulkan

IKU Persentase Penyelesaian Pengumpulan Data dan Informasi Intelijen Perikanan Tahun 2023 ditargetkan sebesar 100%. Stasiun PSDKP Pontianak Sampai dengan 31 Desember tahun 2023 mencapai nilai 100% atau persentase capaian sebesar 100%. Capaian ini didapat dari jumlah data dan informasi intelijen perikanan yang selesai dikumpulkan sebanyak 5 kegiatan pulbaket dibagi dari jumlah data dan informasi intelijen kelautan yang ditargetkan dikumpulkan 5 kegiatan. IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2022 karena merupakan IKU baru yang ada pada tahun 2023 dan juga tidak dapat dibandingkan dengan 5 tahun terakhir. IKU ini juga tidak bisa dibandingkan dengan dokumen Renstra karena baru ada pada tahun 2023. Rekapitulasi kegiatan pengumpulan data dan informasi intelijen perikanan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak dapat dijelaskan pada tabel berikut;

Tabel 22. Rekapitulasi kegiatan Intelijen Sumberdaya Perikanan Stasiun PSDKP Pontianak Tahun 2023

No	Waktu pelaksanaan	Lokasi	Pelaksana	Jenis kegiatan	Hasil kegiatan
1	26 Januari 2023	Desa Teluk Bogam, Kota Waringin Barat, Kal-Teng	Suhartaya Alpiansyah Teguh Prakoso	Pengumpulan keteangan terkait nelayan luar Kal Teng yang diduga menggunakan trawl	Berdasarkan mapping pada aplikasi Sistem pengawasan Perikanan, ordinat tempat dugaan adanya pelanggaran/ TPP berada pada jarak 16 Mile yang bukan merupakan wilayah penangkapan ikan nelayan daerah Kalimantan tengah (lebih dari 12 mile). . Lokasi dugaan pelanggaran/ TPP bukan berada di Perairan Kalimantan tengah
2	19 JUNI 2023	Kecamatan Kumai Kab. Kota Waringin Barat	Suhartaya, S.Pi Muhammad Rawi, S.Pi Kurniawan Arida, S.Kel	Pengumpulan keteangan terkait pengolah hasil perikanan	Usaha pengolahan hasil perikanan PD jaya sakti telah dilengkapi Perizinan berusaha, SKP dan HACCP.

3	4/13/2023	Kabupaten Kubu Raya dan Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat	Koko Hardito, S.St.Pi Bonis Andrei Tri Saputra, S.St.Pi Sy. M. Iqbal Maulana Alkadrie, S.H Rahmat Hidayat, S.St.Pi	pengumpulan bahan keterangan terkait dugaan adanya kegiatan peredaran hasil perikanan menggunakan bahan baku ikan dari daerah luar Kalimantan Barat.	Kegiatan PULBAKET telah dilaksanakan dengan bukti adanya kegiatan peredaran hasil perikanan berasal dari Provinsi DKI. Jakarta berupa Frozen Fish Salem yang dilakukan oleh pelaku usaha Wahana Laut dan PT. Media Satwa Mandiri ke pasar domestik Kalimantan Barat
4	23-24 MEI 2023)	Desa Besiam Kecil Kecamatan Tamban Catur Kabupaten Kapuas	Suhartaya, S.PiMuhammad Rawi, S.PiHeru Triyarkara, S.PiTeguh Prakoso, S.Pi	adanya penangkapan ikan dengan setrum dan obat	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah bersama Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas akan melakukan kegiatan sosialisasi larangan penangkapan ikan secara Destructive kepada masyarakat. Stasiun PSDKP Pontianak membantu menyedian media sosialisasi larangan penangkapan ikan secara Destructive
5	30 - 31 Agustus 2023	Desa Kubu Kec. Kumai Kab. Kotawaringin Barat	Suhartaya, S.Pi Alpiansyah, S.Pi Teguh Prakoso, S.Pi	Pemeriksaan dan Pengambilan Keterangan Nahkoda Kapal KM. Karya Santi II	1. Kapal KM. Karya Santi II benar berada di perairan Kalimantan Tengah tepatnya di Desa Kubu Kec. Kumai Kab. Kotawaringin Barat. 2. KM. Karya Santi II di perairan Kalimantan Tengah melakukan aktivitas refloating kapal Citra Nabati 123 di Teluk Kumai. 3. KM. Karya Santi II tidak melakukan kegiatan perikanan selama berada di perairan Kalimantan Tengah, hal ini dibuktikan dengan hasil pemeriksaan muatan kapal yang isinya hanya peralatan untuk kegiatan refloating kapal yang tenggelam.

Indikator kinerja ini dapat tercapai didukung oleh anggaran yang melekat pada Pengawasan Sumberdaya Perikanan sebesar Rp. 339.930.000 dan sampai dengan 31 Desember 2023 telah terealisasi sebesar Rp 339.805.515 atau sebesar 99,96%. Selain itu secara teknis kegiatan ini telah mencapai target yang ditentukan dikarenakan tercapainya target yang ditentukan tidak terlepas dari SDM Pengawas Perikanan yang berada di Stasiun PSDKP Pontianak dan tersebar di tiap Satwas/Wilker lingkup Stasiun PSDKP Pontianak sehingga dengan sebaran

tersebut dapat menjangkau wilayah yang menjadi target dari pencarian data dan informasi intelijen perikanan. Salah satu juga yang menjadi penentu keberhasilan IKU ini adalah adanya keterlibatan masyarakat dalam hal memberikan laporan via whatsapp dan media sosial yang telah menjadi sebuah aduan atau laporan masyarakat kelautan dan perikanan. Kemudian dari laporan tersebut tadi secara cepat dan tanggap untuk dilakukan tindak lanjut baik itu berkoordinasi dengan pihak terkait maupun melakukan pengumpulan bahan dan keterangan secara langsung pada lokasi yang diduga dari sumber adanya dugaan pelanggaran dibidang pengelolaan sumberdaya perikanan dalam kegiatan pembinaan Pokmaswas dan Forum Konsultasi Publik.

Tabel 23. Perbandingan Target dan Capaian Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak

INDIKATOR KINERJA	2020		2021		2022		2023		2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan	-	-	-	-	-	-	100%	100%	-	-
% Capaian	-		-		-		100		-	

## 10. Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan (Indeks)

Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (KP) merupakan pengukuran kinerja atas pelaksanaan pengenaan sanksi administratif di bidang kelautan dan perikanan yang ditetapkan pertama kali oleh pejabat berwenang, pada:

- Dit. PP (Pusat) untuk pengenaan sanksi atas pelanggaran SPKP berupa Surat Peringatan-2 (SP2)/surat penetapan denda administratif/rekomendasi pencabutan/pembekuan izin;
- Dit. PP untuk pengenaan sanksi administratif pelanggaran perizinan berusaha di bidang kelautan dan perikanan, pemanfaatan ruang laut, importasi komoditas perikanan dan pergaraman, penangkapan ikan terukur dan pengelolaan hasil sedimentasi di laut untuk pelanggaran skala besar/mendapat perhatian publik, berupa surat peringatan (SP) atau paksaan pemerintah.

- c) Dit.PP (Pusat) untuk penetapan denda administratif, atau rekomendasi pembekuan/pencabutan izin/ pemulihan fungsi ruang dari Dirjen PSDKP.
- d) UPT PSDKP untuk pengenaan sanksi atas pelanggaran SPKP berupa Surat Peringatan-1 (SP1)/Paksaan Pemerintah;
- e) UPT PSDKP untuk pengenaan sanksi administratif pelanggaran perizinan berusaha di bidang kelautan dan perikanan, pemanfaatan ruang laut, importasi komoditas perikanan dan pergaraman, penangkapan ikan terukur dan pengelolaan hasil sedimentasi di laut berupa surat peringatan (SP) atau paksaan pemerintah. Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang KP dihitung berdasarkan rumus berikut :

Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang kelautan dan perikanan

$$x = \left( \frac{a}{b} \right) \times 100\%$$

- x : Indeks pengenaan sanksi administratif bidang KP
- a : Jumlah pengenaan sanksi administratif bidang KP berdasarkan penetapan pertama
- b : Jumlah keseluruhan kasus pelanggaran administratif yang ditangani berdasarkan hasil ekspose

- Perhitungan jumlah pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan untuk pencapaian indikator kinerja Dit. PP merupakan penjumlahan dari pengenaan sanksi administratif poin a, poin b, dan poin c.
- Perhitungan jumlah pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan untuk pencapaian indikator kinerja UPT PSDKP merupakan penjumlahan dari pengenaan sanksi administratif poin d dan poin e.
- Mempertimbangkan bahwa pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan bersifat kasuistik dan sangat dipengaruhi oleh eksternal, apabila tidak terjadi pelanggaran oleh pelaku usaha/pemanfaat sumber daya kelautan dan perikanan, maka target pengenaan sanksi administratif dianggap tercapai.

Sampai dengan 31 Desember 2023 Stasiun PSDKP Pontianak telah melakukan kegiatan pengenaan sanksi administratif sebanyak 12 perkara dengan yang berti bahwa capaian sebesar 100 dari target yang ditetapkan sebesar 80 atau persentase capaian sebesar 125%. IKU ini apabila dibandingkan dengan tahun 2022 lalu menacapai nilai yang sama yaitu 100 dengan merujuk pada indikator

kinerja Persentase Efektifitas Pengenaan Sanksi Administratif lingkup Stasiun PSDKP Pontiana dan IKU ini tidak bisa dibandingkan dengan capaian 5 Tahun terakhir. IKU ini juga tidak bisa dibandingkan dengan dokumen Renstra karena baru ada pada tahun 2022. Adapun pencapaian pengenaan saksi administratif lingkup Stasiun PSDKP Pontianak dapat dijelaskan pada tabel berikut,

Tabel 24. Rekapitulasi Penyelesaian Pengenaan sanksi administratif lingkup Stasiun PSDKP Pontianak

NO	UNIT USAHA	JENIS PELANGGARAN	Lokasi	Keterangan
1	Robi Septiadi	Melakukan Pengiriman produk perikanan berupa kulit Hiu dan Pari tanpa dilengkapi dengan Surat Rekomendasi dan dukungan Health Certificate (HC)	Ketapang	Peringatan / Teguran Tertulis
2	Albert	Pemanfaatan Jenis Ikan Yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan Yang Tercantum Dalam Appendiks CITES	Seruyan	Peringatan / Teguran Tertulis
3.	PT. Welindo Erabadi Lojaya	Belum melengkapi SKP (surat Keterangan Pengolahan	Pontianak	Peringatan ke II
4	KM. Arif Wijaya Sukses	Melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan ikan yakni melakukan Penangkapan Ikan dengan menggunakan kapal Perikanan KM. Arif Wijaya Sukses yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI Nomor : 33.22.0001.134.59046, masa berlaku sampai 27 Januari 2023	Pontianak	Denda Administrasi Rp. 63.466.400
5	PT. Global Vannamei Sejahtera dan PT Multi Artha Samudra	Menggunakan obat ikan yang tidak terdaftarr pada Permen KKP Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Obat Ikan	Mempawah	Peringatan / Teguran tertulis
6	KM. Karunia Ilahi V	Melakukan kegiatan pengangkutan ikan tanpa dilengkapi Surat Iaik Operasi (SLO) dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB)	Sambas	Peringatan / Teguran tertulis
7	PT. HF/ Tjhong Se Su	Melakukan kegiatan penerimaan komoditas perikanan impor yang tidak sesuai dengan peruntukannya yang ditetapkan dalam dokumen rencana kebutuhan impor, sebagaimana ketentuan Pasal 294 jo. PP no. 27 tahun 2021	Singkawang	Peringatan / Teguran Tertulis
8	PT. Mulia Satwa Mandiri		Pontianak	Peringatan / Teguran Tertulis
9	PT. Welindo Erabadi Lojaya		Sekadau	Peringatan / Teguran Tertulis
10	KM. Rupat Indah			Paksaan Pemerintah

11	KM. Pantai Indah	Pengangkatan BMKT tanpa dilengkapi dokumen yang Sah	Perairan Laut Sekitar Pulau Pengikik dan Perairan Laut Sekitar Pulau Tambelan, WPPNRI 711	Paksaan Pemerintah
12	KM. Calengkong Cantang			Paksaan Pemerintah

Keberhasilan IKU ini dikarenakan tidak terlepas dari kegiatan pengawasan yang dilakukan secara berkala atau terjadwal seperti pengawasan menggunakan sarana speed boat pengawasan sebanyak 5 unit yang tersebar di Satwas/Wilker dan pengawasan rutin kepada pelaku usaha seperti unit pengolahan ikan, distribusi dan pemasaran serta unit budidaya perikanan. Selain itu penyelesaikan kasus terkait pengenaan sanksi administratif oleh pengawas perikanan sebagai aparat penegak hukum yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penanganan perkara sesuai dengan waktu yang diinginkan. Koordinasi yang terjalin dengan direktorat penanganan pelanggaran bidang KP juga cukup membantu dan mendukung dalam pencaian IKU ini. Dukungan anggaran juga memberikan kontribusi yang signifikan. Untuk tahun 2023 telah dianggarkan sebesar Rp. 100.000.00 kemudian adanya revisi karena adanya ABT (Anggaran Biaya Tambahan) menjadi Rp. 207.561.000 sampai dengan bulan Desember telah realisasi sebesar Rp. 207.166.890 atau sebesar 99,81%. Indikator kinerja ini dapat dikatakan berhasil karena sudah mencapai target yang telah ditetapkan.

Tabel 25. Perbandingan Target dan Capaian Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak

INDIKATOR KINERJA	2020		2021		2022		2023		2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Capaian Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak	-	-	-	-	80	100	100	100	-	-
% Capaian	-		-		105		100		-	

## 11. Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Indeks)

Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan merupakan kinerja pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang terhadap orang/pelaku usaha yang berdasarkan hasil analisis sistem

pemantauan terdapat dugaan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. Pemeriksaan dilaksanakan oleh: a). Kepala UPT PSDKP dimana pelaku usaha berdomisili; b). Kepala UPT PSDKP dimana kegiatan berusaha dilaksanakan atau dimana pelaku usaha berdomisili; atau; c). Ditjen PSDKP Pusat (Dit PP) dalam hal pemeriksaan tidak memungkinkan dilaksanakan oleh Kepala UPT PSDKP sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, atau apabila pelanggaran melibatkan pelaku usaha skala besar/ menjadi perhatian publik. Formula perhitungan dapat dijelaskan adalah sebagai berikut:

$$X_{TLP} = \sum_{i=1}^n \frac{(x_n)}{n} \times 100\%$$

- $X_{TLP}$  : Indeks Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Sistem Pemantauan Kapal Pelaku Usaha KP  
 $x_n$  : Jumlah orang/pelaku usaha yang telah selesai diperiksa  
 $n$  : Jumlah dugaan pelanggaran berdasarkan hasil analisis sistem pemantauan

Stasiun PSDKP Pontianak pada tahun 2023 telah menangani kegiatan hasil analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebanyak 47 perkara diantaranya adalah dugaan pelanggaran jalur daerah penangkapan ikan sebanyak 24 perkara dan dugaan pelanggaran keaktifan transmitter sebanyak 23 perkara. Kepada pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran tersebut telah dilakukan pemanggilan dan dimintai keterangan dan dari hasil tersebut tertuang dalam berita acara pemeriksaan. Dari 47 perkara yang ditangani oleh Stasiun PSDKP Pontianak, 47 kasus perkara sudah sudah terselesaikan dan sudah terbit Berita Acara, sehingga didapat nilai realisasi sebesar 100 atau capaian sebesar 125% dari target tahun 2023 sebesar 80. IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2022 lalu dikarenakan merupakan IKU baru ditahun 2023 dan juga tidak dapat dibandingkan dengan capaian 5 tahun terakhir. IKU ini juga tidak bisa dibandingkan dengan dokumen Renstra karena baru ada pada tahun 2023. Rekapitulasi kegiatan hasil analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan tahun 2023 dapat dijelaskan pada tabel berikut;

Tabel.26 Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan lingkup stasiun PSDKP Pontianak tahun 2023

Perkara	Selesai diperiksa (xn)	Dugaan Pelanggaran (n)	Capaian (XTLP)
Jalur DPI	24	24	100
Tranmiter	23	23	
Jumlah	47	47	

Keberhasilan IKU ini dikarenakan tidak terlepas dari kegiatan penindakan atau tindak lanjut yang berupa pemanggilan dan pemeriksaan kepada pelaku usaha yang yang terduga melanggar sistem pemantauan kapal perikanan di WPPNRI 711 dan 712 dan kegiatan dilakukan pada Satwas yang terdekat terduga melakukan pelanggaran. Adanya informasi dan distribusi data dari sistem pemantauan kapal perikanan direktorat POA yang secara cepat distribusinya ke UPT Stasiun PSDKP Pontianak sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sesuai jadwal. Keberadaan pengawas perikanan dan PPNS perikanan yang tersebar di satwas dan wilker lingkup stasiun PSDKP Pontianak menjadikan kegiatan tindak lanjut dapat dilaksanakan dengan baik dan telah dilakukan pelaksanaan monitoring oleh Direktorat PP dan Direktorat PPSDP serta Direktorat PPSDK

Tabel 27. Perbandingan Target dan Capaian Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak

INDIKATOR KINERJA	2020		2021		2022		2023		2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak	-	-	-	-	-	-	80	100	-	-
% Capaian	-		-		-		125		-	

## 12. Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Pengenaan Sanksi Administratif (Indeks)

Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Pengenaan Sanksi Administratif yaitu merupakan tingkat pencapaian kinerja MONEV pengenaan sanksi administratif oleh UPT Stasiun PSDKP Pontianak. Adapun untuk perhitungan dengan meremuskan formula sebagai berikut;

$$P = \frac{\sum_{i=1}^n (ACTi + \dots + ACTn)}{n} \times 100\%$$

Keterangan:

- P = Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Pengenaan Sanksi Administratif  
 ACT = Jumlah nilai tahapan Monev pengenaan sanksi administratif (Tahapan sebagaimana Tabel)  
 N = Jumlah pelaksanaan MONEV pengenaan sanksi administrative

Tabel 28. Nilai tahapan penyelesaian Tindak Lanjut Pengenaan Sanksi Administratif stasiun

NO	TAHAP PENYELESAIAN	NILAI TAHAPAN	DATA DUKUNG DIPERLUKAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persiapan	20	Laporan Pengenaan Pelanggaran Sanksi Administratif	
2	Analisis pemilihan lokasi MONEV	20	Dokumen Rencana Pelaksanaan MONEV	ST/Memo/Rencana Kegiatan Disposisi /Dokumen Lainnya
3	Pelaksanaan koordinasi, Supervisi/MONEV	55	Dokumentasi pelaksanaan	
4	Penyusunan laporan Supervisi/MONEV	5	Laporan pelaksanaan MONEV	
<b>JUMLAH</b>		<b>100</b>		

Stasiun PSDKP Pontianak pada tahun 2023 telah melakukan monev sanksi administratif terhadap 12 perkara yang ditangani. Kegiatan supervise atau monev telah dilakukan 2 kali diantaranya adalah 1). Kegiatan monev kegiatan dan anggaan yang dilaksanakan di Dayang Resort Kota Singkawang pada tanggal 19-21 Desember 2023; 2). Kegiatan monitoring dan Evaluasi Penanganan pelanggaran (Sanksi Administrasi Dan Sanksi Pidana) di Satwas Sambas, Kabupaten Sambas tanggal 28-29 Desember 2023. Dari 2 kegiatan monev tersebut didapat hasil perhitungan yaitu tahapan persiapan berupa Laporan Pengenaan Pelanggaran Sanksi Administratif dengan bobot nilai 20. Tahapan Analisis pemilihan lokasi MONEV berupa Dokumen Rencana Pelaksanaan MONEV seperti telah terbitnya ST/Memo/Rencana Kegiatan Disposisi /Dokumen Lainnya dengan bobot nilai 20. Tahapan Pelaksanaan koordinasi, Supervisi/MONEV berupa Dokumentasi pelaksanaan dengan bobot nilai 55 dan Tahapan Penyusunan laporan

Supervisi/MONEV dengan bobot 5 sehingga didapat nilai realisasi sebesar 100 atau capaian sebesar 125% dari target tahun 2023 sebesar 80. IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2022 lalu dikarenakan merupakan IKU baru ditahun 2023 dan juga tidak dapat dibandingkan dengan capaian 5 tahun terakhir. IKU ini juga tidak bisa dibandingkan dengan dokumen Renstra karena baru ada pada tahun 2023.

Dukungan anggaran juga memberikan kontribusi yang signifikan. Untuk tahun 2023 telah dianggarkan sebesar Rp. 70.706.000 kemudian sampai dengan bulan Desember telah realisasi sebesar Rp. 70,674,150 atau sebesar 99,95%. Indikator kinerja ini dapat dikatakan berhasil karena sudah mencapai target yang telah ditetapkan. Keberhasilan dalam pencapaian IKU ini dikarenakan kegiatan yang sudah dijadwalkan pada awal tahun waktu pada saat pertemuan koordinator satwas/wilker di Pontianak bulan Februari 2023 dapat dilaksanakan pada akhir tahun mengingat dalam hal ini mempertimbangkan jumlah kasus penanganan sanksi administratif. Kinerja para pengawas perikanan dan PPNS perikanan yang secara cepat dan tanggap dalam penanganan sanksi administratif sehingga putusan pengenaan sanksi sesuai jadwal, sehingga mempermudah dalam hal perencanaan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Kesiapan para coordinator satwas/wilker dalam mengikuti kegiatan monev juga memberikan sumbangsih yang positif dimana para koordinator lebih paham data dan informasi pelaku sanksi administratif dan paham akan kondisi wilayah masing-masing yang diawasi.

Tabel 29. Perbandingan Target dan Capaian IndeksPenyelesaian Tindak Lanjut Pengenaan Sanksi Administratif lingkup Stasiun PSDKP Pontianak

INDIKATOR KINERJA	2020		2021		2022		2023		2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
IndeksPenyelesaian Tindak Lanjut Pengenaan Sanksi Administratif lingkup Stasiun PSDKP Pontianak	-	-	-	-	-	-	80	100	-	-
% Capaian	-		-		-		125		-	

### 13. Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (indeks)

Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan dapat dikategorikan selesai apabila berkas telah dinyatakan lengkap oleh JPU (P21), serta barang bukti dan tersangka dilimpahkan ke JPU (Penyerahan Tahap II). Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang dihitung berdasarkan rumus berikut:

Indeks Penyelesaian Penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan

$$(xa) = \left( \frac{a}{\Sigma b} \right) \times 100\%$$

xa = Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan

a = Jumlah kasus ditahun berjalan yang telah selesai ditangani dari diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan sampai dengan selesai (P-21 dan/atau penyerahan tahap II ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) atau Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan)(SP-3)

$\Sigma b$  = Total kasus yang dilakukan proses penyidikan pada tahun berjalan

Apabila sudah ditetapkan target capaian pertriwulan penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan dan tidak ada capaian kasus di periode tersebut, maka realisasi capaian sebesar target yang telah ditetapkan. - Apabila terdapat kasus yang di biayai oleh unit satker pusat, maka perhitungan capaian kinerja di klaim sebagai capaian unit kerja yang mebiayai dengan catatan di dalam SPRINDIK terdapat PPNS Pusat dalam pelaksanaan penyidikan.

Pencapaian nilai penyelesaian penyidikan TPKP lingkup Stasiun PSDKP Pontianak diukur dengan membandingkan jumlah kasus ditahun berjalan yang telah selesai ditangani dari diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan sampai dengan selesai (P-21 dan/atau penyerahan tahap II ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) atau Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan)(SP-3) atau sudah mempunyai putusan dengan jumlah kasus yang ditangani 3 perkara yang sudah ingkrah dibagi dengan total kasus yang dilakukan proses penyidikan pada tahun berjalan yaitu sebanyak 5 perkara, sehingga didapat nilai realisasi sebesar 100 atau capaian sebesar 107,53 dari target tahun 2023 sebesar 93% .

Tabel 30. Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak

No	KASUS	REFERENSI NILAI BERDASARKAN TAHAPAN	NILAI	RATA-RATA
1	Alan Bin Uldi	inkracht	100	100
2	Sulaiman	inkracht	100	
3	Toni	inkracht	100	

Capaian pada IKU “Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak” apabila dibandingkan dengan capaian IKU pada tahun 2022 merujuk pada IKU “Persentase Penyelesaian penyidikan TPKP lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%)" dengan capaian yang sama yaitu pada tahun 2022 sebesar 100%. IKU ini merupakan IKU yang ada di 2023 revisi perjanjian Kinerja September 2023 sehingga tidak bisa dibandingkan dengan pencapaian IKU 5 tahun terakhir. IKU ini juga tidak bisa dibandingkan dengan dokumen Renstra karena baru ada pada tahun 2022.

Capaian yang telah dicapai Stasiun PSDKP Pontianak dikarenakan tidak lain merupakan bentuk dari hubungan yang baik antara Stasiun PSDKP Pontianak dengan penegakan hukum terkait seperti Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Kejaksaan Negeri Pontianak dan *stakeholder* lainnya seperti Saksi Ahli, Juru Bahasa dan lainnya sehingga proses dari penyidikan tersebut selesai dengan waktu yang ditentukan. Adapun Stasiun PSDKP Pontianak tahun 2023 mendapat pagu sebesar Rp. 256.200.000 untuk penyidikan TPKP kemudian adanya revisi AA menjadi Rp. 97.419.000 sampai dengan 31 Desember 2023 realisasi anggaran sebesar Rp. 97,365,500 atau sebesar 99,95%. Pada tahun 2023, sebanyak 3 kasus sudah *inkracht* dengan capaian 100 sehingga dikategorikan indikator kinerja ini berhasil dikarenakan telah melampaui target yang ditetapkan yaitu 93. Program-program yang mendukung tercapainya IKU ini yaitu Stasiun PSDKP Pontianak pada tahun 2023 melakukan forum tindak pidana kelautan dan perikanan lingkup Kalimantan Barat dengan mengundang *stakeholder* terkait aparat penegak hukum sehingga terjalinnya hubungan kerja antar instansi yang memperkuat koordinasi serta menyamakan persepsi tentang penegakan hukum dibidang perikanan dan kelautan.

Tabel 31. Perbandingan Target dan Capaian Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak

INDIKATOR KINERJA	2020		2021		2022		2023		2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
							93	100	193	100
Indeks Penyelesaian Penyidikan TPKP lingkup Stasiun PSDKP Pontianak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
% Capaian	-		-		108		108		-	

#### 14. Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (Indeks)

Pemenuhan Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan pada Triwulan IV Tahun 2023 terealisasi sebesar 91,03 dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2023 yaitu sebesar 80 atau dengan presentase capaian 113,78%. Indikator kinerja tersebut merupakan indikator kinerja yang ditetapkan berdasarkan Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024. Indikator kinerja ini apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2022 pada periode yang sama mengalami keanaikan dimana capaian pada Triwulan IV Tahun 2022 yaitu sebesar 90,67 atau persentase sebesar 113,33%. Jika dibandingkan dengan tahun 2020 dengan nilai 89,12, 2021 dengan nilai 91,91 dan tahun 2022 dengan nilai 90,67 dan target yang sama yaitu 80, maka IKU ini mengalami kenaikan setiap tahunnya. IKU tidak dapat dibandingkan dengan 5 tahun terakhir karena ini merupakan IKU baru dimulai pada tahun 2020. IKU jika dibandingkan dengan dokumen Renstra maka mengalami kenaikan, karena di Renstra 2020-2024 dengan target sebesar 80. Maka dengan ini dapat dikatakan bahwa indikator kinerja ini berhasil dikarenakan realisasi telah melebihi dari target yang sudah ditetapkan. Pencapaian indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan merupakan kegiatan pengumpulan data dan informasi terkait pelayanan yang ada di Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak yaitu SLO (Surat Laik Operasi). Metode yang digunakan dalam pengumpulan data tersebut adalah dengan cara survei. Survei kepuasan masyarakat dilakukan setiap Triwulan atau setahun sebanyak 4 kali dengan ini indikator kinerja dapat dikatakan berhasil dikarenakan telah melampaui target.

Keberhasilan indikator kinerja ini dikarenakan langkah Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan telah memanfaatkan kanal-kanal yang telah ada

baik melalui kotak pengaduan yang telah ada di masing masing kantor layanan di setiap Satwas dan Wilker PSDKP, mensosialisasikan nomor kontak pengaduan yang bisa dihubungi baik via telepon, sms maupun WhatsApp, yang bisa dimanfaatkan oleh penerima layanan dalam menyampaikan aduan, saran, dan masukan melalui website: lapor.go.id dan kkp.go.id/djpsdkp/stasiunpontianak. Respon dalam penanganan aduan, saran, dan masukan juga dipercepat dengan telah membentuk tim khusus dalam penanganan aduan, saran, dan masukan. Pemberian pelatihan/bimbingan teknis kepada petugas pelayanan telah berpengaruh baik dan dirasakan oleh pengguna layanan. Hal ini disebabkan oleh petugas pelayanan telah menerapkan Budaya Pelayanan 7S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun, Sigap dan Syukur) dan menerapkan Motto Pelayanan MANTAP (Mudah, Akuntabel, Nyaman, Transparant, Adil, Profesional pada saat melakukan pelayanan kepada pengguna layanan Pelayanan di lingkup Stasiun PSDKP Pontianak. Pelayanan selama ini yang telah berjalan adalah 24 jam dalam sehari dan 7 hari dalam sepekan atau nonstop setiap hari sehingga sewaktu-waktu nelayan atau pengusaha membutuhkan SLO dapat dilayani langsung oleh petugas yang ada di setiap kantor layanan. Hal tersebut termasuk pengejawantahan standar pelayanan yang telah disepakati oleh penyedia layanan (Stasiun PSDKP Pontianak) dengan pemanfaat layanan (Pelaku Usaha) bahwa Standar Pelayanan SLO adalah 90 menit Sistem, Mekanisme, dan Prosedur sudah ditetapkan oleh Stasiun PSDKP Pontianak dalam bentuk SOP yang telah disosialisasikan dan ditempel di setiap kantor layanan di setiap Satwas dan Wilker PSDKP. Pengguna layanan akan terus diberikan pemahaman bahwa petugas pelayanan publik selama ini dalam menjalankan tugasnya telah menerapkan Sistem, Mekanisme, dan Prosedur yang sudah ditetapkan di setiap kantor pelayanan telah tersedia sarana dan prasarana yang mendukung sebagai standar minimal kantor layanan seperti kursi, meja, perangkat komputer dan alat tulis kantor penunjang, alat peraga dan papan informasi, ruangan yang nyaman dan toilet yang bersih. Stasiun PSDKP Pontianak akan tetap terus meningkatkan sarana dan prasarana di seluruh wilayah Satwas dan Wilker lingkup Stasiun PSDKP Pontianak.



Gambar 5. Capaian SKM SLO (Surat Laik Operasi)

Tabel 32. Perbandingan Target dan Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak

INDIKATOR KINERJA	2020		2021		2022		2023		2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak	80	89,12	80	91,91	80	90,67	80	91,03	80	91,03
% Capaian	111		115		113,33		113,78		113,78	

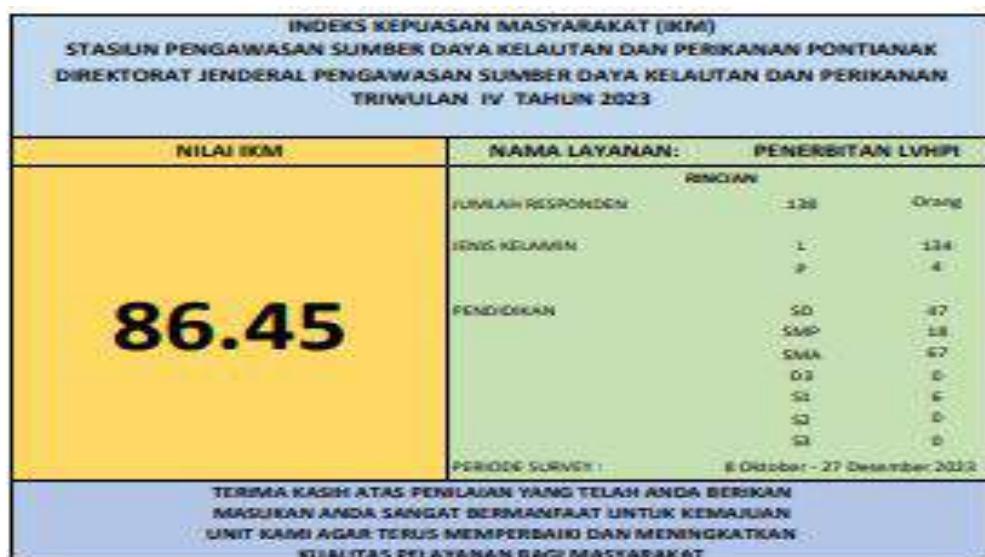
### 15. Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) lingkup Stasiun PSDKP Pontianak

Pemenuhan Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) lingkup Stasiun PSDKP Pontianak pada Triwulan IV Tahun 2023 terealisasi sebesar 86,45 dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2023 yaitu sebesar 80 atau dengan presentase capaian 108,06%. Indikator kinerja tersebut merupakan indikator kinerja yang ditetapkan berdasarkan Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024. Indikator kinerja ini mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2022 pada periode yang sama yakni sebesar 91,03 atau dengan persentase 113,78%, dan jika dibandingkan dengan capaian 2021 maka mengalami penurunan nilai, pada tahun

2021 realisasi 91,57, karena ini dapat disebabkan oleh masa transisi atau rencana pelaksanaan program Penangkapan Ikan Terukur. Indikator kinerja ini juga tidak bisa dibandingkan dengan capaian 5 tahun terakhir karena merupakan indikator kinerja baru yang dimulai pada tahun 2021. IKU ini juga tidak bisa dibandingkan dengan dokumen Renstra karena baru ada pada tahun 2021. Maka dengan ini dapat dikatakan bahwa indikator kinerja ini berhasil dikarenakan realisasi telat melebihi dari target yang sudah ditentukan yaitu sebesar 80. Pencapaian tersebut dapat dilihat pada Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) lingkup Stasiun PSDKP Pontianak yang merupakan kegiatan pengumpulan data dan informasi terkait pelayanan yang ada di Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak yaitu LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan). Metode yang digunakan dalam pengumpulan data tersebut adalah dengan cara survei. Survei kepuasan masyarakat dilakukan setiap triwulan atau setahun sebanyak 4 kali dengan ini indikator kinerja dapat dikatakan berhasil dikarenakan telah melampaui target.

Keberhasilan indikator kinerja ini dikarenakan langkah Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan telah memanfaatkan kanal-kanal yang telah ada baik melalui kotak pengaduan yang telah ada di masing masing kantor layanan di setiap Satwas dan Wilker PSDKP, mensosialisasikan nomor kontak pengaduan yang bisa dihubungi baik via telepon, sms maupun WhatsApp, yang bisa dimanfaatkan oleh penerima layanan dalam menyampaikan aduan, saran, dan masukan melalui website: lapor.go.id; dan kkp.go.id/djpsdkp/stasiunpontianak. Respon dalam penanganan aduan, saran, dan masukan juga dipercepat dengan telah membentuk tim khusus dalam penanganan aduan, saran, dan masukan. Pemberian pelatihan/bimbingan teknis kepada petugas pelayanan telah berpengaruh baik dan dirasakan oleh pengguna layanan, hal ini juga disebabkan oleh petugas pelayanan telah menerapkan Budaya Pelayanan 7S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun, Sigap dan Syukur) dan menerapkan Motto Pelayanan MANTAP (Mudah, Akuntabel, Nyaman, Transparant, Adil, Profesional pada saat melakukan pelayanan kepada pengguna layanan Pelayanan di lingkup Stasiun PSDKP Pontianak. Pelayanan Selama ini yang telah berjalan adalah 24 jam dalam sehari dan 7 hari dalam sepekan atau nonstop setiap hari sehingga sewaktu-waktu nelayan atau pengusaha membutuhkan SLO dapat dilayani langsung oleh petugas yang ada disetiap kantor layanan. Hal tersebut termasuk pengejawantahan standar pelayanan yang telah disepakati oleh penyedia layanan (Stasiun PSDKP Pontianak)

dengan pemanfaat layanan (Pelaku Usaha) bahwa Standar Pelayanan LVHPI adalah 75 menit, Mekanisme, dan Prosedur sudah ditetapkan oleh Stasiun PSDKP Pontianak dalam bentuk SOP yang telah disosialisasikan dan ditempel di setiap kantor layanan di setiap Satwas dan Wilker PSDKP. Pengguna layanan akan terus diberikan pemahaman bahwa petugas pelayanan publik selama ini dalam menjalankan tugasnya telah menerapkan Sistem, Mekanisme, dan Prosedur yang sudah ditetapkan disetiap kantor pelayanan telah tersedia sarana dan prasarana



yang mendukung sebagai standar minimal kantor layanan seperti kursi, meja, perangkat komputer dan alat tulis kantor penunjang, alat peraga dan papan informasi, ruangan yang nyaman dan toilet yang bersih.

Gambar 6. Capaian SKM LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan)

Tabel 33. Perbandingan Target dan Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) lingkup Stasiun PSDKP Pontianak

INDIKATOR KINERJA	2020		2021		2022		2023		2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) lingkup Stasiun PSDKP Pontianak	-	-	80	92,57	80	91,03	80	86,45	-	-
% Capaian	-		115		114		108,06		-	

**16. Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (nilai)**

Komponen penilaian Wilayah Bebas Korupsi (WBK) meliputi manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja sesuai dengan PERMEN PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PERMEN PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah dan jika dinilai melalui penilaian mandiri berdasarkan Permen KP Nomor: 62/PERMEN-KP/2017 Tentang Pedoman Pembangunan dan Penetapan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kriteria: 1). Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit adalah 40; 2). Bobot nilai per area pengungkit minimal 60% untuk semua area pengungkit; 3). Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN” minimal 18,50, dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13,5 dan sub komponen Persentasi TLHP minimal 5,0. 4). Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat” minimal 15). Penilaian WBK Stasiun PSDKP Pontianak telah dilakukan pada tahun 2021 dan telah mendapatkan predikat WBK.

Tim Inspektorat V telah melakukan kegiatan penilaian pada tanggal 20 sampai dengan 24 Juni 2023. Nilai yang dicapai Triwulan IV tahun 2023, Hasil pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan ZI tersebut diperoleh nilai sebesar 82,67 atau dengan persentase sebesar 110,22%. Nilai ini terdiri dari nilai Komponen Pengungkit sebesar 46,83 dan Komponen Hasil sebesar 35,84. Dari hasil penilaian tersebut, seluruh area perubahan telah memenuhi syarat ambang batas minimal 60%. Capaian ini telah melampaui target yang diinginkan yaitu sebesar 75%. Capaian IKU ini apabila dibandingkan dengan 2022 lalu mengalami penurunan dimana tahun 2022 lalu mencapai nilai sebesar 83,31 atau dengan persentase 111,08%. Karena merupakan indikator kinerja baru yang dimulai pada tahun 2022 Indikator kinerja ini juga tidak bisa dibandingkan dengan capaian 5 tahun terakhir. IKU ini juga tidak bisa dibandingkan dengan dokumen Renstra karena baru ada pada tahun 2022. Indikator kinerja tersebut merupakan indikator kinerja yang ditetapkan berdasarkan Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024. Hasil perolehan penilaian WBK satasiun PSDKP dapat dijelaskan sebagai berikut;

Tabel 34. Capaian Nilai WBK lingkup Stasiun PSDKP Pontianak

Area Perubahan	Bobot	Pemenuhan	Reform	Nilai	%
<b>A PENGUNGKIT</b>	<b>60.00</b>				
1. MANAJEMEN PERUBAHAN	8.00	3.19	3.67	6.86	85.73%
2. PENATAAN TATALAKSANA	7.00	2.60	1.67	4.26	60.90%
3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM	10.00	3.62	3.50	7.12	71.23%
4. PENGUATAN AKUNTABILITAS	10.00	4.57	4.51	9.07	90.74%
5. PENGUATAN PENGAWASAN	15.00	5.11	5.63	10.73	71.55%
6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	10.00	4.82	3.96	8.78	87.83%
<b>TOTAL PENGUNGKIT</b>				<b>46.83</b>	<b>78.06%</b>
<b>B HASIL</b>	<b>40.00</b>				
<b>I. BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL</b>	<b>22.50</b>			<b>19.34</b>	<b>85.97%</b>
a Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal :	17.50			16.84	96.25%
b Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian	5.00			2.50	50.00%
<b>II. PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA</b>	<b>17.50</b>			<b>16.49</b>	<b>94.25%</b>
- Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei	17.50			16.49	94.25%
<b>TOTAL HASIL</b>				<b>35.84</b>	<b>89.59%</b>
<b>NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI</b>				<b>82.67</b>	

Keberhasil indikator nilai WBK Stasiun PSDKP Pontianak dikarenakan kegiatan yang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan dalam keseharian kegiatan kantor yang telah ditetapkan sesuai norma dan peraturan perundang-undangan. Selain itu profesional bekerja dengan tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi. Melaksanakan pekerjaan secara professional sesuai dengan indikator dan penetapan target kerja serta tujuan yang jelas tentu hal ini akan berdampak kepada pekerjaan yang tuntas dan memuaskan pihak pemangku kepentingan. Sinergi dilaksanakan dengan membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas. Dengan menciptakan hubungan baik dan harmonis dengan berbagai pihak terkait, dengan memiliki prasangka baik dan saling percaya serta saling menghormati, tentunya akan menciptakan hubungan kerja yang berkesinambungan dengan memudahkan dalam hal mencari solusi terhadap permasalahan yang timbul.

Selain itu pelayanan yang diharapkan adalah memberikan layanan yang memenuhi kepuasan kepada objek yang dilayani dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat dan aman. Dalam hal memberikan pelayanan yang mengacu kepada kepuasan masyarakat kelautan dan perikanan dengan memberikan pelayanan yang terbaik aktif dan cepat tanggap, tentunya hal ini akan menimbulkan rasa bekerja dengan ikhlas, untuk berbuat yang terbaik dan telah dilaksanakan monev dari Tim Setditjen PSDKP untuk mendukung keberhasilan

pencapaian IKU ini serta telah dilaksanakan Forum Konsultasi Publik di Kalimantan Barat.

Tabel 35. Perbandingan Target dan Capaian nilai WBK lingkup Stasiun PSDKP Pontianak

INDIKATOR KINERJA	2020		2021		2022		2023		2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Nilai WBK Stasiun PSDKP Pontianak	-	-	-	-	75	83,31	75	82,67	-	-
% Capaian	-		-		111		110,22		-	

#### 17. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%)

Pengendalian dengan pendekatan Manajemen Risiko dilakukan oleh Pimpinan satuan kerja sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pimpinan satuan kerja sebagai pemilik risiko melakukan pengendalian yang lebih memadai dengan pendekatan manajemen risiko untuk mencapai tujuan suatu aktivitas/kegiatan apabila kebijakan dan aktivitas/kegiatan yang diperkirakan tidak cukup hanya dengan pengendalian rutin. Pekerjaan yang perlu dilakukan pengendalian dengan Manajemen Risiko meliputi (i) rencana kebijakan yang berimplikasi pada timbulnya atau berpengaruh pada perubahan anggaran/kegiatan baru/struktur organisasi, (ii) aktivitas/kegiatan yang memiliki alokasi relatif besar sehingga memiliki risiko terjadi kesalahan/penyimpangan dan berdampak negatif pada secara material terhadap akuntabilitas keuangan dan kinerja, (iii) pengadaan barang/jasa yang memiliki tingkat kegagalan yang tinggi serta memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi yang dalam pelaksanaannya membutuhkan input dan atau melibatkan satuan kerja lain baik dari dalam maupun luar kementerian. Penilaian risiko dilakukan melalui Form Penilaian Risiko sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemantauan dan pengendalian Manajemen Risiko dilakukan melalui Form Pemantauan Risiko yang dilakukan setiap triwulan.

Formula perhitungan adalah sebagai berikut;

$$X = \frac{a}{b} \times 100$$

Keterangan:

X = Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko

a = Dokumen pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko yang dipenuhi

b = Jumlah dokumen Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko

Perhitungan capaian Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Pontianak sampai dengan 31 Desember tahun 2023 mengadopsi dari data yang diberikan oleh Eselon I yaitu dengan capaian Triwulan IV Tahun 2023 sebesar 100% mencapai dari target yang ditetapkan pada Triwulan IV tahun 2023 yaitu sebesar 100%. IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan Capaian pada tahun 2022 pada periode yang sama karena indikator kinerja ini merupakan inkator kinerja baru yang dimulai pada tahun 2023, indikator kinerja ini juga tidak bisa dibandingkan dengan 5 tahun terakhir. IKU ini juga tidak bisa dibandingkan dengan dokumen Renstra karena baru ada pada tahun 2023. Tercapainya indikator kinerja ini dikarenakan Stasiun PSDKP Pontianak telah Menyusun Laporan SPIP MR baik di triwulan I sampai dengan Triwulan IV tahun 2023 dan telah dilaporkan secara berjenjang dan tepat waktu. Pemantauan dan pengendalian Manajemen Risiko melalui Form Pemantauan Risiko yang dilakukan setiap triwulan. Penyusunan Dokumen Manajemen Resiko ditiap bidang juga telah dilakukan antara lain Manajen Resiko bagian Tata Usaha, Manajen resiko bagian sarana dan Prasarana dan manajemen resiko tata usaha. Selain itu pegawai ditiap-tiap bidang telah mengikuti workshop dalam penyusunan dokumen manajemen resiko dan telah mengikuti kegiatan asistensi rutin yang dilaksanakan Setditjen PSDKP. Dengan demikian indikator kinerja ini telah tercapai yang mana telah mencapai dari target yang telah ditentukan pada triwulan IV. Berikut Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko dengan hasil pada tabel berikut:

Tabel 36. Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Pontianak

No	Satuan Kerja	Rencana Pengendalian Risiko	Realisasi Pengendalian Risiko	Persentase Capaian IKU MR
1	Stasiun PSDKP Pontianak	23	23	100

Perbandingan Pencapaian Indikator Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Pontianak dapat disajikan pada tabel berikut;

Tabel 37. Perbandingan Target dan Capaian pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Pontianak

INDIKATOR KINERJA	2020		2021		2022		2023		2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Persentase Pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Pontianak	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-
% Capaian	-		-		-		100		-	

## 18. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Pontianak

Pengembangan SDM sebagai sumber daya pengawasan SDKP, menekankan manusia sebagai pelaku pengawasan yang memiliki etos kerja produktif, keterampilan, kreativitas, disiplin, profesionalisme, loyalitas serta memiliki kemampuan memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi maupun kemampuan manajemen. Hal ini harus terus dikembangkan baik secara kualitas maupun kuantitas guna keberhasilan pengawasan SDKP IKU yang digunakan adalah “indeks kompetensi dan integritas Stasiun PSDKP Pontianak” dimana capaian yang diperoleh melalui metode adopsi langsung dari atasan dengan target telah diseragamkan bagi seluruh Eselon I lingkup KKP yaitu sebesar 78. Pengukuran capaian indikator kinerja ini menggunakan 4 variabel, yaitu: 1) hasil assessment eselon IV lingkup Ditjen. PSDKP; 2) tingkat kehadiran pegawai melalui absensi memalui Presensi online 3) Capaian SKP; dan 4) LHKPN dan LHKASN. Pada Triwulan IV Tahun 2023 capaian IKU Indeks Profesionalitas ASN Stasiun PSDKP Pontianak sebesar 90,59 atau persentase capaian sebesar 116,14%. Pada Triwulan IV ini Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Pontianak telah melampaui target yang diinginkan

yaitu sebesar 78. Indikator kinerja ini apabila dibandingkan dengan capaian pada Triwulan IV tahun 2022 mengalami keanaikan dimana capaian pada Triwulan IV Tahun 2022 yaitu sebesar 80,99 atau persentase sebesar 105,18%. Indikator kinerja tersebut merupakan indikator kinerja yang ditetapkan berdasarkan Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024. Indikator kinerja ini hanya bisa dibandingkan sampai dengan 2020. Jika dibandingkan tahun 2021 maka capaian mengalami kenaikan karena realisasi 2021 sebesar 78,76 dan juga mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun 2020 realisasi sebesar 76,87. IKU ini jika dibandingkan dengan dokumen Renstra telah tercapai karena target pada Renstra sebesar 72.

No	Satuan Kinerja	Jumlah Pegawai yang dilibatkan	Kualifikasi Standar (KS)		Kinerjanya Standar (KS)		Kinerjanya Realisasi (KR)		Simpulan Standar (SS)		Tulisan	Keterangan
			IP	Asosiasi	IP	Asosiasi	IP	Asosiasi	IP	Asosiasi		
1	DEPARTEMEN PENGETAHUAN DAN KETENAGAKERJAAN	75	120	81,91	23,4	102,1	22,2	81,71	2,1	100%	80,71	MASUK TAHUN
2	DEPARTEMEN KINERJA DAN KINERJA	96	226	85,6%	93,2	94,5%	22,6	81,81	5	100%	81,22	MASUK TAHUN
3	DEPARTEMEN KINERJA	11	218	80,71%	33,2	80,31%	28	82,21	1	100%	80,31	TIDAK
4	DEPARTEMEN KINERJA	10	210	80,31%	30,2	80,01%	31	80,11	1	100%	80,11	TIDAK
5	DEPARTEMEN KINERJA	16	423	85,4%	33,6	84,4%	32,1	82,21	1	100%	81,17	TIDAK
6	DEPARTEMEN KINERJA	17	387	82,8%	31,7	82,5%	30	81,21	1,7	84%	81,21	TIDAK
7	DEPARTEMEN KINERJA	17	312	80,81%	33,0	80,31%	31,8	81,71	1	100%	81,21	TIDAK
8	DEPARTEMEN KINERJA	17	317	80,21%	31,9	80,1%	31	81,21	1	100%	80,81	TIDAK
9	DEPARTEMEN KINERJA	17	316	80,21%	31,9	80,1%	31	81,21	1	100%	80,81	TIDAK
10	DEPARTEMEN KINERJA	17	316	80,21%	31,9	80,1%	31	81,21	1	100%	80,81	TIDAK
11	DEPARTEMEN KINERJA	17	317	80,21%	31,9	80,1%	31	81,21	1	100%	80,81	TIDAK
12	DEPARTEMEN KINERJA	17	316	80,21%	31,9	80,1%	31	81,21	1	100%	80,81	TIDAK
13	DEPARTEMEN KINERJA	17	316	80,21%	31,9	80,1%	31	81,21	1	100%	80,81	TIDAK
14	DEPARTEMEN KINERJA	17	316	80,21%	31,9	80,1%	31	81,21	1	100%	80,81	TIDAK
15	DEPARTEMEN KINERJA	17	316	80,21%	31,9	80,1%	31	81,21	1	100%	80,81	TIDAK
16	DEPARTEMEN KINERJA	17	316	80,21%	31,9	80,1%	31	81,21	1	100%	80,81	TIDAK
17	DEPARTEMEN KINERJA	17	316	80,21%	31,9	80,1%	31	81,21	1	100%	80,81	TIDAK
18	DEPARTEMEN KINERJA	17	316	80,21%	31,9	80,1%	31	81,21	1	100%	80,81	TIDAK
19	DEPARTEMEN KINERJA	17	316	80,21%	31,9	80,1%	31	81,21	1	100%	80,81	TIDAK
20	DEPARTEMEN KINERJA	17	316	80,21%	31,9	80,1%	31	81,21	1	100%	80,81	TIDAK
21	DEPARTEMEN KINERJA	17	316	80,21%	31,9	80,1%	31	81,21	1	100%	80,81	TIDAK
22	DEPARTEMEN KINERJA	17	316	80,21%	31,9	80,1%	31	81,21	1	100%	80,81	TIDAK
23	DEPARTEMEN KINERJA	17	316	80,21%	31,9	80,1%	31	81,21	1	100%	80,81	TIDAK
24	DEPARTEMEN KINERJA	17	316	80,21%	31,9	80,1%	31	81,21	1	100%	80,81	TIDAK
25	DEPARTEMEN KINERJA	17	316	80,21%	31,9	80,1%	31	81,21	1	100%	80,81	TIDAK
26	DEPARTEMEN KINERJA	17	316	80,21%	31,9	80,1%	31	81,21	1	100%	80,81	TIDAK
27	DEPARTEMEN KINERJA	17	316	80,21%	31,9	80,1%	31	81,21	1	100%	80,81	TIDAK
28	DEPARTEMEN KINERJA	17	316	80,21%	31,9	80,1%	31	81,21	1	100%	80,81	TIDAK
29	DEPARTEMEN KINERJA	17	316	80,21%	31,9	80,1%	31	81,21	1	100%	80,81	TIDAK
30	DEPARTEMEN KINERJA	17	316	80,21%	31,9	80,1%	31	81,21	1	100%	80,81	TIDAK
31	DEPARTEMEN KINERJA	17	316	80,21%	31,9	80,1%	31	81,21	1	100%	80,81	TIDAK
32	DEPARTEMEN KINERJA	17	316	80,21%	31,9	80,1%	31	81,21	1	100%	80,81	TIDAK
33	DEPARTEMEN KINERJA	17	316	80,21%	31,9	80,1%	31	81,21	1	100%	80,81	TIDAK
34	DEPARTEMEN KINERJA	17	316	80,21%	31,9	80,1%	31	81,21	1	100%	80,81	TIDAK
35	DEPARTEMEN KINERJA	17	316	80,21%	31,9	80,1%	31	81,21	1	100%	80,81	TIDAK
36	DEPARTEMEN KINERJA	17	316	80,21%	31,9	80,1%	31	81,21	1	100%	80,81	TIDAK
37	DEPARTEMEN KINERJA	17	316	80,21%	31,9	80,1%	31	81,21	1	100%	80,81	TIDAK
38	DEPARTEMEN KINERJA	17	316	80,21%	31,9	80,1%	31	81,21	1	100%	80,81	TIDAK
39	DEPARTEMEN KINERJA	17	316	80,21%	31,9	80,1%	31	81,21	1	100%	80,81	TIDAK
40	DEPARTEMEN KINERJA	17	316	80,21%	31,9	80,1%	31	81,21	1	100%	80,81	TIDAK
41	DEPARTEMEN KINERJA	17	316	80,21%	31,9	80,1%	31	81,21	1	100%	80,81	TIDAK
42	DEPARTEMEN KINERJA	17	316	80,21%	31,9	80,1%	31	81,21	1	100%	80,81	TIDAK
43	DEPARTEMEN KINERJA	17	316	80,21%	31,9	80,1%	31	81,21	1	100%	80,81	TIDAK
44	DEPARTEMEN KINERJA	17	316	80,21%	31,9	80,1%	31	81,21	1	100%	80,81	TIDAK
45	DEPARTEMEN KINERJA	17	316	80,21%	31,9	80,1%	31	81,21	1	100%	80,81	TIDAK
46	DEPARTEMEN KINERJA	17	316	80,21%	31,9	80,1%	31	81,21	1	100%	80,81	TIDAK
47	DEPARTEMEN KINERJA	17	316	80,21%	31,9	80,1%	31	81,21	1	100%	80,81	TIDAK
48	DEPARTEMEN KINERJA	17	316	80,21%	31,9	80,1%	31	81,21	1	100%	80,81	TIDAK
49	DEPARTEMEN KINERJA	17	316	80,21%	31,9	80,1%	31	81,21	1	100%	80,81	TIDAK
50	DEPARTEMEN KINERJA	17	316	80,21%	31,9	80,1%	31	81,21	1	100%	80,81	TIDAK
51	DEPARTEMEN KINERJA	17	316	80,21%	31,9	80,1%	31	81,21	1	100%	80,81	TIDAK
52	DEPARTEMEN KINERJA	17	316	80,21%	31,9	80,1%	31	81,21	1	100%	80,81	TIDAK
53	DEPARTEMEN KINERJA	17	316	80,21%	31,9	80,1%	31	81,21	1	100%	80,81	TIDAK
54	DEPARTEMEN KINERJA	17	316	80,21%	31,9	80,1%	31	81,21	1	100%	80,81	TIDAK
55	DEPARTEMEN KINERJA	17	316	80,21%	31,9	80,1%	31	81,21	1	100%	80,81	TIDAK
56	DEPARTEMEN KINERJA	17	316	80,21%	31,9	80,1%	31	81,21	1	100%	80,81	TIDAK
57	DEPARTEMEN KINERJA	17	316	80,21%	31,9	80,1%	31	81,21	1	100%	80,81	TIDAK
58	DEPARTEMEN KINERJA	17	316	80,21%	31,9	80,1%	31	81,21	1	100%	80,81	TIDAK
59	DEPARTEMEN KINERJA	17	316	80,21%	31,9	80,1%	31	81,21	1	100%	80,81	TIDAK
60	DEPARTEMEN KINERJA	17	316	80,21%	31,9	80,1%	31	81,21	1	100%	80,81	TIDAK
61	DEPARTEMEN KINERJA	17	316	80,21%	31,9	80,1%	31	81,21	1	100%	80,81	TIDAK
62	DEPARTEMEN KINERJA	17	316	80,21%	31,9	80,1%	31	81,21	1	100%	80,81	TIDAK
63	DEPARTEMEN KINERJA	17	316	80,21%	31,9	80,1%	31	81,21	1	100%	80,81	TIDAK
64	DEPARTEMEN KINERJA	17	316	80,21%	31,9	80,1%	31	81,21	1	100%	80,81	TIDAK
65	DEPARTEMEN KINERJA	17	316	80,21%	31,9	80,1%	31	81,21	1	100%	80,81	TIDAK
66	DEPARTEMEN KINERJA	17	316	80,21%	31,9	80,1%	31	81,21	1	100%	80,81	TIDAK
67	DEPARTEMEN KINERJA	17	316	80,21%	31,9	80,1%	31	81,21	1	100%	80,81	TIDAK
68	DEPARTEMEN KINERJA	17	316	80,21%	31,9	80,1%	31	81,21	1	100%	80,81	TIDAK
69	DEPARTEMEN KINERJA	17	316	80,21%	31,9	80,1%	31	81,21	1	100%	80,81	TIDAK
70	DEPARTEMEN KINERJA	17	316	80,21%	31,9	80,1%	31	81,21	1	100%	80,81	TIDAK
71	DEPARTEMEN KINERJA	17	316	80,21%	31,9	80,1%	31	81,21	1	100%	80,81	TIDAK
72	DEPARTEMEN KINERJA	17	316	80,21%	31,9	80,1%	31	81,21	1	100%	80,81	TIDAK
73	DEPARTEMEN KINERJA	17	316	80,21%	31,9	80,1%	31	81,21	1	100%	80,81	TIDAK
74	DEPARTEMEN KINERJA	17	316	80,21%	31,9	80,1%	31	81,21	1	100%	80,81	TIDAK
75	DEPARTEMEN KINERJA	17	316	80,21%	31,9	80,1%	31	81,21	1	100%	80,81	TIDAK
76	DEPARTEMEN KINERJA	17	316	80,21%	31,9	80,1%	31	81,21	1	100%	80,81	TIDAK
77	DEPARTEMEN KINERJA	17	316	80,21%	31,9	80,1%	31	81,21	1	100%	80,81	TIDAK
78	DEPARTEMEN KINERJA	17	316	80,21%	31,9	80,1%	31	81,21	1	100%	80,81	TIDAK
79	DEPARTEMEN KINERJA	17	316	80,21%	31,9	80,1%	31	81,21	1	100%	80,81	TIDAK
80	DEPARTEMEN KINERJA	17	316	80,21%	31,9	80,1%	31	81,21	1	100%	80,81	TIDAK
81	DEPARTEMEN KINERJA	17	316	80,21%	31,9	80,1%	31	81,21	1	100%	80,81	TIDAK
82	DEPARTEMEN KINERJA	17	316	80,21%	31,9	80,1%	31	81,21	1	100%	80,81	TIDAK
83	DEPARTEMEN KINERJA	17	316	80,21%	31,9	80,1%	31	81,21	1	100%	80,81	TIDAK
84	DEPARTEMEN KINERJA	17	316	80,21%	31,9	80,1%	31	81,21	1	100%	80,81	TIDAK
85	DEPARTEMEN KINERJA	17	316	80,21%	31,9	80,1%	31	81,21	1	100%	80,81	TIDAK
86	DEPARTEMEN KINERJA	17	316	80,21%	31,9	80,1%	31	81,21	1	100%	80,81	TIDAK
87	DEPARTEMEN KINERJA	17	316	80,21%	31,9	80,1%	31	81,21	1	100%	80,81	TIDAK
88	DEPARTEMEN KINERJA	17	316	80,21%	31,9	80,1%	31	81,21	1	100%	80,81	TIDAK
89	DEPARTEMEN KINERJA</											

yang masih rendah adalah komponen kualifikasi pegawai dimana komponen kualifikasi mendapat indeks sebesar 20,88 atau 83,52%. Untuk kompetensi mendapat nilai 39,65 atau persentase 99,13 ini merupakan angka yang cukup tinggi. Pada kinerja mendapat nilai sebesar 25,06 atau persentase 83,53 angka ini masih bisa ditingkatkan dalam pencapaiannya dan untuk disiplin mencapai nilai yang maksimal yaitu 5 atau dengan persentase 100%.

Tabel 38. Perbandingan Target dan Capaian Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Pontianak

INDIKATOR KINERJA	2020		2021		2022		2023		2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Pontianak	72	76,87	73	78,76	77	80,99	72	80,99	72	80,99
% Capaian	107		108		105		112		112	

#### 19. Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (Nilai)

Pengukuran capaian terhadap nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak lingkup Stasiun PSDKP Pontianak bersumber pada komponen antara lain: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Mekanisme perhitungan nilai Penilaian Mandiri SAKIP Stasiun PSDKP Pontianak dibagi kedalam 4 komponen, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Dimana capaian Stasiun PSDKP Pontianak yaitu pada nilai Perencanaan Kinerja yaitu 22,8, Pengukuran Kinerja yaitu 27, Pelaporan Kinerja yaitu 11,25 dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yaitu 18,5. Lalu skor akhir pada penilaian yaitu 79,55 dimana nilai diambil dari bobot Perencanaan Kinerja 30%, Pengukuran Kinerja 30%, Pelaporan Kinerja 15% dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal 25%. Capaian ini belum melebihi target dimana target untuk tahun 2023 yaitu sebesar 80,5. Indikator kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya tahun 2022 dikarenakan Indikator Kinerja Penilaian Mandiri SAKIP baru ada pada tahun 2023. Indikator kinerja tersebut merupakan indikator kinerja yang ditetapkan berdasarkan Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024. Indikator kinerja ini juga tidak bisa dibandingkan dengan capaian 5 tahun terakhir karena merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2023. IKU ini juga tidak bisa dibandingkan dengan dokumen Renstra karena baru ada pada tahun 2023

Capaian indikator kinerja ini pada tahun 2023 adalah sebesar 79,55 dan tidak melampaui target yaitu sebesar 80,5. Tidak tercapainya target tahun 2023 disebabkan karena pada komponen “Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal” subkomponen “Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Telah Dilaksanakan Secara Berkualitas Dengan Sumber Daya Yang Memadai” mendapat nilai 5,25 dari bobot subkomponen 7,5 hal ini disebabkan karena tidak semua pegawai yang masuk dalam Tim SAKIP Stasiun PSDKP Pontianak memiliki sertifikat workshop/bimtek SAKIP. Rencana perbaikan untuk mengoptimalkan nilai tersebut adalah Stasiun PSDKP Pontianak akan mengupayakan anggota Tim SAKIP untuk mengikuti kegiatan Bimtek/Workshop. Mendukung tercapainya IKU karena telah dilaksanakan Workshop SAKIP 2023 di Jakarta. Hasil nilai perhitungan dapat dijelaskan pada tabel berikut;

Tabel 39. Perhitungan Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Stasiun PSDKP Pontianak

Unit Kerja	Aspek				Jumlah	Predikat
	Perencanaan Kinerja (Bobot 30)	Pengukuran Kinerja (Bobot 30)	Pelaporan Kinerja (Bobot 15)	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (Bobot 25)		
Stasiun PSDKP Pontianak	22,8	27	11,25	18,5	79,55	BB

Sebagai bahan untuk perbandingan antara target dan realisasi rencana kerja jangka menengah dapat lihat pada tabel berikut;

Tabel 40. Perbandingan Target dan Capaian Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Stasiun PSDKP Pontianak

INDIKATOR KINERJA	2020		2021		2022		2023		2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Stasiun PSDKP Pontianak	-	-	-	-	-	-	80,5	79,55	-	-
Capaian	-	-	-	-	-	-	98,81	-	-	-

## 20. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan

Indikator kinerja ini merupakan jumlah dokumen hasil rekomendasi pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Sekretariat Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang terbit pada 1 Oktober 2020 (TW IV tahun sebelumnya) s.d 31 September 2021 (TW IIII periode berjalan) yang telah

dilengkapi dan disampaikan kepada Inspektorat Jenderal KKP. Target Indikator Kinerja ini lingkup Stasiun PSDKP Pontianak tahun 2023 sebesar 75%. Sampai 31 Desember didapat capaian sebesar 100% dikarenakan Stasiun PSDKP Pontianak pada perhitungan tahun 2023 (Triwulan I s.d. Triwulan IV) tidak terdapat rekomendasi dari Inspektorat Jenderal KKP RI. Maka dengan ini dapat dikatakan bahwa indikator kinerja ini berhasil dikarenakan realisasi telah mencapai dari target yang sudah ditentukan yaitu 75%. Indikator kinerja jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2022 mengalami peningkatan karena pada tahun 2023 Stasiun PSDKP Pontianak tidak mendapat rekomendasi hasil pengawasan dan sedangkan pada Triwulan IV tahun 2022 Stasiun PSDKP Pontianak mendapat 8 Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sehingga capaian 100% atau dengan persentase 142%. IKU ini juga tidak bisa dibandingkan dengan dokumen Renstra karena baru ada pada tahun 2022. Tercapainya indikator ini dikarenakan tidak terlepas dari Stasiun PSDKP Pontianak yang secara renponsif menindak lanjuti rekomendasi yang diberikan dalam perbaikan kinerja organisasi dimulai dari pimpinan sampai diturunkan pada pegawai dibawahnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan kinerja yang lebih baik serta monitoring dan pendampingan dari tim dari Setditjen PSDKP. Capaian hasil persentase Jumlah rekomendasi Hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan dijelaskan pada tabel berikut;

Tabel 41. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi Dan Disampaikan

Unit Kerja	Jumlah Rekomendasi	Tindak Lanjut (Tuntas)	Tuntas (%)	Sisa Rekomendasi	Sisa Rekomendasi (%)
Stasiun PSDKP Pontianak	0	0	0	0	0

Sebagai bahan perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan sisampaikan dapat disajikan pada tabel berikut;

Tabel 42. Perbandingan Target dan Capaian Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan sisampaikan

INDIKATOR KINERJA	2020		2021		2022		2023		2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak	-	-	-	-	70	100	75	75	-	-
% Capaian	-		-		142		100		-	

## 21. Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Stasiun PSDKP Pontianak

Pengukuran nilai Implementasi Program Budaya kerja lingkup Stasiun PSDKP Pontianak berpedoman pada sebagaimana budaya kerja itu sendiri telah dilaksanakan pada unit kerja, dimana program-program budaya kerja Ditjen PSDKP sebanyak 11 (sebelas), antara lain:

1. Hasilkan Inovasi Unit Kerja (HIU);
2. Lima menit sebelum jadwal;
3. Ringkas, rapi, resik, rawat rajin (5R);
4. Upayakan data terkini (UPDATE);
5. Organisasikan Rapat, Catat, Aksi dan Arsipkan (ORCA);
6. Tegakkan aturan dengan Akuntabel dan Transparan (TAAT);
7. Belanjakan Anggaran secara realistik, Akuntabel, dan Amanah (BARRAKUDA);
8. ASN PSDKP Produktif Kerja (APIK);
9. Menyelesaikan Tugas dengan Tepat (MANTAP);
10. Hargai, Motivasi dan Inisiatif (HARMONIS) dan
11. Gelorakan Gerakan Hemat Energi (Go Green).

Target dalam tahun 2023 pada indikator kinerja ini sebesar 21 (nilai) dan sampai dengan Triwulan IV 2023 telah tercapai dengan capaian sebanyak 24,85 (nilai) atau prosentase sebesar 118,33%. Capaian indikator ini jika dibandingkan dengan tahun 2022 mengalami peningkatan, pada tahun 2022 dengan target sebesar 21 dan capaian sebesar 23,69 dan pada tahun 2023 dengan target 21 dan capaian 24,85. Dalam ini maka tidak bisa juga dibandingkan dengan capaian 5 tahun terakhir. IKU ini juga tidak bisa dibandingkan dengan dokumen Renstra karena baru ada pada tahun 2022. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan

indikator kinerja ini yaitu pimpinan unit kerja ikut menggalakan dan menjadi role model kegiatan Budaya Kerja lingkup Stasiun PSDKP Pontianak kedalam keseharian bekerja semua pegawai serta peran dari tim Sekretariat Ditjen PSDKP dan fasilitator yang aktif dalam pembentukan budaya kerja. Talah dilaksanakan kegiatan apel pagi, go green dan penciptaan inovasi di lingkungan Stasiun PSDKP Pontianak.

Tabel 43. Perbandingan Target dan Capaian Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak

INDIKATOR KINERJA	2020		2021		2022		2023		2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak	-	-	-	-	21	23,69	21	24,85	-	-
% Capaian	-		-		112,81		118		-	

## 22. Jumlah Inovasi yang Dihasilkan Stasiun PSDKP Pontianak

Stasiun PSDKP Pontianak pada tahun 2023 telah menghasilkan satu buah inovasi yang diberi nama BUSA-WAS “Buku Saku Pengawas” yang menitik beratkan kepada Pemangkas Waktu Pencarian Dasar Hukum Terkait Aturan Perundang-Undangan. Inovasi ini telah disertakan dalam lomba inovasi dan telah ikut dikompetisikan lingkup Ditjen PSDKP.

Target dalam tahun 2023 pada indikator kinerja ini sebanyak 1 (inovasi) dan sampai dengan Triwulan IV 2023 telah dicapai sebanyak 1 (inovasi) atau prosentase sebesar 100%. Capaian dalam indikator kinerja ini jika dibandingkan dengan tahun 2022 memiliki capaian yang sama yaitu 100% karena pada tahun 2022 Stasiun PSDKP Pontianak memiliki 1 inovasi. Dalam ini maka tidak bisa juga dibandingkan dengan capaian 5 Tahun terakhir. IKU ini juga tidak bisa dibandingkan dengan dokumen Renstra karena baru ada pada tahun 2022. Keberhasilan capaian indikator kinerja ini dikarenakan buah kerja dari Tim Gugus Kendali Transformasi lingkup Stasiun PSDKP Pontianak yang tercantum pada Inovasi lingkup Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 50 Tahun 2023 tentang Tim Budaya Kerja Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 untuk melakukan perubahan secara internal kekurangan yang ada di lingkup Stasiun PSDKP Pontianak salah satunya dalam hal keterlambatan pengumpulan laporan gelar operasi armada pengawasan, maka dari itu tim memandang perlunya memangkas waktu pencarian dasar hukum

sehingga didapatkannya rumusan awal pembuatan “BUSAWAS” seluruh pegawai PSDKP Pontianak yang selalu berusaha dalam menciptakan inovasi yang bermanfaat bagi Stasiun PSDKP Pontianak dengan telah dilakukannya penciptaan inovasi dengan metodelogi PDCA. Telah dilaksanakan kegiatan Bootcamp inovasi di Kota Bandung Tahun 2023 serta Stasiun PSDKP Pontianak telah mengikuti lomba Inovasi Lingkup Ditjen PSDKP di Jakarta.

Setelah membuat inovasi tersebut rekomendasi untuk kedepannya yaitu dengan menjalankan inovasi dengan konsisten dan tetap melakukan perbaikan didalamnya serta menganalisa hal di bidang lain untuk diterbitkannya inovasi lainnya.

Tabel 44. Perbandingan Target dan Capaian Inovasi Gugus Kerja Transformasi yang dihasilkan Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak

INDIKATOR KINERJA	2020		2021		2022		2023		2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Inovasi Gugus Kerja Transformasi yang dihasilkan Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-
% Capaian	-		-		100		100		-	

### 23. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Pontianak

Pengukuran capaian indikator kinerja ini menggunakan Aplikasi Bitrix24.com dan Colaboration Office dengan target 92% pada tahun 2023. Perhitungan capaian Presentase unit kerja Stasiun PSDKP Pontianak yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar sampai dengan tahun 2023 mengadopsi dari data yang diberikan oleh Eselon I yaitu dengan capaian Triwulan IV sebesar 85% atau persentase 92,39% dengan target 92%, maka indikator kinerja ini tidak tercapai pada Triwulan IV hal ini disebabkan karena beberapa Ketua Tim Kerja terutama pada Ketua Tim Kerja yang baru dilantik Lingkup PSDKP Pontianak terlambat dalam mengunggah kegiatan pada triwulan IV di Colaboration Office. Sedangkan pada Triwulan I s.d. Triwulan III Stasiun PSDKP Pontianak mendapatkan nilai secara berturut-turut sebesar 97,04%, 98,52% dan 93,52% dengan rata-rata tahun 2023 sebesar 93,52% dan target tahun 2023 sebesar 92%, maka dapat disimpulkan bahwa Stasiun PSDKP Pontianak pada tahun 2023 nilai indikator kinerja persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar melampaui target. Data dan informasi yang disajikan

dalam Bitrix24.com/Colaboration Office Stasiun PSDKP Pontianak diantaranya berupa : Berita Pengawasan, kegiatan yang dilaksanakan di lingkup Stasiun PSDKP Pontianak, Profil Stasiun PSDKP Pontianak serta Satuan Pengawas (Satwas) PSDKP dan Wilker di lingkup Stasiun PSDKP Pontianak, Informasi Pelayanan Publik di Stasiun PSDKP Pontianak.

Apabila dibandingkan dengan Capaian pada tahun 2022, indikator kinerja ini mengalami peningkatan karena Capaian pada Tahun 2022 tercapai sebesar 95,49% dengan target 86%. Maka dengan ini dapat dikatakan bahwa indikator kinerja ini berhasil dikarenakan realisasi melebihi dari target yang sudah ditentukan. IKU dapat dibandingkan dengan dokumen Renstra 2022 – 2024. Indikator kinerja ini jika dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami penurunan karena realisasi sebesar 97,28% dan apabila dibandingkan dengan tahun 2020 mengalami kenaikan karena realisasi sebesar 73,29%.

Target indikator kinerja ini dapat dicapai dan melampaui target yang ditentukan dikarenakan adanya pemenuhan dokumen Laporan Kinerja Tahun 2023, dokumen perjanjian kinerja tahun 2023, Rincian Target IKU dan renaksi yang diupload pada aplikasi Bitrix24.com. Selain itu keikutsertaan dan keaktifan pejabat dan 6 staf pada Triwulan I dan II pada aplikasi Bitrix24.com dan keaktifan para Katimja pada Triwulan III dan IV pada aplikasi Colaboration Office Stasiun PSDKP Pontianak dalam ternilai maksimal karena secara reguler dilakukan evaluasi terhadap postingan bulanan Stasiun PSDKP Pontianak pada aplikasi bitriks24.com/collaboration office sebanyak 2 postingan setiap bulannya bagi yang memiliki akun sebagai rincian capaian indikator kinerja ini serta peran Tim dari Setditjen PSDKP dalam memonitoring pelaksanaan ini. Telah mengikuti kegiatan Sosialisasi Colaboration Office yang di selenggarakan oleh Pusdatin KKP. Capaian indikator kinerja unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Pontianak dapat dilihat pada gambar berikut:

No	UPT PSDKP	Target Tw III	Realisasi Tw I	Realisasi Tw II	Realisasi Tw III	Realisasi Tw IV	Rata-rata
1	Jakarta	92%	100%	92,59%	100,00%	93,33%	96,48%
2	Bitung	92%	100%	92,59%	100,00%	88,33%	95,23%
3	Lampulo	92%	92,59%	92,59%	102,78%	121,67%	102,98%
4	Batam	92%	100%	92,59%	94,44%	133,33%	105,09%
5	Benoa	92%	85,19%	100,00%	105,56%	93,33%	96,02%
7	Tual	92%	91,11%	99,26%	116,67%	125,00%	108,01%
6	Belawan	92%	85,11%	100,00%	101,85%	123,33%	102,59%
8	Pontianak	92%	97,04%	98,52%	93,52%	85,00%	93,52%
9	Tarakan	92%	100%	94,07%	100,00%	8,33%	75,60%
10	Cilacap	92%	80,74%	100,00%	107,41%	108,33%	99,12%
11	Kupang	92%	73,33%	92,59%	122,22%	133,33%	105,37%
12	Ambon	92%	82,22%	100,00%	94,44%	121,67%	99,58%
13	Tahuna	92%	98,52%	100,00%	122,22%	120,00%	110,19%
14	Biak	92%	91,11%	100,00%	96,30%	100,00%	96,85%

Gambar 8. Capaian IK unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Pontianak

Sebagai bahan perbandingan Capaian IK unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Pontianak dalam jangka menengah dapat disajikan pada tabel berikut;

Tabel 45. Perbandingan Target dan Capaian Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Pontianak

INDIKATOR KINERJA	2020		2021		2022		2023		2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Pontianak	82	73,89	84	97,28	86	95,49	92	93,52	82	93,52
% Capaian	90		116		111		101,6		114	

#### 24. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak

Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%) adalah Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup Unit Kerja yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengukuran/penilaian dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal pada tahun 2023 Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut: 1) Tingkat pemanfaatan

Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2023; 2) Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan IV tahun 2023 baik ke pengguna barang dan pengelola barang; 3) Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) Tahun 2017-2019; 4) Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2020 didukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian; 5) Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu.

Sampai triwulan IV tahun 2023 capaian Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Stasiun PSDKP Pontianak sebesar 100%. Maka dengan ini dapat dikatakan bahwa indikator kinerja ini berhasil dikarenakan realisasi telat melebihi dari target yang sudah ditentukan pada tahun 2023 sebesar 77,5% dan tercapai 129,03%. Indikator kinerja ini apabila dibandingkan dengan capaian pada Triwulan IV tahun 2022 mendapat nilai yang sama dan jika dibandingkan dengan tahun 2021 mendapat nilai yang sama yaitu 100%. Indikator kinerja ini tidak bisa dibandingkan dengan capaian 5 tahun terakhir dikarenakan merupakan indikator kinerja baru. IKU ini juga tidak bisa dibandingkan dengan dokumen Renstra karena baru ada pada tahun 2021. Hal ini dicapai melalui pelaksanaan seluruh unsur pengelolaan BMN secara baik. Hal-hal yang dilakukan dalam pengelolaan BMN lingkup Stasiun PSDKP Pontianak pada Tahun 2023 adalah (1). Ketersediaan dokumen RKBMN Tahun 2023 yang digunakan dalam penyusunan RKAKL Tahun 2023 dengan nilai 100% ;(2). Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal yang sudah BAST sampai dengan triwulan I tahun 2023 baik ke pengguna barang dan pengelola barang dengan nilai 100%;(3). Tingkat penyelesaian perbaikan inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) periode Tahun 2017 - 2019 yang diselesaikan Tahun 2023 dengan nilai 100%; (4.) Seluruh Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2020 telah dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian dengan nilai 100%;(5). Penyampaian laporan BMN Tahun 2023 dan Semester I dan II Tahun 2023 telah secara tepat waktu dengan nilai 100% dan monitoring/evaluasi dari tim Setditjen PSDKP pasca kegiatan rekonsiliasi yang menjadikan tingkat kepatuhan BMN stasiun Pontianak terus baik dan mencapai target.

Tabel 46. Perbandingan Target dan Capaian Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%)

INDIKATOR KINERJA	2020		2021		2022		2023		2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Stasiun PSDKP Pontianak	-	-	72,5	100	75	100	77,5	100	-	-
% Capaian	-		138		133		129,03		-	

## 25. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Stasiun PSDKP Pontianak

Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%) adalah Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa lingkup Unit Kerja yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengukuran/penilaian dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal pada tahun 2023 Tingkat kepatuhan PBJ Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut: 1) Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (20%); 2) Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%); 3) Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%); 4). Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%).

Tahun 2023 capaian tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Stasiun PSDKP Pontianak sebesar 100%. Maka dengan ini dapat dikatakan bahwa indikator kinerja ini berhasil dikarenakan realisasi telah melebihi dari target yang sudah ditentukan pada tahun 2023 sebesar 77,5% atau capaian sebesar 129,03%. Indikator kinerja ini apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2022 mencapai nilai yang sama yaitu 100% dan jika dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami peningkatan karena realisasi 2021 sebesar 72,5%. Bersama ini indikator kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian 5 tahun terakhir karena merupakan indikator baru dimulai pada tahun 2021. IKU ini juga tidak bisa dibandingkan dengan dokumen Renstra karena baru ada pada tahun 2021. Indikator kinerja tersebut merupakan indikator kinerja yang ditetapkan berdasarkan Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024.

Indikator kinerja ini dapat tercapai disebabkan oleh pelaksanaan seluruh unsur pengadaan barang dan jasa secara baik. Hal-hal yang dilakukan dalam pengadaan barang dan jasa lingkup Stasiun PSDKP Pontianak pada Tahun 2023 berupa (1). Stasiun PSDKP Pontianak telah menyusun manajemen resiko untuk pelaksanaan pengadaan barang dan jasa strategis, manajemen resiko tersebut digunakan dalam

pengendalian PBJ. (2). Seluruh paket pengadaan melalui penyedia pada Stasiun PSDKP Pontianak telah diumumkan dalam SIRUP dan telah dilengkapi dengan KAK, HPS, spesifikasi teknis dan rancangan kontrak pada paket pengadaan dengan kontrak berbentuk Surat Perjanjian (3). Penyedia barang/Jasa untuk pengadaan dengan kontrak berbentuk surat perjanjian dilaksanakan melalui SPSE (4). Seluruh paket pengadaan barang dan jasa dengan kontrak berbentuk surat perjanjian telah dikontrakkan sebelum bulan Juni tahun 2021. Seluruh pengadaan dengan kontrak berbentuk surat perjanjian selesai tepat waktu sesuai kontrak dan seluruh BAST pengadaan dengan kontrak berbentuk surat perjanjian memiliki volume dan spesifikasi sesuai dengan surat perjanjian dan/atau addendumnya (5). Penyusunan laporan penyelenggaraan PBJ dengan Ketersediaan Laporan Penyelenggaraan PBJ (6). Seluruh rekomendasi hasil pengawasan pengadaan barang/jasa tahun 2023 telah ditindaklanjuti dan monitoring pelaksanaan PBJ oleh Biro Umum PBJ dan Setdijen PSDKP juga sebagai variable keberhasilan tercapainya target pada IKU ini.

Tabel 47. Perbandingan Target dan Capaian Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Barang dan Jasa lingkup Stasiun PSDKP Pontianak

INDIKATOR KINERJA	2020		2021		2022		2023		2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Barang dan Jasa lingkup Stasiun PSDKP Pontianak	-	-	72,5	100	75	100	77,5	100	-	-
% Capaian	-		138		133		129,05		-	

## 26. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PSDKP Pontianak

Pengukuran Indikator Kinerja Kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak meliputi 8 (delapan) komponen capaian yaitu sebagai berikut: Revisi DIPA, Deviasi Hal III DIPA, Data Kontrak, Penyelesaian tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, Dispensasi SPM, Penyerapan Anggaran dan Capaian Output. Penghitungan capaian kinerja diperoleh dari hasil penghitungan yang dilakukan dalam aplikasi Sistem Online Monitoring SPAN (OMSPAN) Kementerian Keuangan. Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak pada Tahun 2023 sebesar 92,45. Indikator kinerja ini apabila dibandingkan dengan tahun 2022 mengalami penurunan dimana capaian tahun 2022 sebesar 93,39. Pada tahun 2023 terget nilai IKPA sebesar 93,75, maka nilai IKPA Stasiun PSDKP Pontianak Tahun 2023 belum mencapai target yang telah

ditentukan, karena nilai IKPA Stasiun PSDKP Pontianak pada tahun 2023 sebesar 92,45. Indikator kinerja ini jika dibandingkan dengan tahun 2022 maka mengalami kenaikan karena realisasi 2021 sebesar 91,07 dan jika dinandingkan dengan 2020 mengalami penurunan karena realisasi 2020 94,33. Indikator kinerja tersebut merupakan indikator kinerja yang ditetapkan berdasarkan Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024. IKU bisa dibandingkan dengan dokumen Renstra karena baru ada pada tahun 2020.

Pada Tahun 2023, nilai IKPA Stasiun PSDKP Pontianak adalah 92,45. Nilai berada di bawah target Tahun 2023 diangka 93,75 atau prosentase sebesar 98,61%. Tidak tercapainya target nilai IKPA pada Tahun 2023 disebabkan oleh kekurangan pada nilai Deviasi Halaman III DIPA yang memperoleh nilai akhir 6,89 dari bobot 10 dan disebabkan juga pada nilai Dispensasi SPM yang memperoleh nilai akhir 4,25 dari bobot 5. Upaya perbaikan kedepannya adalah meningkatkan nilai yang belum optimal pada Deviasi Halaman III DIPA dan Dispensasi SPM dengan cara mengurangi menindaklanjuti informasi revisi halaman III DIPA dengan waktu yang tepat. Telah mengikuti bimtek capaian Output oleh KPPN Pontianak dan bimtek dari Biro Perencanaan. Untuk Capaian tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:



KEMENTERIAN KELUARGA REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN KELUARGA DAN PEKERJAAN

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Subsidi Pengel. Pendidikan

No	Kode K.L.	Nama K.L.	Klasifikasi	Kriteria Pelaksanaan Anggaran		Kriteria Pelaksanaan Anggaran					Hasil Total	Rasionalitas	Nilai Akhir (Nilai Total Kriteria)	
				Rencana	Direksi	Pengawasan	Bantuan	Pengeluaran	Pengeluaran	Dispensasi				
1	000	KEMERIT时AN KELUARGA DAN PEKERJAAN		100,00	99,99	99,97	99,99	99,91	99,79	99,21	99,73			
				100	100	100	100	100	100	100	100			
				100,00	99,99	99,97	99,99	99,91	99,79	99,21	99,73	99,99	99,99	99,99
				99,97	99,99	99,97	99,99	99,91	99,79	99,21	99,73			

Gambar 9. Nilai Indikator Pelaksana Pelaksanaan Anggaran

Sebagai bahan perbandingan Capaian Indikator Kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PSDKP Pontianak dapat disajikan pada tabel berikut;

Tabel 48. Perbandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PSDKP Pontianak

INDIKATOR KINERJA	2020		2021		2023		2023		2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PSDKP Pontianak	88	94,33	89	91,07	89	93,39	93,75	92,45	88	92,45
% Capaian	107,19		102,32		142		98,61		105	

## 27. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Stasiun PSDKP Pontianak

Nilai Kinerja anggaran adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.249/PMK.02/2011. Metode pengukuran adalah Nilai diperoleh dari data input dan output yang dimasukkan setiap Satuan Kerja lingkup KKP kedalam aplikasi SMART Kemenkeu. Target tahun 2023 NKA lingkup Stasiun PSDKP Pontianak sebesar 82. Sampai 31 Desember dan penarikan data hasil pada Januari 2024 nilai NKA sebesar 85,92. Maka dengan ini dapat dikatakan bahwa indikator kinerja ini berhasil dikarenakan realisasi telat melebihi dari target yang sudah ditentukan pada tahun 2023 sebesar 82. Indikator kinerja ini apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2022 mengalami penurunan dimana pada tahun 2022 sebesar 84,46 atau prosentase sebesar 104,78%. Jika dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami penurunan karena realisasi sebesar 91,07%.



Gambar 80. Nilai Kinerja Anggaran (NKA)

Untuk mencapai Sasaran Strategis 7 ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp16,771,275,000 dan sampai dengan 31 Desember 2023 telah terealisasi sebesar Rp16,647,153,193 atau sebesar 99,26% dengan tingkat efisiensi pada Sasaran

Strategis 7 sebesar 0,39%, tingginya tingkat efisiensi tersebut dikarenakan jumlah realisasi, target dan realisasi anggaran berbanding lurus. Sasaran Strategis ini dapat dikatakan berhasil dikarenakan telah mencapai target yang telah ditentukan. Indikator kinerja ini juga tidak bisa dibandingkan dengan capaian 5 tahun terakhir. IKU ini juga tidak bisa dibandingkan dengan dokumen Renstra karena baru ada pada tahun 2021. Indikator kinerja tersebut merupakan indikator kinerja yang ditetapkan berdasarkan Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024. Tercapainya target indikator kinerja NKA pada tahun 2023 disebabkan oleh optimalnya realisasi anggaran sebesar 99,63 dengan diimbangi pencapaian 100% terhadap target output yaitu pada kegiatan teknis dan dukungan manajemen perkantoran serta optimalnya kinerja Tim Keuanga Stasiun PSDKP Pontianak serta peran pimpinan yang selalu memonitoring nilai kerja anggaran dan telah dilakukannya Monitoring oleh Ditjen Anggaran dan oleh KPPN Pontianak.

Sebagai bahan perbandingan Capaian Indikator Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Stasiun PSDKP Pontianak lingkup Stasiun PSDKP Pontianak dapat disajikan pada tabel berikut;

Tabel 49. Perbandingan Target dan Capaian Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Stasiun PSDKP Pontianak

INDIKATOR KINERJA	2020		2021		2022		2023		2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Stasiun PSDKP Pontianak	-	-	89	91,07	81	84,46	82	85,92	-	-
% Capaian	-		102		104,27		104,78		-	

### 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Capaian Kinerja Stasiun PSDKP Pontianak dengan Satker UPT Sejenis/Setara

Stasiun PSDKP Pontianak pada tahun 2023 telah membandingkan hasil capaian kinerja baik indikator kinerja utama maupun indikator kinerja dengan Satuan kerja UPT setara/ sejenis. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang di bandingkan sebanyak 13 (tiga belas) Indikator Kinerja Utama dan capaian Indikator Kinerja Manejerial sebanyak 14 (empat belas) dimana terdapat 3 indikator kinerja yang tidak tercapai. Adapun capaian Stasiun PSDKP Pontianak bila dibandingkan dengan hasil capaian kinerja tahun 2023 dengan 7 (tujuh) UPT satker setara/ sejenis, sebagai berikut;

1. IKU-1 Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian	Keterangan
1	Stasiun PSDKP Cilacap	80	100	120	-
2	Stasiun PSDKP Biak	-	-	-	tidak memiliki target
3	Stasiun PSDKP Ambon	80	100	120	-
4	Stasiun PSDKP Tahuna	-	-	-	tidak memiliki target
5	Stasiun PSDKP Pontianak	80	100	120	-
6	Stasiun PSDKP Belawan	80	100	120	-
7	Stasiun PSDKP Kupang	80	100	120	-
8	Stasiun PSDKP Tarakan	80	100	120	-

2. IKU-2 Indeks Kinerja Operasional Kapal Pengawas

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	87,6	100	114,15
2	Stasiun PSDKP Biak	87,6	100	114,15
3	Stasiun PSDKP Ambon	87,6	96,16	109,77
4	Stasiun PSDKP Tahuna	87,6	99,53	113,61
5	Stasiun PSDKP Pontianak	87,6	95,94	109,52
6	Stasiun PSDKP Belawan	87,6	99,41	113,48
7	Stasiun PSDKP Kupang	87,6	100	114,15
8	Stasiun PSDKP Tarakan	87,6	98,92	112,92

3. IKU-3 Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	87,6	98,33	112,24
2	Stasiun PSDKP Biak	87,6	100	114,15
3	Stasiun PSDKP Ambon	87,6	99,43	113,5
4	Stasiun PSDKP Tahuna	87,6	91,57	104,53
5	Stasiun PSDKP Pontianak	87,6	93,67	106,93
6	Stasiun PSDKP Belawan	87,6	100	114,15
7	Stasiun PSDKP Kupang	87,6	100	114,15
8	Stasiun PSDKP Tarakan	87,6	97,94	111,80

4. IKU-4 Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengaws

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	100	100	100
2	Stasiun PSDKP Biak	100	100	100
3	Stasiun PSDKP Ambon	100	100	100
4	Stasiun PSDKP Tahuna	100	100	100
5	Stasiun PSDKP Pontianak	100	100	100
6	Stasiun PSDKP Belawan	100	100	100
7	Stasiun PSDKP Kupang	100	100	100
8	Stasiun PSDKP Tarakan	100	100	100

5. IKU-5 Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Belawan	100	100	100
2	Stasiun PSDKP Biak	100	100	100
3	Stasiun PSDKP Ambon	100	100	100
4	Stasiun PSDKP Tahuna	100	100	100
5	Stasiun PSDKP Pontianak	100	100	100
6	Stasiun PSDKP Kupang	100	100	100
7	Stasiun PSDKP Cilacap	100	100	100
8	Stasiun PSDKP Tarakan	100	100	100

6. IKU-6 Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan (nilai)

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian	Keterangan
1	Stasiun PSDKP Cilacap	100	100	100	
2	Stasiun PSDKP Biak	100	100	100	
3	Stasiun PSDKP Ambon	100	100	100	
4	Stasiun PSDKP Tahuna	100	100	100	
5	Stasiun PSDKP Pontianak	100	100	100	
6	Stasiun PSDKP Belawan	100	100	100	
7	Stasiun PSDKP Kupang	100	100	100	
8	Stasiun PSDKP Tarakan	100	100	100	

7. IKU-7 Persentase Penyelesaian Pengumpulan Data dan Informasi Intelijen Kelautan (%)

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian	Keterangan
1	Stasiun PSDKP Cilacap	100	100	100	-
2	Stasiun PSDKP Biak	100	100	100	
3	Stasiun PSDKP Ambon	100	100	100	-
4	Stasiun PSDKP Tahuna	100	100	100	-
5	Stasiun PSDKP Pontianak	100	100	100	-
6	Stasiun PSDKP Belawan	100	100	100	-
7	Stasiun PSDKP Kupang	100	100	100	-
8	Stasiun PSDKP Tarakan	100	100	100	-

8. IKU-8 Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan (Nilai)

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian	Keterangan
1	Stasiun PSDKP Cilacap	100	100	100	
2	Stasiun PSDKP Biak	100	100	100	
3	Stasiun PSDKP Ambon	100	100	100	
4	Stasiun PSDKP Tahuna	100	100	100	
5	Stasiun PSDKP Pontianak	100	100	100	
6	Stasiun PSDKP Belawan	100	100	100	
7	Stasiun PSDKP Tarakan	100	100	100	
8	Stasiun PSDKP Kupang	100	100	100	

9. IKU-9 Persentase Penyelesaian Pengumpulan Data dan Informasi Intelijen Perikanan (%)

No	UPT	Target	Capaian	Persentase Capaian	Keterangan
1	Stasiun PSDKP Cilacap	100	100	100	
2	Stasiun PSDKP Biak	100	100	100	
3	Stasiun PSDKP Ambon	100	100	100	
4	Stasiun PSDKP Tahuna	100	100	100	
5	Stasiun PSDKP Pontianak	100	100	100	
6	Stasiun PSDKP Belawan	100	100	100	
7	Stasiun PSDKP Tarakan	100	100	100	
8	Stasiun PSDKP Kupang	100	100	100	

10. IKU-10 Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (indeks)

No	UPT	Target	Capaian	Persentase Capaian	Keterangan
1	Stasiun PSDKP Cilacap	80	100	120	
2	Stasiun PSDKP Biak	80	100	120	
3	Stasiun PSDKP Ambon	80	100	120	
4	Stasiun PSDKP Tahuna	80	100	120	
5	Stasiun PSDKP Pontianak	80	100	120	
6	Stasiun PSDKP Belawan	80	100	120	
7	Stasiun PSDKP Tarakan	80	100	120	
8	Stasiun PSDKP Kupang	80	100	120	

11. IKU-11 Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (Indeks)

No	UPT	Target	Capaian	Persentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	80	60	75
2	Stasiun PSDKP Biak	80	100	120
3	Stasiun PSDKP Ambon	80	100	120
4	Stasiun PSDKP Tahuna	80	100	120
5	Stasiun PSDKP Pontianak	80	100	120
6	Stasiun PSDKP Belawan	80	100	120
7	Stasiun PSDKP Kupang	80	100	120
8	Stasiun PSDKP Tarakan	80	100	120

12. IKU-12 Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Pengenaan Sanksi Administratif (Indeks)

No	UPT	Target	Capaian	Persentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	80	100	120
2	Stasiun PSDKP Biak	-	-	Tidak terdapat target
3	Stasiun PSDKP Ambon	80	100	120
4	Stasiun PSDKP Tahuna	80	100	120
5	Stasiun PSDKP Pontianak	80	100	120
6	Stasiun PSDKP Belawan	80	100	120
7	Stasiun PSDKP Kupang	80	100	120
8	Stasiun PSDKP Tarakan	80	100	120

13. IKU-13 Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (Indeks)

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	93	100	107,52
2	Stasiun PSDKP Biak	93	100	107,52
3	Stasiun PSDKP Ambon	-	-	Tidak terdapat target
4	Stasiun PSDKP Tahuna	93	100	107,52
5	Stasiun PSKDP Pontianak	93	100	107,52
6	Stasiun PSDKP Belawan	93	100	107,52
7	Stasiun PSDKP Kupang	93		Tidak terdapat target
8	Stasiun PSDKP Tarakan	93	100	107,52

14. IKM-14 Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan Stasiun PSDKP Pontianak

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	80	90,03	112,53
2	Stasiun PSDKP Biak	80	94,89	118,86
3	Stasiun PSDKP Ambon	80	88,5	95,16
4	Stasiun PSDKP Tahuna	80	94,14	117,67
5	Stasiun PSKDP Pontianak	80	91,03	113,79
6	Stasiun PSDKP Belawan	80	79	98,75
7	Stasiun PSDKP Kupang	80	93,62	117,02
8	Stasiun PSDKP Tarakan	80	94,63	118,28

15. IKM-15 Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Pendaratan Ikan) Stasiun PSDKP Pontianak

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian	Keterangan
1	Stasiun PSDKP Cilacap	80	90,83	113,53	
2	Stasiun PSDKP Biak	-	-	-	Tidak memiliki target
3	Stasiun PSDKP Ambon	-	-	-	Tidak memiliki target
4	Stasiun PSDKP Tahuna	-	-	-	Tidak memiliki target
5	Stasiun PSDKP Pontianak	80	86,45	108,06	
6	Stasiun PSDKP Belawan	80	90,37	112,96	
7	Stasiun PSDKP Kupang	80	80	100	
8	Stasiun PSDKP Tarakan	80	97,08	121,35	

16. IKM-16 Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Stasiun PSDKP Pontianak (nilai)

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian	Keterangan
1	Stasiun PSDKP Cilacap	75	88,92	118,56	-
2	Stasiun PSDKP Biak	-	-	-	Tidak memiliki target WBK
3	Stasiun PSDKP Ambon	-	-	-	Tidak memiliki target WBK
4	Stasiun PSDKP Tahuna	75	84,14	112,18	-
5	Stasiun PSDKP Pontianak	75	82,67	110,22	-
6	Stasiun PSDKP Belawan	75	80,51	107,34	-
7	Stasiun PSDKP Tarakan	75	83,81	111,74	-
8	Stasiun PSDKP Kupang	75	89,69	119,58	-

17. IKM-17 Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Stasiun PSDKP Pontianak (%)

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	100	100	100
2	Stasiun PSDKP Biak	100	100	100
3	Stasiun PSDKP Ambon	100	100	100
4	Stasiun PSDKP Tahuna	100	100	100
5	Stasiun PSDKP Pontianak	100	100	100
6	Stasiun PSDKP Belawan	100	100	100
7	Stasiun PSDKP Kupang	100	100	100
8	Stasiun PSDKP Tarakan	100	100	100

18. IKM-18 Indeks Profesionalitas ASN Stasiun PSDKP Pontianak

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	78	88,26	113,15
2	Stasiun PSDKP Biak	78	89,79	115,11
3	Stasiun PSDKP Ambon	78	91,07	116,75
4	Stasiun PSDKP Tahuna	78	88,34	113,25
5	Stasiun PSDKP Pontianak	78	90,59	116,14
6	Stasiun PSDKP Belawan	78	87,87	112,65
7	Stasiun PSDKP Kupang	78	87,28	111,89
8	Stasiun PSDKP Tarakan	78	89,06	114,17

19. IKM-19 Penilaian Mandiri SAKIP Stasiun PSDKP Pontianak (Nilai)

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	80,5	89,7	114,10
2	Stasiun PSDKP Biak	80,5	78,80	97,88
3	Stasiun PSDKP Ambon	80,5	83,3	103,47
4	Stasiun PSDKP Tahuna	80,5	84,8	105,34
5	Stasiun PSDKP Pontianak	80,5	79,55	98,82
6	Stasiun PSDKP Belawan	80,5	82,15	102,04
7	Stasiun PSDKP Kupang	80,5	81,2	100,86
8	Stasiun PSDKP Tarakan	80,5	80,30	99,75

20. IKM-20 Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	75	100	120
2	Stasiun PSDKP Biak	75	75	100
3	Stasiun PSDKP Ambon	75	100	120
4	Stasiun PSDKP Tahuna	75	75	100
5	Stasiun PSDKP Pontianak	75	75	100
6	Stasiun PSDKP Belawan	75	100	120
7	Stasiun PSDKP Kupang	75	100	120
8	Stasiun PSDKP Tarakan	75	100	120

21. IKM-21 Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Stasiun PSDKP Pontianak

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian

1	Stasiun PSDKP Cilacap	21	27,84	120
2	Stasiun PSDKP Biak	21	27,34	120
3	Stasiun PSDKP Ambon	21	23,19	110,42
4	Stasiun PSDKP Tahuna	21	23,19	110,42
5	Stasiun PSDKP Pontianak	21	24,85	118,33
6	Stasiun PSDKP Belawan	21	25,32	120
7	Stasiun PSDKP Kupang	21	26,33	120
8	Stasiun PSDKP Tarakan	21	20,34	96,85

22. IKM-22 Jumlah Inovasi yang Dihasilkan Stasiun PSDKP Pontianak

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	1	1	100
2	Stasiun PSDKP Biak	1	1	100
3	Stasiun PSDKP Ambon	1	1	100
4	Stasiun PSDKP Tahuna	1	1	100
5	Stasiun PSDKP Pontianak	1	1	100
6	Stasiun PSDKP Belawan	1	1	100
7	Stasiun PSDKP Tarakan	1	1	100
8	Stasiun PSDKP Kupang	1	1	100

23. Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	92	108,33	117,75
2	Stasiun PSDKP Biak	92	100	108,69
3	Stasiun PSDKP Ambon	92	121,67	120
4	Stasiun PSDKP Tahuna	92	120	120
5	Stasiun PSDKP Pontianak	92	85	92
6	Stasiun PSDKP Belawan	92	123,33	120
7	Stasiun PSDKP Tarakan	92	8,33	9,05
8	Stasiun PSDKP Kupang	92	133,33	120

24. IKM-24 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	77,5	100	120
2	Stasiun PSDKP Biak	77,5	100	120
3	Stasiun PSDKP Ambon	77,5	100	120
4	Stasiun PSDKP Tahuna	77,5	100	120
5	Stasiun PSDKP Pontianak	77,5	100	120
6	Stasiun PSDKP Belawan	77,5	100	120
7	Stasiun PSDKP Kupang	77,5	100	120
8	Stasiun PSDKP Tarakan	77,5	100	120

25. IKM-25 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Stasiun PSDKP Pontianak

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	77,5	86,40	111,48
2	Stasiun PSDKP Biak	77,5	98,75	120
3	Stasiun PSDKP Ambon	77,5	100	120
4	Stasiun PSDKP Tahuna	77,5	94,64	120
5	Stasiun PSDKP Pontianak	77,5	100	120
6	Stasiun PSDKP Belawan	77,5	95,04	120
7	Stasiun PSDKP Kupang	77,5	94,64	120
8	Stasiun PSDKP Tarakan	77,5	95,94	120

26. IKM-26 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	93,75	94,89	101,21
2	Stasiun PSDKP Biak	93,75	94,73	101,04
3	Stasiun PSDKP Ambon	93,75	92,42	98,58
4	Stasiun PSDKP Tahuna	93,75	96,36	102,78
5	Stasiun PSDKP Pontianak	93,75	92,45	98,61
6	Stasiun PSDKP Belawan	93,75	92,67	98,84
7	Stasiun PSDKP Tarakan	93,75	93,24	99,44
8	Stasiun PSDKP Kupang	93,75	97,14	103,61

27. IKU-25 Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Lingkup Stasiu PSDKP Pontianak

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	82	85,93	104,79
2	Stasiun PSDKP Biak	82	85,83	104,67
3	Stasiun PSDKP Ambon	82	87,67	106,91
4	Stasiun PSDKP Tahuna	82	88,61	108
5	Stasiun PSDKP Pontianak	82	85,92	104,78
6	Stasiun PSDKP Belawan	82	86,2	105,12
7	Stasiun PSDKP Kupang	82	84,64	103,21
8	Stasiun PSDKP Tarakan	82	85,87	104,71

### 3.4. Akuntabilitas Keuangan

Realisasi anggaran Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak diperoleh dari agregasi 5 mata anggaran kegiatan Tahun 2023, yaitu: <sup>(1)</sup> Operasional dan Pemeliharaan Kapal Pengawas; <sup>(2)</sup> Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan; <sup>(3)</sup> Operasional Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan; <sup>(4)</sup> Operasional Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan; <sup>(5)</sup> Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PSDKP, dengan hasil pengukuran sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 50. Rincian Realisasi Anggaran

NO	KODE AKUN	KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
				(Rp)	%
1.	2350	Pemantauan dan Operasi Armada	28.116.552.000	28.073.201.079	99.85
2.	2351	Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	406.200.000	405.258.690	99.77
3.	2352	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	286.152.000	285.374.514	99.73
4.	2353	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	339.930.000	339.805.515	99.96
5.	2355	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PSDKP	16.771.275.000	16.638.422.871	99.21
<b>Total</b>			<b>45.920.109.000</b>	<b>45.742.062.669</b>	<b>99,64</b>

Anggaran yang dikelola Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak pada Tahun 2023 sesuai DIPA Nomor: SP DIPA- 032.05.2.440847/2023 tanggal 21 November Tahun 2023 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 45.920.109.000,- (empat miliar sembilan ratus dua puluh juta seratus sembilan ribu rupiah). Sepanjang tahun 2023 DIPA Stasiun PSDKP Pontianak mengalami 13 kali revisi. Realisasi anggaran yang telah dicapai oleh Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak sampai bulan Desember Tahun 2023 sebesar 99,64% atau sebesar Rp.45.742.062.669,- (empat miliar tujuh ratus empat puluh dua juta enam puluh dua ribu enam ratus enam puluh Sembilan rupiah)

Capaian anggaran yang mencapai lebih dari 99,64% pada akhir tahun 2023 disebabkan akselerasi pelaksanaan kegiatan dengan alokasi anggaran yang besar. Kegiatan yang paling mempengaruhi serapan anggaran adalah kegiatan gelar operasi kapal pengawas dan Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan. Stasiun PSDKP Pontianak pada Tahun 2023 akan memaksimalkan penggunaan anggaran melalui koordinasi bersama para pengelola anggaran baik yang ada di Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak maupun Satwas SDKP di Bawahnya. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang secara langsung berkontribusi dalam serapan anggaran dilakukan secara reguler oleh seluruh perangkat Stasiun pengawasan SDKP Pontianak Rincian serapan anggaran tiap bulan dalam kurun Tahun 2023.

### **a. EFISIENSI**

Guna meningkatkan efisiensi tata kelola pemerintahan serta memberikan pelayanan yang prima kepada stakeholder, telah dilakukan upaya penggunaan sumber daya secara maksimal pada tahun 2023. Sumber daya yang sangat mendukung efisiensi pencapaian target setiap indikator kinerja adalah penggunaan anggaran. Penghitungan efisiensi mengacu pada peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 tahun 2023 tentang pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan rencana dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran efisiensi anggaran dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi keluaran anggaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran. Berdasarkan hasil pengukuran melalui aplikasi Smart Kemenkeu, nilai efisiensi penggunaan anggaran Stasiun PSDKP Pontianak tahun 2023 adalah 0,68. Capaian nilai efisiensi ini didukung oleh tingkat penyerapan anggaran dengan persentase 99,64% dan capaian RO 100% dengan konsistensi 90,68%.

Efisiensi Pencapaian indikator kinerja lingkup Stasiun PSDKP Pontianak tahun 2023 juga tidak lepas dari penggunaan beberapa sumber daya lainnya seperti berikut:

#### **1. Pelaporan kegiatan realtime via WA Group**

Pelaksanaan tugas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, serta operasi armada pengawasan harus dilaporkan sehingga dapat diukur sejauh mana tugas tersebut dilaksanakan, dan juga bahan evaluasi untuk perbaikan kegiatan lanjutan. Dari laporan yang disampaikan dapat juga diketahui issue hangat yang sedang berkembang di lapangan, dengan demikian dapat dimonitoring segera. Oleh sebab itu pelaporan kegiatan secara realtime melalui whatsapp group memberikan ringkasan informasi terupdate kepada pimpinan unit kerja dan seluruh pegawai.

#### **2. Forum komunikasi bersama Stakeholder via WA Goup**

Komunikasi bersama stakeholder terkait merupakan salah satu cara mendapatkan informasi dari eksternal kantor yang berkaitan dengan aktivitas perikanan di wilayah perairan WPP-711 dan 712. Dari komunikasi ini diharapkan banyak issue yang dapat dikembangkan dan juga banyak sumbang saran atas partisipasi anggota group. Rincian efisiensi anggaran pada setiap kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja.

### 3. Pengurangan belanja bahan, pencetakan dan konsumsi

Dengan adanya platform e-layar dimana kegiatan persuratan dilaksanakan secara digital, menjadi alternatif untuk publikasi laporan kegiatan dan laporan kinerja lingkup Stasiun PSDKP Pontianak. Jumlah laporan yang dicetak disesuaikan dengan kebutuhan selebihnya didistribusikan melalui e-layar.

### 4. Optimalisasi penggunaan media daring

Pada tahun 2023 Stasiun PSDKP Pontianak selalu memanfaatkan teknologi informasi dalam kegiatan seperti untuk rapat, supervisi, bimbingan teknis lingkup Stasiun PSDKP Pontianak

## BAB 4 PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

1. Laporan Kinerja (LKj) Stasiun PSDKP Pontianak Tahun 2023 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam capaian strategis Stasiun PSDKP Pontianak pada periode tahun 2023, yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja. Selanjutnya dilakukan analisis dan evaluasi serta pembandingan terhadap capaian indikator kinerja tahun sebelumnya sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan.
2. Keseluruhan indikator kinerja sebanyak 27 (dua puluh tujuh) dengan 3 indikator kinerja yang tidak tercapai yaitu: (1) Penilaian Mandiri SAKIP; (2) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan; (3) Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar pada Triwulan IV.

### 4.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi atas capaian kinerja Stasiun PSDKP Pontianak pada Tahun 2023, maka untuk triwulan dan tahun berikutnya terdapat rekomendasi untuk perbaikan diwaktu yang akan datang, rekomendasi dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 51. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Tahun 2023 Stasiun PSDKP Pontianak

No	Hal yang Harus Menjadi Perhatian	Permasalahan	Hal yang Harus Diperbaiki	Rencana Tindak Lanjut
1	Penilaian Mandiri SAKIP	Terdapat Anggota Tim SAKIP Stasiun PSDKP Pontianak belum memiliki sertifikat workshop/bimtek SAKIP	Peningkatan SDM SAKIP Stasiun PSDKP Pontianak	Anggota Tim SAKIP mengikuti workshop/bimtek SAKIP
2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Kekurangan pada nilai Devisiasi Halaman III DIPA dan nilai Dispensasi SPM	Perbaikan pada nilai Devisiasi Halaman III DIPA dan nilai Dispensasi SPM	Meningkatkan nilai yang belum optimal (Halaman III DIPA dan Dispensasi SPM)

No	Hal yang Harus Menjadi Perhatian	Permasalahan	Hal yang Harus Diperbaiki	Rencana Tindak Lanjut
3	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar	Terdapat beberapa yang berkewajiban pada triwulan IV terlambat dalam mengunggah kegiatan pada Colaboration Office	Keaktifan yang berkewajiban dalam mengunggah kegiatan	Yang berkewajiban agar tepat waktu dalam mengunggah kegiatan

## **LAMPIRAN. PERJANJIAN KINERJA**

### **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN  
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041  
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520346  
LAMAN [www.dkp.go.id](http://dkp.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
STASIUN PENGAWASAN SDKP PONTIANAK**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Abdul Quddus**  
Jabatan : Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **Adin Nurawaluddin**  
Jabatan : Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 17 Januari 2023

Pihak Kedua  
Direktur Jenderal Pengawasan  
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Adin Nurawaluddin

Pihak Pertama  
Kepala Stasiun Pengawasan  
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak

Abdul Quddus

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**STASIUN PENGAWASAN PSDKP PONTIANAK**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
<b>KEGIATAN 1. PEMANTAUAN, OPERASI ARMADA DAN INFRASTRUKTUR PENGAWASAN</b>				
1.1	Terselenggaranya Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat yang Partisipatif	1.1.1	Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas (Indeks)	80
1.2	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan PSDKP yang Efektif	1.2.1	Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas (Indeks)	87,5
		1.2.2	Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas (Indeks)	87,5
1.3	Terselenggaranya Pembangunan Serta Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan PSDKP yang Sesuai Ketentuan	1.3.1	Persentase Penyelesaian Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan PSDKP (%)	100
<b>KEGIATAN 2. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN</b>				
2.1	Terselenggaranya Pengawasan Pelaku Usaha Kelautan yang Sesuai Ketentuan	2.1.1	Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha Kelautan (%)	100
<b>KEGIATAN 3. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN</b>				
3.1	Terselenggaranya Pengawasan Pelaku Usaha Perikanan yang Sesuai Ketentuan	3.1.1	Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha Perikanan (%)	100
<b>KEGIATAN 4. PENANGANAN PELANGGARAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>				
4.1	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan yang Tuntas	4.1.1	Persentase Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan (%)	80
4.2	Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Berkualitas	4.2.1	Persentase Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (%)	93
<b>KEGIATAN 5. DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL LINGKUP DITJEN PSDKP</b>				
5.1	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Ditjen PSDKP	5.1.1	Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Surat Lalu Operasi (SLO) Kapal Perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (Indeks)	80
		5.1.2	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lember Verifikasi Hasil Penangkapan ikan) lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (Indeks)	80
		5.1.3	Nilai WBK Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (nilai)	75
		5.1.4	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko	100

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%)	
5.1.5		Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (Indeks)	78
5.1.6		Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (Nilai)	90
5.1.7		Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	75
5.1.8		Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Stasiun PSDKP Pontianak (Nilai)	21
5.1.9		Jumlah Inovasi yang Dihasilkan Stasiun PSDKP Pontianak (Inovasi)	1
5.1.10		Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengelahan yang Terstandar Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%)	92
5.1.11		Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%)	77,5
5.1.12		Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%)	77,5
5.1.13		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (Nilai)	88
5.1.14		Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (Nilai)	81

**Data Anggaran**

NO	KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
Kegiatan 1	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	622.564.000
Kegiatan 2	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	657.000.000
Kegiatan 3	Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan	22.758.645.000
Kegiatan 4	Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	406.200.000
Kegiatan 5	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	16.693.554.000
<b>Total Anggaran</b>		<b>41.137.963.000</b>

Jakarta, 17 Januari 2023

Pihak Kedua  
Direktur Jenderal Pengawasan  
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

  
Adin Nurawaluddin

Pihak Pertama  
Kepala Stasiun Pengawasan  
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak

  
Abdul Quedus

# PERJANJIAN KERJA REVISI



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN  
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN  
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NO. 16  
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041  
TELEPON: (021) 3519070 FAKSIMILE: (021) 3520346  
WEBSITE: [www.dpsdkp.kkp.go.id](http://www.dpsdkp.kkp.go.id) EMAIL: [dijenpsdkp@kkn.go.id](mailto:dijenpsdkp@kkn.go.id)

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 STASIUN PENGAWASAN PSDKP PONTIANAK

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Abdul Quddus**  
Jabatan : Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Adin Nurawaluddin**  
Jabatan : Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah diletakkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pontianak, 5 Desember 2023

Pihak Kedua  
Direktur Jenderal Pengawasan  
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Pihak Pertama  
Kepala Stasiun Pengawasan  
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak

Adin Nurawaluddin

Abdul Quddus

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**STASIUN PENGAWASAN SDKP PONTIANAK**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
<b>KEGIATAN 1. PEMANTAUAN, OPERASI ARMADA DAN INFRASTRUKTUR PENGAWASAN</b>			
1.1	Terselenggaranya Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat yang Partisipatif	1 Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas (Indeks)	80
1.2	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang Efektif	2 Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas (Indeks)	87,6
		3 Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas (Indeks)	87,6
		4 Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas (%)	100
1.3	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	5 Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP (%)	100
<b>KEGIATAN 2. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN</b>			
2.1	Terselenggaranya Pengawasan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan	6 Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan (Nilai)	100
2.2	Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Kelautan	7 Persentase Penyelesaian Pengumpulan Data dan Informasi Intelijen Kelautan (%)	100
<b>KEGIATAN 3. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN</b>			
3.1	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan	8 Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan (Nilai)	100
3.2	Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Perikanan	9 Persentase Penyelesaian Pengumpulan Data dan Informasi Intelijen Perikanan (%)	100
<b>KEGIATAN 4. PENANGANAN PELANGGARAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>			
4.1	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan yang Tuntas	10 Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (Indeks)	80
		11 Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (Indeks)	80
		12 Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Pengenaan Sanksi Administratif (Indeks)	80

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
4.2	Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Berkualitas	13	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (Indeks)	
<b>KEGIATAN 5. DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL LINGKUP DITJEN. PSDKP</b>				
5.1	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Ditjen PSDKP	14	Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (Indeks)	80
		15	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan ikan) lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (Indeks)	80
		16	Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (nilai)	75
		17	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%)	100
		18	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (Indeks)	78
		19	Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (Nilai)	80,5
		20	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	75
		21	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Stasiun PSDKP Pontianak (Nilai)	21
		22	Jumlah Inovasi yang Dihasilkan Stasiun PSDKP Pontianak. (Inovasi)	1
		23	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%)	92
		24	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%)	77,5
		25	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%)	77,5
		26	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (Nilai)	93,75
		27	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (Nilai)	82

**Data Anggaran**

NO	PROGRAM/SASARAN PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
Kegiatan 1	Pemantauan, Operasi Armada Dan Infrastruktur Pengawasan	28.116.552.000
Kegiatan 2	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	286.152.000
Kegiatan 3	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	339.930.000
Kegiatan 4	Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	406.200.000
Kegiatan 5	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	16.771.275.000
<b>Total Anggaran</b>		<b>45.920.109.000</b>

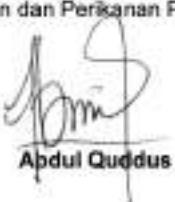
Pontianak, 5 Desember 2023

Pihak Kedua  
Direktur Jenderal Pengawasan  
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



Adin Nurawaluddin

Pihak Pertama  
Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya  
Kelautan dan Perikanan Pontianak



Abdul Quddus